



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|----------------------------|---|
| | Provinsi Kalimantan Tengah | <p>Peningkatan konektivitas tenaga listrik disertai pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan digitalisasi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu• Pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan, dengan <i>output</i>: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)• Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk• Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat, dan layanan penyiaran digital disertai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan digitalisasi masyarakat |
| | Provinsi Kalimantan Tengah | <p>Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal di RS sesuai standar; dan pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS• Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kecamatan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan <i>output</i>: pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kecamatan sesuai standar, peningkatan ketrampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar, pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar, dan revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu• Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan <i>output</i>: penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer |
| | Provinsi Kalimantan Tengah | <p>Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dengan <i>output</i>: pengembangan dan pengelolaan SPAM• Peningkatan utilitas dasar perdesaan, dengan <i>output</i>: peningkatan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan setempat skala individu• Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional, skala kota, skala kawasan, dan berbasis masyarakat• Fasilitasi pembangunan rumah baru, dengan <i>output</i>: bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan rehabilitasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM) |
| | Provinsi Kalimantan Tengah | <p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; pembinaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian malaria |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

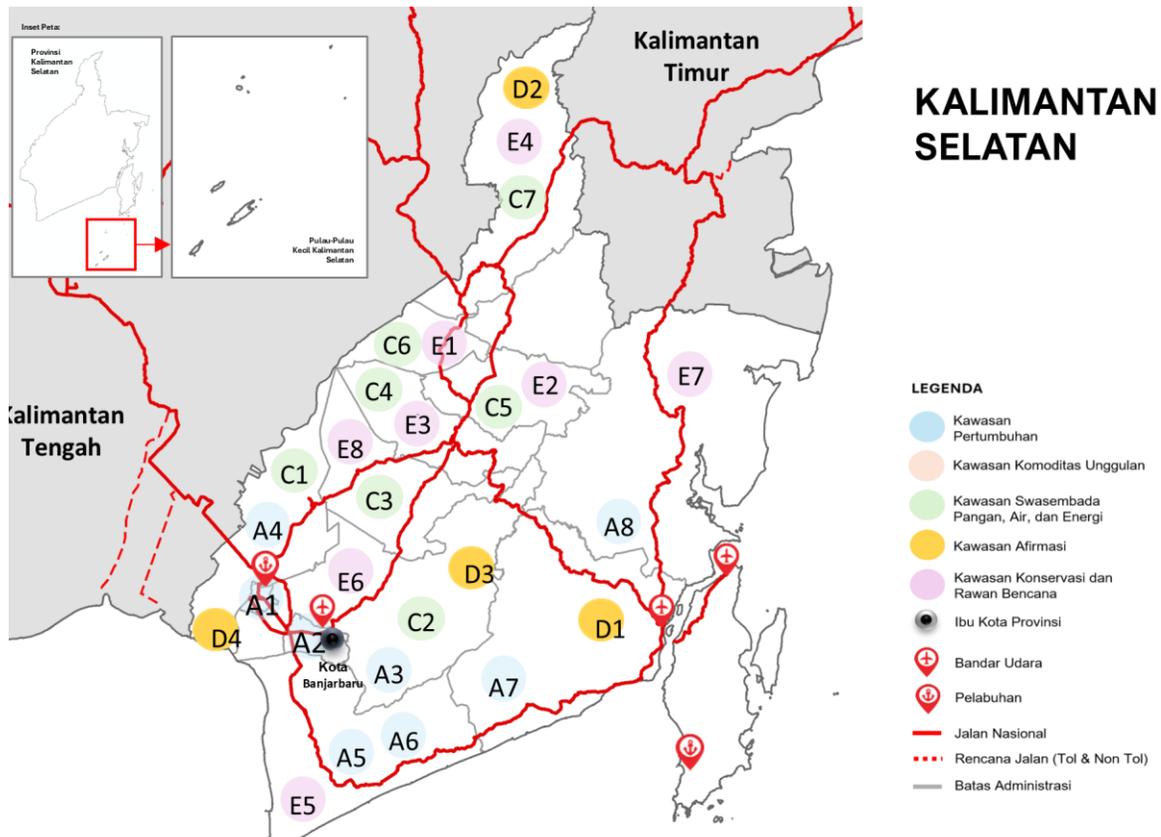
| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|----------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan intervensi spesifik dan sensitif <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penerapan konvergensi Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> di daerah, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi, balita, ibu, dan bayi baru lahir, fasilitasi dan pembinaan: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING), Implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan penganekaragaman pangan |
| | Provinsi Kalimantan Tengah | <p>Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan <i>output</i>: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial• Penyaluran bantuan sosial adaptif dan penguatan JKN, dengan <i>output</i>: penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3kg yang tepat sasaran• Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

4.3 Provinsi Kalimantan Selatan



A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin

1. Kota Banjarmasin
2. Kota Banjarbaru
3. Kabupaten Banjar
4. Kabupaten Barito Kuala
5. Kabupaten Tanah Laut

Kawasan Pertumbuhan Industri Baru

6. Kabupaten Tanah Laut
7. Kabupaten Tanah Bumbu
8. Kabupaten Kotabaru

D. Kawasan Afiriasi

Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP)

1. KPP Agropolitan, Kabupaten Tanah Bumbu
2. KPP Agrowisata Hortikultura Kabupaten Tabalong
3. KPP Agrominapolitan Kabupaten Banjar

Kawasan Transmigrasi (KT)

4. KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu

1. Kabupaten Barito Kuala
2. Kabupaten Banjar
3. Kabupaten Tapin
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara,
7. Kabupaten Tabalong

E. Kawasan Konservasi

Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado)

1. Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kabupaten Tabalong
5. Kabupaten Tanah Laut
6. Kabupaten Banjar
7. Kabupaten Kotabaru
8. Kabupaten Tapin



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 7,1 <small>(Rata-rata 2025–2029)</small> | 72,7 | 1,3 | 3,44 – 3,94 | 0,307 – 0,311 | 0,57 | 75,97 | 72,32 | 3,86 – 4,25 |
| 2029 | 8,1 <small>(2029)</small> | 106,3 | 1,3 | 1,64 – 2,64 | 0,274 – 0,278 | 0,61 | 80,99 | 73,10 | 3,29 – 3,97 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------|--|---|
| A1 A2 A3 A4 A5 | <p>Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1: Kota Banjarmasin • A2: Kota Banjarbaru • A3: Kabupaten Banjar • A4: Kabupaten Barito Kuala • A5: Kabupaten Tanah Laut | <p>Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional, dengan <i>output</i>: bantuan peralatan/sarana, penyelidikan geologi tata lingkungan untuk penataan ruang dan infrastruktur • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya, dengan <i>output</i>: bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) bidang perumahan, bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja, bantuan pembangunan rumah swadaya, pemukiman kembali, peremajaan, dan pemugaran permukiman kumuh, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, fasilitasi literasi digital, jalan non-status yang dikembangkan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Barito Kuala, subsidi angkutan umum perkotaan di Kota Banjarmasin • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan, dengan <i>output</i>: PBK Provinsi Kalimantan Selatan, <i>pilot project</i> kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh, dengan <i>output</i>: pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas, penguatan instrumen peringatan dini bencana • Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu melalui pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola WM Banjarmasin dan penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan <i>output</i>: daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan, daerah yang melakukan penilaian indeks maturasi perkotaan lintas K/L secara terpadu di wilayah metropolitan, daerah yang dikuatkan tata kelola <i>smart city</i>-nya di wilayah metropolitan, dan daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP perkotaan pada wilayah metropolitan • Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan <i>output</i>: <i>Metropolitan Statistical Area</i> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|--|---|---|
| A6 A7 A8 | Kawasan Pertumbuhan Industri Baru: <ul style="list-style-type: none">A6: Kabupaten Tanah LautA7: Kabupaten Tanah BumbuA8: Kabupaten Kotabaru | <p>Pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubaraPengembangan hilirisasi nikel, dengan <i>output</i>: industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya, kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel, perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi, industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor industri logam, industri yang terfasilitasi melalui pendampingan dalam rangka peningkatan investasi dan/atau ekspor, industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan akses pasar dan pendampingan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeriPengembangan industri karet, dengan <i>output</i>: penyusunan data <i>supply-demand</i> sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/<i>workshop</i>/layanan industri karet, serta pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaranPengembangan hilirisasi kelapa sawit, dengan <i>output</i>: kriteria standar CPO untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, peralatan fasilitas laboratorium/<i>workshop</i>/layanan industri hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim, fasilitasi peningkatan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit melalui pembentukan lembaga sertifikasi (LS) ISPO Hilir, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - <i>Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel</i>) berbahan baku <i>technical oil</i>, fasilitasi penyediaan pasokan bioetanol untuk bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional, serta kebijakan pembangunan rendah karbon (PRK) dan penurunan gas rumah kaca (GRK) sektor industriPeningkatan investasi hilirisasi besi baja |
| C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 | Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu: <ul style="list-style-type: none">C1: Kabupaten Barito KualaC2: Kabupaten BanjarC3: Kabupaten TapinC4: Kabupaten Hulu Sungai SelatanC5: Kabupaten Hulu Sungai TengahC6: Kabupaten Hulu Sungai UtaraC7: Kabupaten Tabalong | <p>Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan <i>output</i>: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai UtaraPeningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan <i>output</i>: kawasan karetPenguatan pascapanen pangan nabati, dengan <i>output</i>: sarana pascapanen tanaman perkebunanPeningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan <i>output</i>: benih ternak unggulPengembangan pengairan dan irigasi dengan <i>output</i>: pembangunan dan/atau pengembangan irigasi di Wilayah Sungai (WS) Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan panganPeningkatan ketersediaan pangan, dengan <i>output</i>: intervensi cetak sawah di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|--|---|---|
| D1 D2 D3 | Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP): <ul style="list-style-type: none">D1: KPP Agropolitan, Kabupaten Tanah BumbuD2: KPP Agrowisata Hortikultura, Kabupaten TabalongD3: KPP Agrominapolitan, Kabupaten Banjar | <p>Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan rincian <i>output</i>: fasilitasi lembaga posyandu dalam penerapan 6 bidang SPM, sarana puskesmas, pustu dan posyandu (SOPHI), fasilitasi program P4GN bidang pencegahan berbasis sumber daya pembangunan desa, desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan <i>stunting</i>, revitalisasi posyandu, dan kampanye posyandu aktif, sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatanPeningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan rincian <i>output</i>: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, penguatan interkoneksi ketenagalistrikan Barito - Mahakam; pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/<i>Lastmile</i>, pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi, sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkanPengembangan dan diversifikasi ekonomi lokalPengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya)Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa |
| D4 | Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala: <ul style="list-style-type: none">D4: KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman.Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: bantuan sarana produksi pertanian.Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi.Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran. |
| E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 | Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado): <ul style="list-style-type: none">E1: Kabupaten Hulu Sungai UtaraE2: Kabupaten Hulu Sungai TengahE3: Kabupaten Hulu Sungai SelatanE4: Kabupaten TabalongE5: Kabupaten Tanah Laut | <p>Pengembangan ekowisata kelas dunia di <i>Geopark Geosite Meratus</i> dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pengembangan <i>eco-tourism</i> kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi <i>global geopark</i>) di <i>Geopark Geosite Meratus</i> dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerjaPelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan <i>Geopark Meratus</i> dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• E6: Kabupaten Banjar• E7: Kabupaten Kotabaru• E8: Kabupaten Tapin | |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | <p>Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jembatan Laut–Pulau Kalimantan• Pembangunan jalan nasional, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis ruas Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah)–Serapat–Batas Kota Banjarmasin• Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, dengan <i>output</i>: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan ruas Walangsi–Kaparkias dan Pagatan–Batulicin• Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, dengan <i>output</i>: Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional di Kab. Kotabaru• Pengembangan pelabuhan logistik di Pulau Laut, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan• Pengembangan bandara, dengan <i>output</i>: Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | <p>Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik• Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | <p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan intervensi spesifik dan sensitif <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>buffer-stock</i>, dan kegiatan koordinasi dan advokasi terkait perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita• Intensifikasi penemuan kasus, pengobatan, serta peningkatan upaya pencegahan, dengan <i>output</i>: pemberian obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, serta NSPK pencegahan dan pengendalian TBC• Eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, supervisi dan monitoring evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tropis, serta <i>assessment</i> eliminasi penyakit tropis (kusta)• Pencegahan dan pengendalian kejadian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria• Pengendalian penyakit menular lainnya, dengan <i>output</i> NSPK pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | <p>Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin• Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-----------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna• Pembiayaan JKN/KIS melalui Bantuan Masyarakat, dengan <i>output</i>: cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS• Pembangunan rumah sakit lengkap di kabupaten, melalui: pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) melalui fasilitasi pembangunan rumah baru, penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak, penyaluran subsidi/bantuan pembiayaan rumah, serta penanganan permukiman kumuh, dengan <i>output</i> : bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI, rumah swadaya, dan MBR/pekerja, bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) bidang perumahan; pembangunan, peningkatan, dan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan kabupaten/kota; infrastruktur air minum berbasis masyarakat; fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka; pemugaran dan pememajaan permukiman kumuh. |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri;• Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK;• Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK.• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui: <ul style="list-style-type: none">• Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan <i>output</i>: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial;• Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, dengan <i>output</i>: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran. |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | Peningkatan kualitas pemuda, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, dengan <i>output</i>: pengembangan tata kelola pembinaan olahraga prestasi, dan pengembangan sistem pembinaan olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade;• Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, dan pencegahan perilaku berisiko;• Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan, dengan <i>output</i>: peningkatan partisipasi ketenagakerjaan layak pemuda, dan peningkatan kewirausahaan pemuda; |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

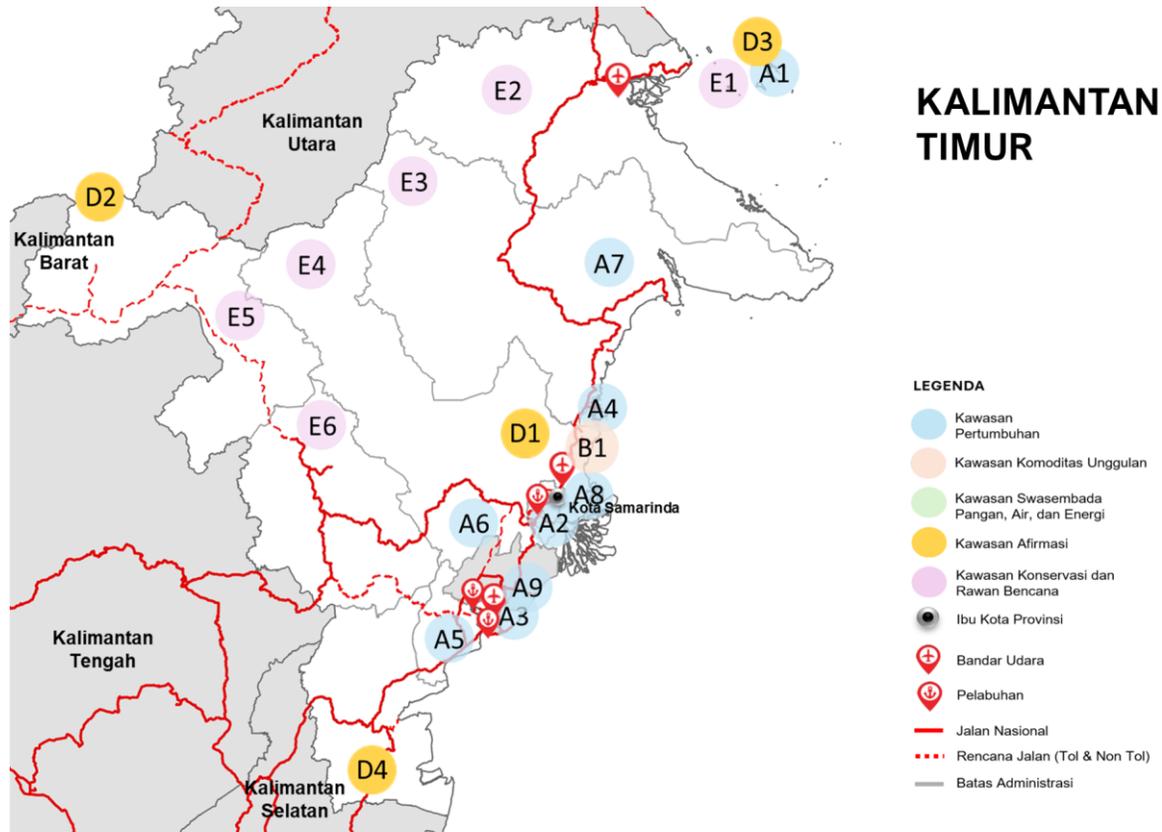
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-----------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik;• Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas, dengan <i>output</i>: penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial;• Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia, dengan <i>output</i>: lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial. |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | Perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;• Pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya;• Penguatan data, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. |
| | Provinsi Kalimantan Selatan | Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan <i>output</i>: penguatan instrumen peringatan dini bencana;• Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

4.4 Provinsi Kalimantan Timur



KALIMANTAN TIMUR

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau

1. Kabupaten Berau

Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara

2. Kota Samarinda
3. Kota Balikpapan
4. Kota Bontang
5. Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kabupaten Kutai Timur

Kawasan Perkotaan Besar

8. Kota Samarinda
9. Kota Balikpapan

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur

1. Kabupaten Kutai Kartanegara

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)

1. KPP Agroekowisata, Kabupaten Kutai Kartanegara

Kawasan Perbatasan Prioritas

2. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Berau

Kawasan Transmigrasi (KT)

4. Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser

E. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Derawan

1. Kabupaten Berau

Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo)

2. Kabupaten Berau
3. Kabupaten Kutai Timur
4. Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kabupaten Mahakam Ulu
6. Kabupaten Kutai Barat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 7,8 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 237,1 | 4,2 | 4,24 – 5,05 | 0,310-0,321 | 0,59 | 40,82 | 80,20 | 4,60 – 5,14 |
| 2029 | 8,6 <small>(2029)</small> | 326,9 | 4,6 | 2,37 – 3,37 | 0,309 - 0,313 | 0,62 | 67,46 | 80,87 | 4,14 – 4,77 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| A1 | <p>Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1: Kabupaten Berau | <p>Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan khususnya di Pulau Derawan dan Pulau Maratua, penyusunan) rencana induk/masterplan penataan dan pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan <i>Tourist Information Center</i> sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata • Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandara Maratua, jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik (<i>backbone</i>) dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi tenaga listrik dan listrik pedesaan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan <i>output</i>: lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (<i>Base Transceiver Station / Lastmile</i> 4G) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan <i>output</i>: Fasilitator/<i>Enabler Digital</i> PMSE yang dibina, pelaksanaan pemantauan/monitoring, bimtek pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE dan masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital • Perluasan layanan penyiaran digital, dengan <i>output</i>: transmisi yang terbangun, pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru dan <i>downtime</i> siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan) yang terjadi |
| A2 | Kawasan <i>Superhub</i> | <p>Pengembangan kawasan <i>superhub</i> ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM Regional Kalimantan Timur • Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan <i>output</i>: pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta <i>event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i> (MICE) dalam negeri yang didukung • Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan <i>output</i>: kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan, |
| A3 | Ekonomi Ibu Kota Nusantara | |
| A4 | • A2: Kota Samarinda | |
| A5 | • A3: Kota Balikpapan | |
| A6 | • A4: Kota Bontang | |
| A7 | • A5: Kabupaten Penajam Paser Utara | |
| | • A6: Kabupaten Kutai Kartanegara | |
| | • A7: Kabupaten Kutai Timur | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|------------------|--|
| | | <p>penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta musik</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara• Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan <i>output</i>: kriteria standar <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi Kedua (HVO/SAF - <i>Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel</i>) berbahan baku <i>technical oil</i>, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian• Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan <i>output</i>: rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas <i>coal to ammonia</i> di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (<i>Indonesia Deepwater Development Project/IDD</i>), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan• Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan <i>output</i>: penyusunan data <i>supply-demand</i> dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan <i>output</i>: pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan <i>making Indonesia 4.0</i> pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan• Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan <i>output</i>: pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)• Peningkatan produksi pangan nabati, dengan <i>output</i>: alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura• Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan <i>output</i>: preservasi pada sejumlah jalan/jembatan koridor logistik• Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan <i>output</i>: pengembangan pelabuhan• Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|--|--|
| | | <p>Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5• Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan <i>output</i>: pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (<i>Buy the Service</i>) di Kota Balikpapan |
| A8 A9 | <p>Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan</p> <ul style="list-style-type: none">• A8: Kota Samarinda• A9: Kota Balikpapan | <p>Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan, dengan <i>output</i>: bantuan PSU bidang perumahan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI, pemugaran permukiman kumuh, peremajaan permukiman kumuh, permukiman kembali permukiman kumuh, bantuan pembangunan rumah swadaya, bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi, penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota besar (Samarinda dan Balikpapan), penataan kawasan prioritas pada Kota Samarinda (Blok Teras Samarinda-Zona Kota Tua), pembangunan fasilitas pendidikan politeknik pariwisata di Samarinda untuk mendukung pengembangan pariwisata di IKN dan sekitarnya, serta penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z</p> |
| B1 | <p>Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur</p> <ul style="list-style-type: none">• B1: Kabupaten Kutai Kartanegara | <p>Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan <i>output</i>: klaster revitalisasi tambak udang dan bandeng, irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP), kampung perikanan budi daya air payau yang dikembangkan, klaster komoditas unggulan air tawar berbasis kawasan, klaster komoditas unggulan air payau berbasis kawasan dan revitalisasi tambak budi daya ikan air payau</p> |
| D1 | <p>Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)</p> <ul style="list-style-type: none">• D1: KPP Agroekowisata Kabupaten Kutai Kartanegara | <p>Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata Kutai Kartanegara, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan <i>output</i>: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, sarana dan prasarana perdagangan desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan <i>output</i>: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/<i>Lastmile</i>, dan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, pendampingan desa dan pengembangan BUMDesa• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya), dengan <i>output</i>: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di dilayah destinasi II yang dikembangkan dan pengembangan, penguatan tata kelola desa wisata dan penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa, dengan <i>output</i>: pengembangan Akademi Desa 4.0, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------------------------|---|--|
| | | <p>pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa dan integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas desa wisata, dengan <i>output</i>: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan |
| D2 D3 | <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • D2: Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu • D3: Kec. Maratua, Kabupaten Berau | <p>Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i> di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, pembangunan jalan koridor logistik (<i>backbone</i>), dan pengembangan Bandara Kalimantan, Kabupaten Berau |
| D4 | <p>Kawasan Transmigrasi (KT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • D4: KT Kerang, Kabupaten Paser | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran |
| E1 | <p>Kawasan Konservasi Derawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • E1: Kabupaten Berau | <p>Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: data dan informasi ekosistem dan data dan informasi konservasi biota perairan • Peningkatan sarana pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: sarana pendukung penyelenggaraan konservasi biota perairan • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem, kawasan konservasi perairan yang operasional dan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA • Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelola kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: kelompok masyarakat penggerak konservasi dan pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya |
| E2 E3 E4 E5 E6 | <p>Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • E2: Kabupaten Berau • E3: Kabupaten Kutai Timur • E4: Kabupaten Kutai Kartanegara • E5: Kabupaten Mahakam Ulu • E6: Kabupaten Kutai Barat | <p>Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di wilayah Kalimantan Timur disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan <i>output</i>: penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat dan udara, kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta area penanganan dampak • Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan <i>output</i>: lahan gambut yang dipulihkan dan direstorasi serta data dan informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) • Rehabilitasi ekosistem mangrove, dengan <i>output</i>: lahan rusak yang dipulihkan, pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan <i>output</i>: inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan• Pengendalian banjir di kawasan perkotaan dan daerah berisiko tinggi• Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan sarana dan prasarana sektor logistik yang berkelanjutan, dengan <i>output</i>: layanan angkutan penyeberangan perintis |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sejenisnya secara partisipatif (hulu) beserta penanganannya (hilir), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah berbasis <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R) melalui Tempat Pengolahan Sistem Terpadu (TPST) guna pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor pengolahan sampah, dengan <i>output</i>: sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat• Pemanfaatan teknologi pengolahan <i>Refuse Derived Fuel (RDF) plant</i> dan teknologi tepat guna lainnya di berbagai lini industri, dengan <i>output</i>: pemanfaatan teknologi pengolahan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau• Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan pada perumahan tapak, dengan <i>output</i>: bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Penguatan konektivitas listrik terutama bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah afirmasi serta implementasi transisi energi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dengan pemanfaatan energi rendah karbon, dengan <i>output</i>: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro• Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan konektivitas udara, dengan <i>output</i>: pembangunan Bandara Ujoh Bilang (Kabupaten Mahakam Ulu)• Pembangunan Rumah Sakit lengkap di Kabupaten, dengan <i>output</i>: peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Mahakam Ulu |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Perwujudan swasembada sektor pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produksi pangan nabati dan pemberdayaan ekonomi, dengan <i>output</i>: alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura• Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i>: rekomendasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian• Pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, dengan <i>output</i>: Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan• Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan <i>output</i>: area pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura dan sarana perlindungan hortikultura• Peningkatan produksi pangan nabati dan modernisasi jaringan irigasi guna peningkatan pemberdayaan ekonomi, dengan <i>output</i>: jaringan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---------------------------|--|
| | | <p>irigasi yang direhabilitasi dan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none">• Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi) |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC, malaria dan HIV/AIDS) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan intervensi spesifik <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>buffer stock</i>• Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan sebagai upaya pencegahan TBC, dengan <i>output</i>: tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian, layanan survei faktor risiko dan layanan pencegahan penyakit TBC• Pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian, sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menuju eliminasi dan layanan survei faktor risiko penyakit malaria• Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian serta layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS• Pengendalian penyakit kusta, dengan <i>output</i>: masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian serta tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit kusta |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan <i>output</i>: pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya, fasilitasi pengelolaan proyek penguatan Rumah Sakit layanan kanker, jantung, stroke, dan <i>uro-nefrologi</i> (KJSU) dan pengembangan layanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis komputer di seluruh Kabupaten/Kota• Peningkatan kualitas pelayanan rujukan, dengan <i>output</i>: NSPK mutu dan akreditasi rumah sakit |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan <i>output</i>: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial• Penyaluran bantuan sosial adaptif dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional, dengan <i>output</i>: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran dan pemberian perlindungan kerja melalui fasilitasi PBI Jamsostek dan jaminan kehilangan pekerjaan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

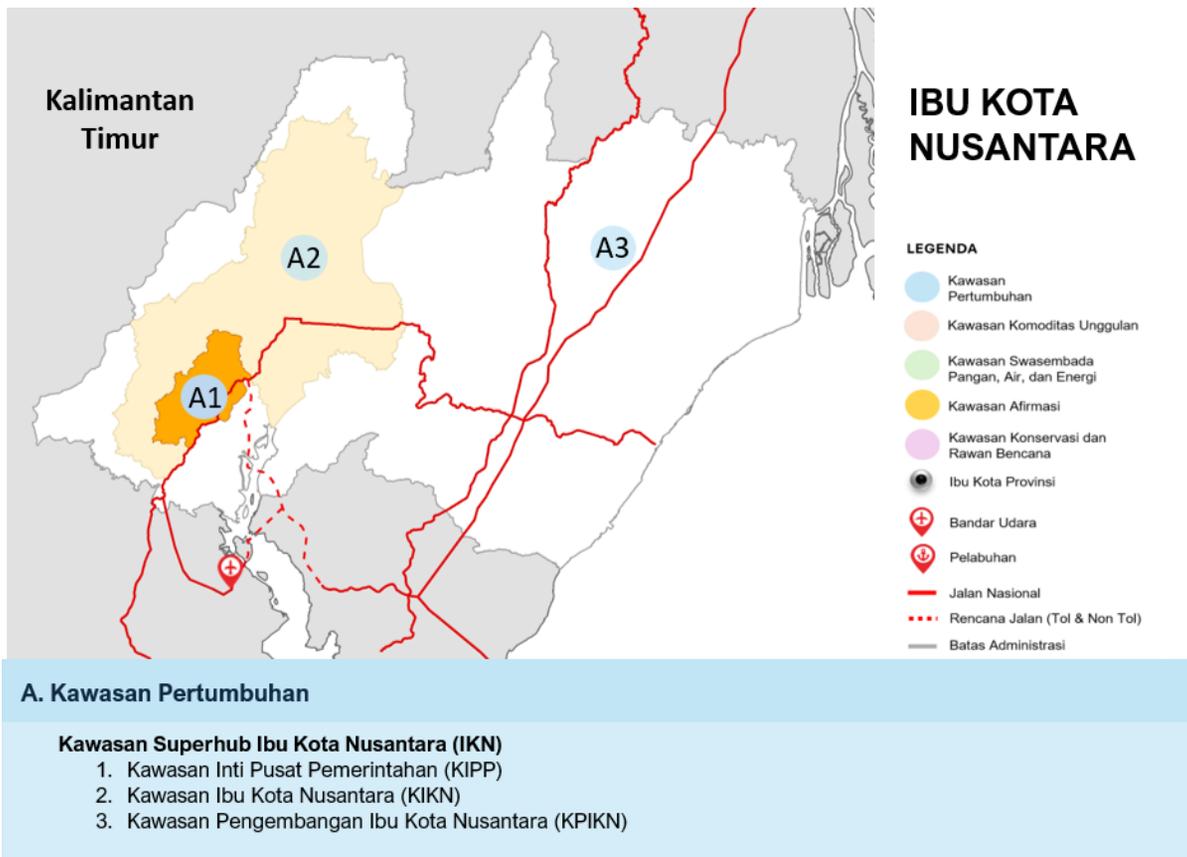
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---------------------------|--|
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang <i>STEAM</i>, serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja berupa pengembangan bidang keahlian jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan• Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi (PT) Vokasi, dengan <i>output</i>: gedung, bangunan dan prasarana pendidikan tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya• Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan <i>output</i>: SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan, berbasis industri dan mendapatkan pendampingan peningkatan mutu• Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan <i>output</i>: guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan, inovasi model pembelajaran vokasi dan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri untuk kebutuhan dunia kerja• Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK, dengan <i>output</i>: siswa SMK/MAK yang mendapatkan penguatan persiapan program magang luar negeri dan tersertifikasi terhadap kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja• Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan <i>output</i>: pengembangan kerja sama pelatihan dan satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mitigasi bencana di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan <i>output</i>: koordinasi, pelayanan publik lainnya dan dukungan teknis bidang lingkungan hidup penanggulangan bencana• Pelaksanaan bantuan kebencanaan, dengan <i>output</i>: analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana• Pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan <i>output</i>: koordinasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta pelayanan publik lainnya bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana• Peningkatan kapasitas aparat pemerintah penanggulangan bencana, dengan <i>output</i>: pendidikan dan pelatihan teknis Penanggulangan Bencana (PB), daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana, pendidikan dan pelatihan teknis PB bagi fasilitator nasional dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi• Penyusunan dokumen penanggulangan bencana, dengan <i>output</i>: analisis pengembangan strategi, rekomendasi kebijakan dan analisis strategi penanggulangan bencana• Peningkatan keandalan bangunan berketahanan bencana, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana, penataan bangunan kawasan rawan bencana dan daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian Pelaksanaan Bangunan Gedung (PBG) berketahanan bencana |
| | Provinsi Kalimantan Timur | <p>Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah ulayat masyarakat adat melalui pembinaan talenta seni budaya, dengan <i>output</i>: warisan budaya yang diregistrasi nasional dan ditetapkan dan warisan budaya yang dilindungi</p> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

4.5 Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara



| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| A1 | Kawasan <i>Superhub</i> Ibu Kota Nusantara (IKN) | Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta pemindahan, melalui: |
| A2 | | <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitarnya, dengan <i>output</i>: Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara |
| A3 | <ul style="list-style-type: none"> • A1: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) • A2: Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) • A3: Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung/perkantoran, dengan <i>output</i>: bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan • Pembangunan gedung/hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan <i>output</i>: bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan • Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan <i>output</i>: Rumah Susun ASN dan Hankam, hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan • Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya • Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan <i>output</i>: jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

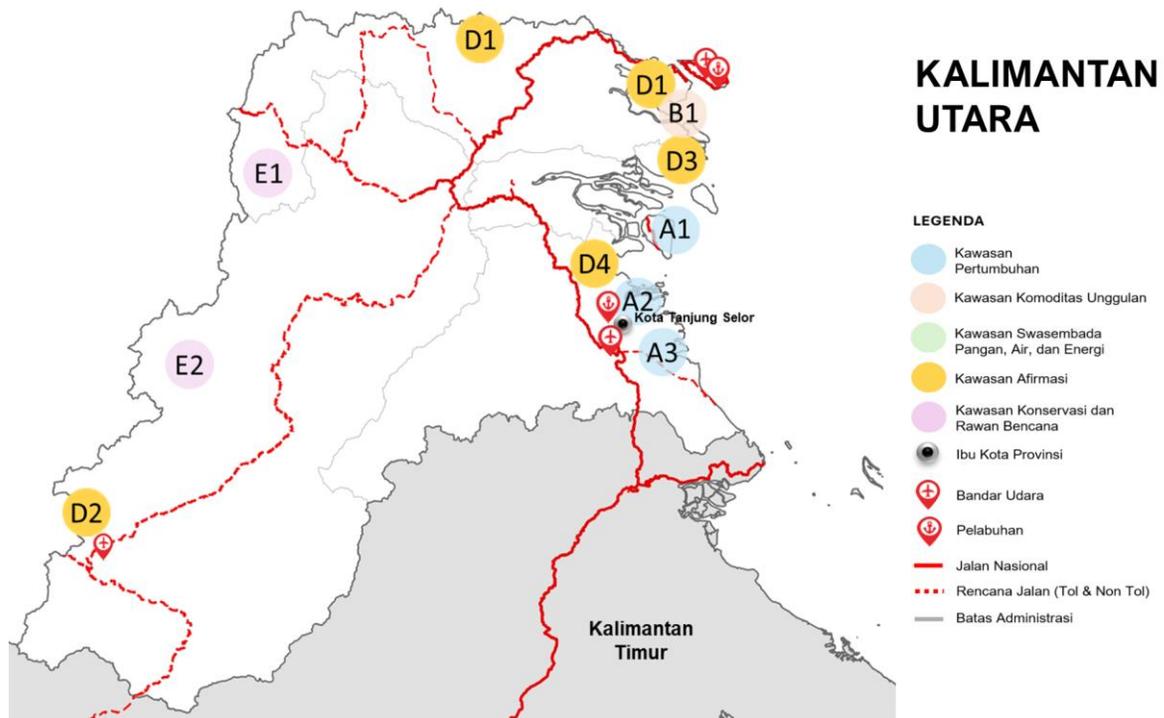
| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|------------------|---|
| | | <p>infrastruktur jalan dan <i>multi utility tunnel</i> (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemindahan ASN dan personel hankam, dengan <i>output</i>: diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, pengamanan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke Ibu Kota Nusantara• Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan <i>output</i>: sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan |
| | | <p>Pembangunan sosial, <i>superhub</i> ekonomi, dan pengelolaan lingkungan Ibu Kota Nusantara, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan <i>output</i>: pembinaan ekonomi dan pelatihan vokasi• Peningkatan investasi, dengan <i>output</i>: promosi kegiatan di kawasan nasional IKN, dukungan penjaminan BUMN, serta rekomendasi kebijakan kemudahan berusaha dan investasi• Pengembangan <i>superhub</i> ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar, dengan <i>output</i>: rencana induk destinasi pariwisata prioritas regeneratif, desa wisata yang dikembangkan, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, fasilitasi kerja sama daerah mitra, serta promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif• Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan <i>output</i>: fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat• Pembangunan kesehatan, dengan <i>output</i>: pembinaan pengendalian dan layanan mitigasi penemuan kasus dalam upaya percepatan eliminasi malaria, serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>• Pembangunan pendidikan, dengan <i>output</i>: bantuan pendidikan afirmasi (Program Indonesia Pintar), revitalisasi satuan pendidikan di kabupaten/kota, sekolah unggul berbasis <i>higher order thinking skills</i> (HOTS) untuk jenjang pendidikan menengah, serta sarana dan gedung perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di wilayah sekitar• Penyelenggaraan kawasan lindung dan kehutanan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengawasan dan pengendalian kehutanan, serta penyuluhan dan sosialisasi pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air• Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan <i>output</i>: tata kelola lingkungan hidup, pengawasan lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan di wilayah IKN, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pelayanan persetujuan lingkungan di wilayah IKN, AMDAL kawasan, kajian risiko bencana IKN, pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat tangguh bencana serta kearifan lokal, serta operasional aktivitas penanggulangan bencana• Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i>: bantuan peralatan pasca panen di satuan permukiman dan pusat SKP pada kawasan transmigrasi di wilayah sekitar, basis data pangan, bibit kultur jaringan hortikultura unggulan, lahan pertanian berkelanjutan, pelayanan penyuluhan pertanian, serta pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan rendah karbon yang dikembangkan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

4.6 Provinsi Kalimantan Utara



A. Kawasan Pertumbuhan

- Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan**
1. Kota Tarakan
 2. Kabupaten Bulungan
- Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning**
3. Kabupaten Bulungan

B. Kawasan Komoditas Unggulan

- Kawasan Sentra Rumput Laut**
1. Kabupaten Nunukan

D. Kawasan Afiriasi

- Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas**
1. PKSN Nunukan dan PKSN Tou Lumbis dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Nunukan
 2. PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Malinau
 3. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Tana Tidung
- Kawasan Transmigrasi (KT)**
4. KT Salim Batu, Kabupaten Bulungan

E. Kawasan Konservasi

- Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*)**
1. Kabupaten Nunukan
 2. Kabupaten Malinau



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 (Rata-rata 2025-2029) | 6,2 | 227,1 | 0,7 | 4,33 – 5,07 | 0,263 | 0,56 | 55,77 | 77,77 | 3,90 – 3,94 |
| 2029 (2029) | 7,0 | 323,3 | 0,7 | 2,33 – 3,33 | 0,257 – 0,261 | 0,59 | 81,05 | 78,57 | 2,70 – 3,45 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|--|---|
| A1 A2 | Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan <ul style="list-style-type: none"> • A1: Kota Tarakan • A2: Kabupaten Bulungan | <p>Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM Regional, dan pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat • Penyediaan hunian publik vertikal sewa, dengan <i>output</i>: penyediaan bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI • Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dengan <i>output</i>: pengembangan sistem persampahan berbasis Masyarakat • Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan, dengan <i>output</i>: penyediaan bantuan prasarana sarana utilitas umum bidang perumahan • Pembangunan embung atau tampungan air skala kecil lainnya di Kota Tanjung Selor, dengan <i>output</i>: pembangunan embung atau tampungan air skala kecil lainnya • Pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan di Kota Tanjung Selor, dengan <i>output</i>: pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya • <i>On Farm</i> di Kota Tanjung Selor, dengan <i>output</i>: penyediaan bantuan sarana produksi pertanian di satuan permukiman dan pusat SKP • Pembangunan dan pengembangan bandara di Kota Tarakan, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Juwata • Penguatan kewirausahaan afirmatif di Kota Tarakan, dengan <i>output</i>: pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya • Pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi di Kota Tarakan, dengan <i>output</i>: pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang • Pengembangan kawasan konservasi mangrove dan bekantan termasuk pengembangan sarana dan prasarana serta dukungan promosi di Kota Tarakan |
| A3 | Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning: <ul style="list-style-type: none"> • A3: Kabupaten Bulungan | <p>Pengembangan Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi kawasan, dengan <i>output</i>: pembentukan <i>Eco Industrial Park</i> (KI berwawasan lingkungan), <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) bidang jasa dan kawasan, peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada bidang jasa dan kawasan, penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan <i>output</i>: pengembangan IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitasi perluasan akses pasar• Pengembangan pembangunan PLTA Kayan Terintegrasi, dengan <i>output</i>: pengawasan dan pengendalian konsumsi listrik per kapita, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, serta AI Data Kayan.• Pengembangan pembangunan PLTA Kayan terintegrasi• Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan <i>Industrial Park</i> Indonesia• Penambahan penerbangan umum dan perintis• Peningkatan/perbaikan jalan akses ke lokasi sumber daya dan kawasan• Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas |
| B1 | Kawasan Sentra Rumput Laut <ul style="list-style-type: none">• B1 Kabupaten Nunukan | Pengembangan Kawasan dan Sentra Rumput Laut, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri dan hilir rumput laut, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, dan promosi produk rumput laut skala internasional• Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut, dengan <i>output</i>: pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui <i>platform</i> digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani• Fasilitasi pembiayaan dan investasi• Penelitian dan pengembangan budidaya rumput spesies baru serta inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutrasetikal, pakan ternak) |
| D1 D2 D3 | Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas <ul style="list-style-type: none">• D1: PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat), Kabupaten Nunukan• D2: PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau• D3: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung | Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan layanan dasar di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 Harga, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)• Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (<i>backbone</i>), pengembangan bandar udara Long Apung tahap III, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Seluwing, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Yuvai Semaring, Kab. Nunukan, pengembangan bandar udara Nunukan, Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk• Penataan ruang dan penanggulangan bencana di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i>: dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN), penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, dan penguatan instrumen peringatan dini bencana• Penguatan tata kelola pemerintahan di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i>: bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------|---|--|
| D4 | Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> • D4: KT Salim Batu, Kabupaten Bulungan | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: penyediaan bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran |
| E1 E2 | Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>) <ul style="list-style-type: none"> • E1: Kabupaten Nunukan • E2: Kabupaten Malinau | Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di Wilayah Kalimantan Utara, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi • Konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i>: penyusunan rekomendasi perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau • Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan <i>output</i>: penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan |
| | Provinsi Kalimantan Utara | Penguatan pengembangan pangan nabati, hilirisasi komoditas pertanian strategis/unggulan serta modernisasi dan digitalisasi pertanian yang adaptif dan inklusif, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan <i>output</i>: pengembangan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan • Sertifikasi dan peredaran benih nabati, dengan <i>output</i>: penyaluran benih padi • Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan <i>output</i>: penyediaan bahan tanam komoditi perkebunan • Adopsi teknologi pertanian, dengan <i>output</i>: penerapan teknologi pertanian • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi) |
| | Provinsi Kalimantan Utara | Penguatan konektivitas (konektivitas jalan dan udara) dan pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah 3TP, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan <i>output</i>: pengembangan Jalan Koridor Logistik-Sekatak Buji-Malinau, Jalan Akses Simpul Transportasi Lingkar Pulau Sebatik, serta Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III • Penanganan konektivitas jalan/jembatan non lintas utama, dengan <i>output</i>: pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (<i>backbone</i>) |
| | Provinsi Kalimantan Utara | Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan, dengan <i>output</i>: pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Nunukan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T• Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk |
| | Provinsi Kalimantan Utara | <p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC dan malaria), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS• Penguatan intervensi sensitif <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat• Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit TB di Kota Tarakan• Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS di Kota Tarakan• Pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria di Kota Tarakan |
| | Provinsi Kalimantan Utara | <p>Penguatan kualitas pendidikan dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan <i>output</i>: pelatihan berbasis kompetensi di Provinsi Kalimantan Utara• Peningkatan kualitas infrastruktur sosial, dengan <i>output</i>: pengembangan gedung perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di Kabupaten Nunukan• Peserta didik penerima bantuan operasional satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan <i>output</i>: penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada siswa Raudlatul Athfal (RA)• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan |
| | Provinsi Kalimantan Utara | <p>Pengentasan kemiskinan terutama di daerah afirmasi 3T, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi melalui registrasi sosial ekonomi• Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan <i>output</i>: siswa SMTK/SMAK penerima PIP, gerakan pangan murah yang dilaksanakan• Penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif |
| | Provinsi Kalimantan Utara | <p>Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M• Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat• Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat |

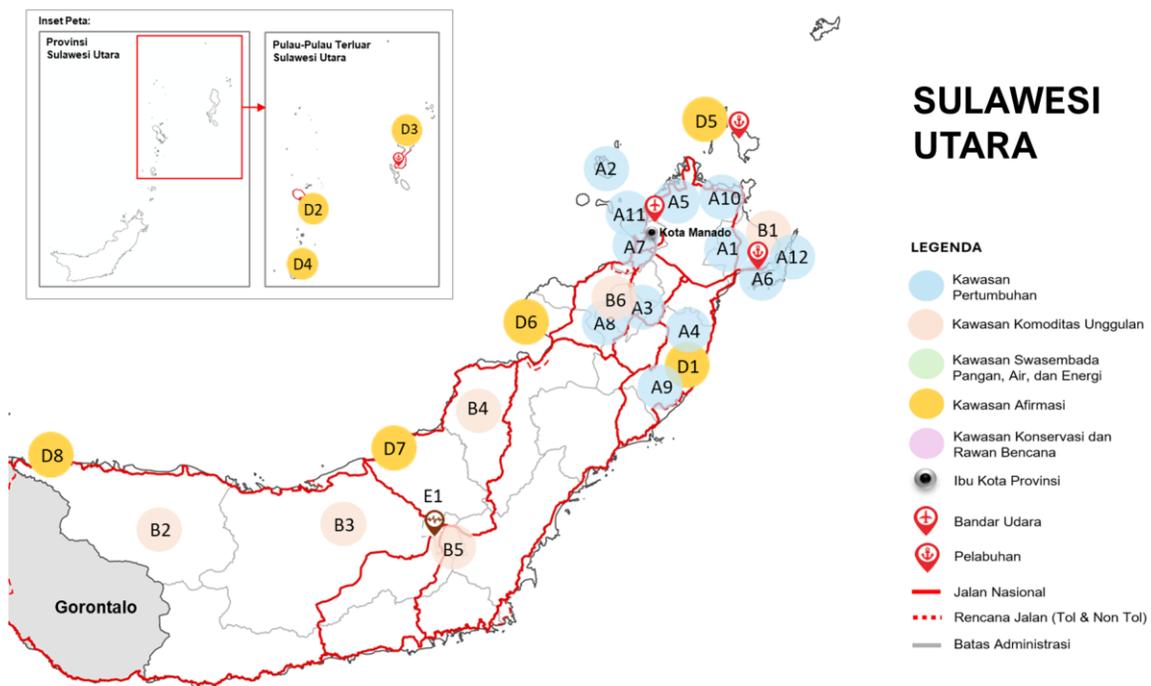


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

5. Wilayah Sulawesi

5.1 Provinsi Sulawesi Utara



A. Kawasan Pertumbuhan

Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang

1. Kota Bitung
2. Kota Manado
3. Kota Tomohon
4. Kab. Minahasa
5. Kab. Minahasa Utara

Wilayah Metropolitan Manado

6. Kota Bitung
7. Kota Manado
8. Kota Tomohon
9. Kab. Minahasa
10. Kab. Minahasa Utara

Kawasan Perkotaan Sedang

11. Kota Manado
12. Kota Bitung

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perikanan Tangkap Bitung

1. Kota Bitung

Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya

2. Kab. Bolaang Mongondow Utara
3. Kab. Bolaang Mongondow
4. Kab. Minahasa Selatan
5. Kota Kotamobagu
6. Kota Tomohon

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)

1. KPP MAPALUS, Kabupaten Minahasa
- ##### Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas
2. PKSN Tahuna dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Kepulauan Sangihe
 3. PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Kepulauan Talaud
 4. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
 5. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Minahasa Utara
 6. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Minahasa Selatan
 7. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Bolaang Mongondow
 8. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Bolaang Mongondow Utara

E. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara

1. Kota Kotamobagu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 7,4 (Rata-rata 2025-2029) | 74,4 | 0,8 | 5,59 – 6,19 | 0,339 – 0,352 | 0,52 | 54,90 | 78,71 | 5,01 – 5,56 |
| 2029 | 8,5 (2029) | 109,2 | 0,8 | 2,30 – 3,30 | 0,332 – 0,336 | 0,55 | 68,65 | 79,39 | 4,66 – 5,14 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------|---|---|
| A1 A2 A3 A4 A5 | <p>Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1: Kota Bitung • A2: Kota Manado • A3: Kota Tomohon • A4: Kabupaten Minahasa • Kabupaten Minahasa A5: Utara | <p>Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dengan implementasi <i>blue, green, circular economy</i>, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Likupang, dan preservasi jalan ruas Airmadidi-Bts. Kota Tondano • Pengembangan atraksi (alam, bahari, budaya, buatan), dengan <i>output</i>: pengadaan <i>event</i> skala daerah, nasional, dan internasional, penerapan rencana aksi destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan pengadaan <i>event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)</i> • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas penunjang, dengan <i>output</i>: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Terpusat Skala Kota dan Regional, serta pembangunan fasilitas Pelabuhan P. Bangka-Kahuku • Pengembangan Keterampilan SDM dan layanan pariwisata, dengan <i>output</i>: pelatihan keterampilan SDM pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi wisata, sertifikasi SDM, dan pengembangan Politeknik Negeri Manado • Pemasaran Pariwisata, dengan <i>output</i>: publikasi, promosi terpadu, pameran, kerja sama dengan maskapai, dan promosi wisata minat khusus • Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi, dengan <i>output</i>: fasilitas akses pembiayaan digital dan pasar modal berkualitas, rantai pasok industri, promosi investasi pariwisata, advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi, literasi bisnis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akses pembiayaan <i>startup</i>, transformasi digital industri, standarisasi usaha, koordinasi implementasi <i>blue, green, circular economy</i> pada usaha pariwisata, dan fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) • Peningkatan keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana, dengan <i>output</i>: pengendali banjir di sungai inlet Danau Tondano, penataan Kawasan Tondano, koordinasi dan penguatan tata kelola destinasi, serta pelaksanaan operasi SAR |
| A6 A7 A8 A9 | <p>Wilayah Metropolitan Manado</p> <ul style="list-style-type: none"> • A6: Kota Bitung • A7: Kota Manado • A8: Kota Tomohon | <p>Pembangunan Wilayah Metropolitan Manado yang berkelanjutan dalam Sistem Perkotaan Nasional, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan hijau yang berkelanjutan, dengan <i>output</i>: sistem angkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi <i>Transit Oriented Development (TOD)</i>, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 192 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|------------|---|---|
| A10 | <ul style="list-style-type: none">• A9: Kabupaten Minahasa• A10. Kabupaten Minahasa Utara | <p>pembangunan jalan perkotaan dan jalan lingkaran Manado <i>Outer Ring Road</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan ketangguhan bencana, pengelolaan risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, dengan <i>output</i>: penanganan banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan• Peningkatan layanan perkotaan dan kualitas lingkungan, dengan <i>output</i>: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan terpadu dengan PSU perumahan, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh, pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, pengembangan SPAM Regional Bimantara, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Sawangan, TPA Regional Mamitarang, dan PLTSa Kota Manado• Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola perkotaan, dengan <i>output</i>: pengembangan desa wisata, <i>pilot project</i> kerja sama antardaerah dan multipihak dalam pembiayaan pembangunan perkotaan, penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu, penguatan <i>smart city</i>, kelembagaan pengelola WM Manado, dan advokasi dalam penerapan PP Perkotaan• Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan <i>output</i>: <i>Metropolitan Statistical Area</i> |
| A11 A12 | <p>Kawasan Perkotaan Sedang</p> <ul style="list-style-type: none">• A11: Kota Manado• A12: Kota Bitung | <p>Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Manado dan Bitung, dengan <i>output</i>: penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota sedang, bantuan PSU perumahan, bantuan pembangunan rumah swadaya, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh, pengembangan sanitasi, pembangunan dan peningkatan SPAM, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota dan permukiman, sistem pengelolaan persampahan skala kota, peningkatan layanan konektivitas transportasi, penguatan instrumen peringatan dini bencana, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan</p> |
| B1 | <p>Kawasan Perikanan Tangkap Bitung</p> <ul style="list-style-type: none">• B1: Kota Bitung | <p>Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Bitung, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pelabuhan perikanan utama Bitung yang berwawasan lingkungan (<i>Eco Fishing Port</i>)• Pengembangan sarana penunjang logistik, prasarana perikanan tangkap, dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan <i>output</i>: sarana penyimpanan, gudang beku, sarana distribusi logistik, alat penangkapan ikan, dan kendaraan pemasaran ikan• Peningkatan daya saing sumber daya manusia penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan <i>output</i>: diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan• Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i>: pengembangan klaster ikan nila salin, klaster rumput laut berbasis kawasan, promosi usaha, temu |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------|--|--|
| | | bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan internasional, investasi strategis kelautan perikanan termasuk komoditas TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol) terpadu, pelatihan intensif <i>bootcamp</i> dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan |
| B2 B3 B4 B5 B6 | <p>Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B2: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara • B3: Kabupaten Bolaang Mongondow • B4: Kabupaten Minahasa Selatan • B5: Kota Kotamobagu • B6: Kota Tomohon | <p>Pengembangan industrialisasi berbasis komoditas unggulan pertanian yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow dan sekitarnya, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akses pasar komoditas pertanian dan turunannya, dengan <i>output</i>: sertifikasi dan pengembangan produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan, serta pengembangan koridor logistik Worotican-Poigar • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i>: rekomendasi perlindungan LP2B, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, <i>Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment</i>, dan pembangunan Bendungan Lolak • Inovasi dan adopsi teknologi pertanian, dengan <i>output</i>: percontohan pertanian modern, penerapan teknologi pertanian, pengembangan sistem pertanian terpadu di dataran tinggi, dan pengadaan asuransi pertanian • Implementasi praktik pertanian yang ramah iklim dan rendah karbon, dengan <i>output</i>: Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan optimasi lahan pertanian • Pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, dengan <i>output</i>: benih ternak unggul, sarana perbibitan ternak, prasarana perbibitan ternak, ternak ruminansia perah, ternak ruminansia potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dan layanan kesehatan hewan • Peningkatan ekspor produk pertanian melalui pengembangan koperasi, promosi, dan kerja sama, dengan <i>output</i>: pelatihan intensif <i>bootcamp</i> dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, Rekomendasi Kebijakan terkait harga patokan ekspor produk pertanian dan kehutanan, <i>prototyping</i>, <i>piloting project</i>, dan <i>business plan</i> industri suplemen kapsul vitamin a (<i>betacarotene</i>), vitamin e (<i>tocopherol</i>) alami berbasis minyak sawit, promosi dan temu bisnis pada pameran berskala internasional dalam rangka peningkatan ekspor produk industri makanan, kerja sama pengembangan ekspor produk primer, dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kelapa internasional |
| D1 | <p>Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: KPP MAPALUS, Kabupaten Minahasa | <p>Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas MAPALUS, Kabupaten Minahasa, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan dasar, dengan <i>output</i>: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat • Peningkatan aksesibilitas, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/<i>Lastmile</i> dan akses internet • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 194 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal pariwisata, dengan <i>output</i>: preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim• Peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan berbasis <i>digital</i>, dengan <i>output</i>: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD |
| D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 | <p>Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none">• D2: PKSN Talaud dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kendahe), Kabupaten Kepulauan Sangihe• D3: PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Damau, Kec. Pulutan, dan Kec. Nanusa), Kabupaten Kepulauan Talaud• D4: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Siau Barat, Kec. Siau Barat Utara) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro• D5: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Likupang Barat, Kec. Wori) Kabupaten Minahasa Utara• D6: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tatapan, Kec. Tenga, Kec. Sinonsayang) Kabupaten Minahasa Selatan• D7: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolaang Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow• D8: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolangitang Barat, dan Kec. Pinogaluman) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | <p>Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, dan pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga• Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: <i>replacement</i> fasilitas Pelabuhan Matutuang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, pengembangan kawasan pala, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| E1 | Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara <ul style="list-style-type: none">E1: Kota Kotamobagu | <p>Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pengelolaan multiancam bencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan <i>output</i>: peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan <i>intensity meter</i> dan <i>accelerograph</i> melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), perapatan stasiun Indonesia Continuously Operating Reference Station (Ina-CORS), Peta Geologi Gunung Api dan Kawasan Rawan Bencana GeologiPeningkatan keandalan infrastruktur berketahanan bencana seismik, dengan <i>output</i>: rekomendasi ketahanan bangunan dan penataan bangunan kawasan rawan bencanaRehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan <i>output</i>: layanan pemulihan sosial, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan di daerah pascabencana |
| | Provinsi Sulawesi Utara | <p>Penguatan layanan transportasi dan infrastruktur konektivitas integrasi ekonomi dan logistik, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan layanan konektivitas udara, dengan <i>output</i>: bandara di pulau kecil terluar Sangihe dan TalaudPeningkatan layanan konektivitas laut dan integrasi <i>hinterland</i> dengan simpul utama, dengan <i>output</i>: pelabuhan perikanan utama Bitung, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Miangas, serta pelabuhan lainnya di pulau terluar yang berwawasan lingkunganPenguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan <i>output</i>: Pembangunan Jalan Strategis-Jalan Manado Outer Ringroad III, Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, pengembangan pelabuhan, Replacement Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026), Replacement Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan |
| | Provinsi Sulawesi Utara | <p>Penyediaan akses rumah layak huni dan pemerataan sarana dan prasarana dasar, serta perluasan jangkauan pelayanan energi di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan akses rumah layak huni skala kota secara inklusif dan terpadu, serta penanganan permukiman kumuh, dengan <i>output</i>: pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, serta pemukiman kembali permukiman kumuh, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, penyediaan rumah khusus reguler, Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), bantuan pembangunan rumah swadaya, KPM yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah, bantuan PSU bidang perumahan, fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan, fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka, dan pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahanPemenuhan akses air minum aman terintegrasi hulu ke hilir, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM RegionalReformasi tata kelola persampahan, dengan <i>output</i>: teknologi <i>Waste-to-energy</i> (WtE) dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, <i>project</i> skema insentif, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dan bantuan PSU bidang perumahanPemenuhan akses sanitasi aman, dengan <i>output</i>: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dan Setempat Skala Kota, serta bantuan PSU bidang perumahanPerluasan akses dan interkoneksi layanan listrik terisolasi (<i>isolated grid</i>), dengan <i>output</i>: pembangunan pembangkit listrik, jaringan dan gardu |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 196 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|-------------------------|---|--|
| | | <p>induk, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T, dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemerataan jaringan telekomunikasi, internet cepat, dan adopsi digital ke seluruh wilayah serta adopsi <i>digital</i> di berbagai layanan publik, dengan <i>output</i>: penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas, OM BTS 4G /<i>Lastmile</i>, OM akses internet, layanan publik bidang telekomunikasi, fasilitasi literasi <i>digital</i>, portal layanan administrasi, pendampingan <i>smart city</i>, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian, perikanan, dan logistik, fasilitasi digital <i>technopreneur</i>, pengendalian PSE, akses internet tetap pitalebar untuk UMKM dan fasilitas umum, serta fasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama |
| Provinsi Sulawesi Utara | Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan <i>stunting</i> , dan akses kesehatan reproduksi perempuan, melalui: | <ul style="list-style-type: none">• Percepatan penurunan dan penguatan intervensi spesifik serta sensitif <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: ibu hamil dan balita yang mendapat <i>buffer stock</i>, kegiatan <i>surveilans</i> gizi dan KIA, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, pelatihan <i>stunting</i>, kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan <i>stunting</i>, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, dengan <i>output</i>: daerah yang fasilitasi terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, vaksin lainnya dan logistik penunjang vaksinasi, model kurikulum yang adaptif dan kontekstual, bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia produktif, dengan <i>output</i>: pembinaan lembaga dalam penerapan kesehatan kerja, tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitas terkait kesehatan kerja, dan sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia, dengan <i>output</i>: penguatan program dalam mendukung indikator usia produktif dan lansia, koordinasi pelayanan kelompok rentan, sosialisasi kesehatan lansia, sistem informasi kesehatan usia produktif dan lansia, dan fasilitasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan upaya kesehatan produktif dan lansia• Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan, dengan <i>output</i>: peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi (<i>kespro</i>) dan KB, Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi <i>kespro</i> dan gizi bagi remaja, fasilitasi, Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus, dan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan program kesehatan dan lingkungan yang responsif <i>gender</i> (<i>stunting</i>/AKI, perubahan iklim, <i>kespro</i>) |
| Provinsi Sulawesi Utara | Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: | <ul style="list-style-type: none">• Penuntasan TBC, dengan <i>output</i>: obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, purwarupa alat deteksi penyakit, masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, dan layanan informasi dan edukasi TBC• Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS dan layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria dan layanan informasi dan edukasi malaria• Pengendalian penyakit kusta, dengan <i>output</i>: layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia dan daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah• Pengendalian penyakit rabies, dengan <i>output</i>: kemitraan pencegahan dan pengendalian <i>zoonosis</i> |
| | Provinsi Sulawesi Utara | <p>Penguatan akses pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan ekosistem digital di daerah sulit akses, dengan <i>output</i>: implementasi layanan <i>telemedicine</i>, pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak, serta RS kapal• Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: pemenuhan ketersediaan 40 obat esensial dalam JKN, instalasi farmasi Kab/Kota yang menerapkan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, dan peningkatan ABGCI dalam peningkatan akses obat inovatif• Peningkatan kapasitas dan peran puskesmas, dengan <i>output</i>: koordinasi manajemen puskesmas dalam penguatan integrasi layanan primer, tenaga kesehatan yang diorientasi/dilatih manajemen puskesmas, tenaga kesehatan yang diorientasi/diberikan pelatihan (SOPHI), dan pelatihan terkait layanan primer dan rujukan• Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan <i>output</i>: revitalisasi posyandu, sarana puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan Posyandu (SOPHI), pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pemantauan wilayah dengan pendekatan keluarga• Pengembangan layanan unggulan dan rujukan kesehatan, dengan <i>output</i>: pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh Kabupaten/Kota, serta peningkatan RS Tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur• Peningkatan dan pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses dan afirmasi, dengan <i>output</i>: akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer, pendayagunaan dokter spesialis (SDM), dan peningkatan kompetensi melalui program <i>fellowship</i> |
| | Provinsi Sulawesi Utara | <p>Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap dunia usaha dan dunia industri, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sarana, prasarana, perluasan akses pendidikan menengah, tinggi dan vokasi sektor strategis, pengembangan bidang <i>Science, Technology, Engineering, Art, and Math</i> (STEAM), peningkatan daya saing riset dan inovasi di berbagai bidang, dengan <i>output</i>: revitalisasi sarana dan prasarana pada seluruh jenjang pendidikan termasuk sekolah, madrasah, Politeknik Pariwisata Manado dan Nusa Utara, bangunan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi industri yang ditingkatkan kapasitasnya, Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja, sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta program studi dengan inovasi pembelajaran digital dan berkualitas |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

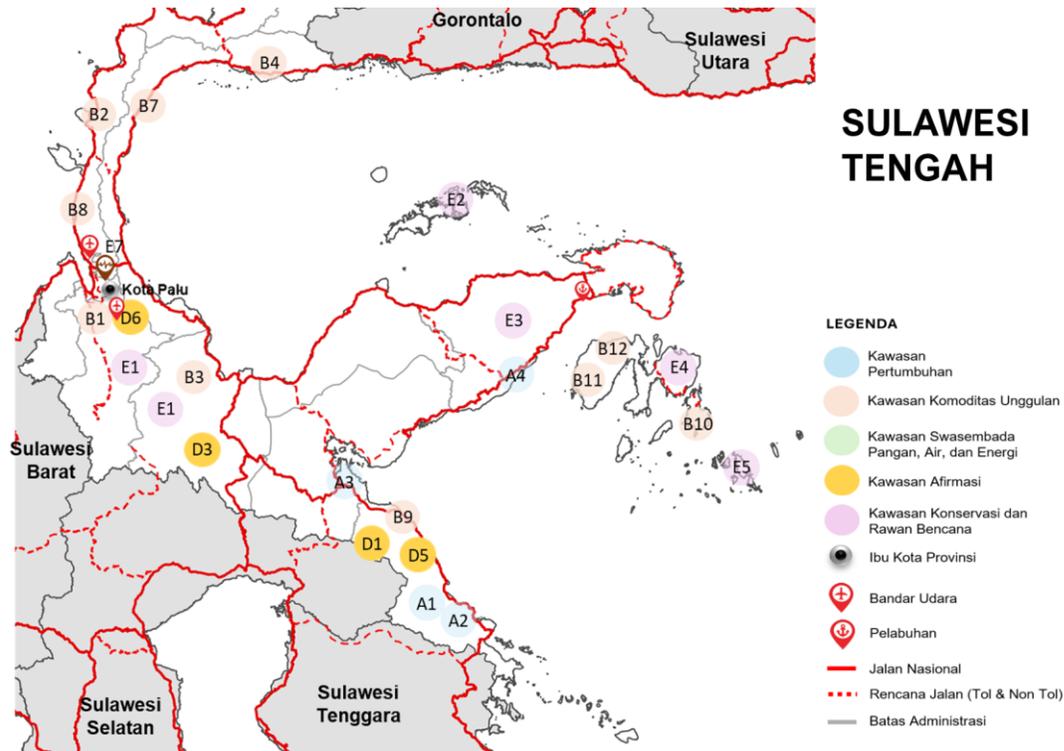
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan <i>output</i>: SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan, inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, pengembangan kurikulum dan metode pelatihan, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi, tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem <i>3 in 1</i> (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi), program kelas industri, fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> |
| | Provinsi Sulawesi Utara | <p>Pengentasan kemiskinan, peningkatan ketangguhan keluarga, dan integrasi bantuan sosial yang adaptif dengan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan JKN dan perlindungan sosial adaptif, dengan <i>output</i>: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, dan korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, dengan <i>output</i>: lembaga posyandu yang ditingkatkan kapasitasnya dalam implementasi 6 SPM, kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang sosial budaya dan kelembagaan di daerah lambat tumbuh, dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat |
| | Provinsi Sulawesi Utara | <p>Peningkatan ketangguhan bencana di perkotaan, pesisir pantai, dan pulau-pulau kecil terluar, dengan <i>output</i>: pembangunan pengaman pantai daerah pesisir dan pulau terluar, pengendalian banjir Wilayah Metropolitan Manado, peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan <i>intensity meter</i> dan <i>accelerograph</i> melalui IDRIP, penyusunan peta geologi gunung api dan kawasan rawan bencana geologi, dan dokumen harmonisasi RPerpres RDTR KPN</p> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

5.2 Provinsi Sulawesi Tengah



A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali (Bahodopi)

1. Kabupaten Morowali

Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara

2. Kabupaten Morowali
3. Kabupaten Morowali Utara

Kawasan Hilirisasi Gas Bumi

4. Kabupaten Banggai

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan

1. Kabupaten Sigi
2. Kabupaten Donggala
3. Kabupaten Poso
4. Kabupaten Parigi Moutong
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Tolitoli

Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)

7. Kabupaten Parigi Moutong
8. Kabupaten Donggala
9. Kabupaten Morowali
10. Kabupaten Banggai Laut
11. Kabupaten Banggai Kepulauan

Kawasan Sentra Hilirisasi Rumput Laut

12. Kabupaten Banggai Kepulauan

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)

1. KPP Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali
- #### Kecamatan Perbatasan Prioritas
2. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Buol
 3. Kecamatan Perbatasan, Kabupaten Toli-Toli

Kawasan Transmigrasi (KT)

4. KT Tampolore, Kabupaten Poso
5. KT Bungku, Kabupaten Morowali
6. KT Palolo, Kabupaten Sigi

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi:

Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah

1. Taman Nasional Lore Lindu, Kab. Sigi dan Kab. Poso
2. Taman Nasional Kepulauan Togean, Kab. Tojo Una-Una
3. Kabupaten Banggai
4. Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kabupaten Banggai Laut
6. Kabupaten Tolitoli

Kawasan Rawan Bencana:

- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
7. Kota Palu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 (Rata-rata 2025-2029) | 12,9 | 141,8 | 1,9 | 11,06 – 11,56 | 0,298 – 0,302 | 0,51 | 77,96 | 81,75 | 2,25 – 2,94 |
| 2029 (2029) | 14,2 | 258,7 | 2,4 | 6,20 – 7,20 | 0,280 – 0,284 | 0,55 | 85,77 | 82,60 | 2,09 – 2,72 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|---|---|
| A1 | Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali <ul style="list-style-type: none"> A1: Kabupaten Morowali | Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi), dengan <i>output</i> : bantuan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja serta bantuan pembangunan rumah swadaya, pemugaran permukiman kumuh, bantuan prasarana dan sarana umum bidang perumahan, Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahomakmur dan Keurea, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Sistem Pengelolaan Persampahan termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahodopi, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan |
| A2 A3 | Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara <ul style="list-style-type: none"> A2: Kabupaten Morowali A3: Kabupaten Morowali Utara | Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, melalui: <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Industri (KI) Indonesia Huabao <i>Industrial Park</i>, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri <i>Stardust</i> Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali Peningkatan investasi kawasan, dengan <i>output</i>: penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal, percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan dan penataan kawasan industri, serta pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku Pengembangan kemitraan usah Pelebaran Jalan Akses Bandar Udara Morowali a dan rantai pasok, dengan <i>output</i>: kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka, fasilitasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan, pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar di KI Prioritas, dan inkubasi bisnis untuk pembentukan wirausaha industri Penyediaan pendidikan dan pelatihan, dengan <i>output</i>: pembangunan gedung dan penyediaan peralatan pendidikan tinggi vokasi industri Pengembangan industri nikel sulfat, dengan <i>output</i>: penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel Pembangunan industri baterai, dengan <i>output</i>: fasilitasi industri dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor serta perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan <i>output</i>: fasilitasi industri dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri serta peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan restrukturisasi mesin/peralatan sentra IKM dan UPT logam, mesin, elektronika, dan alat angkut • Pengembangan industri <i>stainless steel</i>, dengan <i>output</i>: monitoring dan evaluasi perkembangan industri, fasilitasi peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri • Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional, dengan <i>output</i>: penurunan emisi Gas Rumah Kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau • Harmonisasi kebijakan industri nikel, dengan <i>output</i>: penguatan standarisasi untuk hilirisasi |
| A4 | Kawasan Hilirisasi Gas Bumi Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none"> • A4: Kabupaten Banggai | Pengembangan Kawasan Hilirisasi Gas Bumi di Kabupaten Banggai, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan dan layanan gas bumi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pembangunan infrastruktur regasifikasi gas bumi dan <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) terminal serta dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi • Transformasi kebijakan ekosistem investasi dan hilirisasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi serta penyusunan rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi |
| B1 B2 B3 B4 B5 B6 | Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none"> • B1: Kabupaten Sigi • B2: Kabupaten Donggala • B3: Kabupaten Poso • B4: Kabupaten Parigi Moutong • B5: Kabupaten Buol • B6: Kabupaten Tolitoli | Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan konektivitas jalan, dengan <i>output</i>: preservasi ruas jalan Tolai-Sausu di Kabupaten Parigi Moutong dan Tagolu-Tentena di Kabupaten Poso • Pemanfaatan sarana prasarana pendukung produksi pertanian, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana prasarana pascapanen pertanian serta alat dan mesin pertanian pra panen • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI), dan gangguan lainnya, dengan <i>output</i>: pelatihan kelompok tani dan pembentukan regu pengendalian OPT • Peningkatan mutu produk, dengan <i>output</i>: sertifikasi produk mutu pestisida dan pelatihan kelompok tani • Penguatan regenerasi petani, dengan <i>output</i>: pelatihan vokasi pertanian bagi aparaturnya, pelatihan pertanian bagi non aparaturnya, sertifikasi profesi bidang pertanian, serta pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Pelaksanaan bantuan langsung petani, dengan <i>output</i>: pemberian bantuan langsung petani untuk pembelian pupuk serta layanan validasi dan verifikasi pupuk • Teknologi pertanian, dengan <i>output</i>: pembangunan irigasi perpipaan pertanian, pembangunan irigasi perpompaan pertanian, pengembangan jaringan irigasi pertanian, serta pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim • Akses pembiayaan inklusif, dengan <i>output</i>: fasilitasi/pembinaan/pendampingan akses pembiayaan, penyediaan asuransi pertanian, serta fasilitasi dan pembinaan investasi |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 202 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|------------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi rantai nilai, dengan <i>output</i>: fasilitasi pembinaan dan pendampingan efisiensi rantai nilai • Pengembangan hilirisasi kelapa, dengan <i>output</i>: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan, sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, neraca komoditas kelapa dan produk turunannya, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, inkubasi koperasi, pengembangan industri pengolahan kelapa, restrukturisasi mesin/peralatan industri, dan pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro |
| B7 B8 B9 B10 B11 | Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) <ul style="list-style-type: none"> • B7: Kabupaten Parigi Moutong • B8: Kabupaten Donggala • B9: Kabupaten Morowali • B10: Kabupaten Banggai Laut • B11: Kabupaten Banggai Kepulauan | Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan konektivitas laut, dengan <i>output</i>: pengembangan Pelabuhan Bungin di Kabupaten Banggai Laut dan Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan • Penguatan konektivitas udara, dengan <i>output</i>: optimalisasi serta peningkatan layanan dan prasarana Bandara Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut • Pengembangan input produksi perikanan, dengan <i>output</i>: penyaluran benih ikan dan penyaluran calon induk unggul ikan • Pengembangan sarana produksi perikanan, dengan <i>output</i>: penyaluran sarana penangkapan dan budidaya ikan • Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan <i>output</i>: bantuan sarana pengembangan usaha nelayan, perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, dan pendanaan usaha nelayan |
| B12 | Kawasan Hilirisasi Rumput Laut Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none"> • B12: Kabupaten Banggai Kepulauan | Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan konektivitas laut, dengan <i>output</i>: Pengembangan Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan • Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan <i>output</i>: fasilitasi rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, penyaluran bibit rumput laut, dan penyaluran sarana budi daya rumput laut |
| D1 | Kawasan Perdesaan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> • D1: Kabupaten Morowali | Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Morowali, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan dasar, dengan <i>output</i>: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat • Peningkatan aksesibilitas, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/<i>Lastmile</i> dan akses internet • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal ekowisata, dengan <i>output</i>: preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim. • Peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan berbasis digital, dengan <i>output</i>: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 203 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------------|--|---|
| D2 D3 | Kecamatan Perbatasan Prioritas <ul style="list-style-type: none">D2: Kec. Paleleh Barat, Kec. Gadung, Kec. Bokat, Kec. Biau, dan Kec. Karamat, Kabupaten BuolD3: Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean, dan Kec. Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli | Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i> : pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas |
| D4 D5 D6 | Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none">D4: KT Tampolore, Kabupaten PosoD5: KT Bungku, Kabupaten MorowaliD6: KT Palolo, Kabupaten Sigi | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tampolore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, dan Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, melalui: <ul style="list-style-type: none">Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukimanPengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: bantuan sarana produksi pertanianRedistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasiPenataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran |
| E1 E2 E3 E4 E5 E6 | Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none">E1: Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten SigiE2: Taman Nasional Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-UnaE3: Kabupaten BanggaiE4: Kabupaten Banggai KepulauanE5: Kabupaten Banggai LautE6: Kabupaten Tolitoli | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional (TN) Lore Lindu serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di TN Togean, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tolitoli, melalui: <ul style="list-style-type: none">Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan <i>output</i>: penyusunan kebijakan penguatan pengelolaan areal dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), fasilitasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati untuk peningkatan efektivitas pengelolaan, serta pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasiPerencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut, dengan <i>output</i>: penyusunan kebijakan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di daerah serta pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang lautPemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: bantuan ekonomi produktif pesisir dan pulau-pulau kecil, dokumentasi data dan informasi potensi pesisir dan pulau-pulau kecil serta prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecilPenguatan tata kelola industri, wisata bahari, dan jasa kelautan berkelanjutan, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemetaan potensi biofarmakologi dan pemanfaatan air laut, penyusunan kebijakan berusaha jasa kelautan serta pengelolaan wisata bahariPemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove, pemulihan padang lamun / terumbu karang serta penyediaan prasarana rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecilPenguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 204 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| E7 | Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu <ul style="list-style-type: none">E7: Kota Palu | Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa Palukoro, Matano, dan Saluki di Kota Palu, melalui: <ul style="list-style-type: none">Pelayanan peringatan dini multiancamannya bencana dan peningkatan infrastruktur, dengan <i>output</i>: penguatan instrumen peringatan dini dan sistem informasi bidang kebencanaanPeningkatan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguatan tanggap bencana, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam, serta pembinaan penguatan <i>respond system</i> peringatan dini bencana berbasis masyarakatPeningkatan infrastruktur, dengan <i>output</i>: penataan bangunan dan <i>Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL)</i>Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismikPenerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami |
| | Provinsi Sulawesi Tengah | Pengembangan kawasan sentra garam, melalui: <ul style="list-style-type: none">Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan <i>output</i>: korporasi petambak garam yang dikembangkan, verifikasi penyaluran distribusi garam industri ke industri, pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik.Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan <i>output</i>: sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi.Pengembangan korporasi petambak garam. |
| | Provinsi Sulawesi Tengah | Penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan darat, melalui: <ul style="list-style-type: none">Penguatan infrastruktur konektivitas laut, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas Pelabuhan Bungin dan Pelabuhan SalakanPenguatan infrastruktur konektivitas jalan, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan koridor logistik dalam rangka pelaksanaan <i>Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL)</i> |
| | Provinsi Sulawesi Tengah | Pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman termasuk penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi/internet, dan layanan sanitasi, melalui: <ul style="list-style-type: none">Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi zPeningkatan layanan penyediaan air minum, dengan <i>output</i>: pembangunan/peningkatan/pelebaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten/Kota, penyediaan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan penyediaan SPAM berbasis masyarakatPerluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet, dengan <i>output</i>: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digitalPeningkatan penyediaan dan layanan listrik, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi, perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Dekarbonisasi penyediaan listrik, dengan <i>output</i>: fasilitasi dukungan sektor ketenagalistrikan dalam pencapaian target mitigasi Gas Rumah Kaca sektor energi sub sektor pembangkitan, penyusunan kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, pengembangan mitra perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, pengendalian pembangunan pembangkit listrik, pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, dengan <i>output</i>: penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Regional/Kota/Permukiman dan penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD) setempat skala kota/individu• Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan <i>output</i>: penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah spesifik, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R oleh pemerintah pusat, optimalisasi sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat• Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: penyediaan prasarana penanggulangan sampah di laut pesisir dan pulau-pulau kecil, bantuan pengembangan desa pesisir bersih, sosialisasi dampak pencemaran kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan fasilitasi penanganan sampah di wilayah pesisir• Peningkatan kapasitas dan pendanaan pendorong pengelolaan sampah, dengan <i>output</i>: penerapan tata kelola persampahan di daerah, penyediaan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dukungan untuk peningkatan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dorongan daerah dalam melakukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)• Perubahan perilaku untuk pemilahan sampah, dengan <i>output</i>: penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan di satuan pendidikan formal, fasilitasi dan pembinaan implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
| | Provinsi Sulawesi Tengah | <p>Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tata Kelola registrasi sosial ekonomi, dengan <i>output</i>: koordinasi strategis penerapan Registrasi Sosial Ekonomi, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk), serta pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial• Pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan <i>output</i>: penerapan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan• Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, dengan <i>output</i>: penyediaan bantuan iuran PBI JKN, bantuan sosial bersyarat bagi keluarga, KIP Kuliah, cadangan pangan pemerintah, dan elpiji 3 kg yang tepat sasaran |
| | Provinsi Sulawesi Tengah | <p>Eliminasi penyakit endemik <i>Schistosomiasis</i> di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso serta peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian penyakit <i>Schistosomiasis</i>, dengan <i>output</i>: penyediaan layanan pemantauan untuk pencegahan dan pengendalian <i>Schistosomiasis</i>, pembinaan program pengendalian <i>Schistosomiasis</i>, serta penyediaan obat dan perbekalan kesehatan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 206 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyediaan makanan tambahan dari <i>Buffer Stock</i> untuk balita, pelaksanaan pemantauan gizi dan KIA, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan/ non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, fasilitasi dan pembinaan kepada daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, penerapan konvergensi Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> di daerah, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir• Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penyediaan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar serta penguatan deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak |
| | Provinsi Sulawesi Tengah | <p>Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Rumah Sakit lengkap, dengan <i>output</i>: Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi• Peningkatan kapasitas puskesmas dan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan serta pelayanan kesehatan di daerah sulit akses, dengan <i>output</i>: pengukuran dan pelaporan mutu puskesmas, penyediaan sarana, pemenuhan alat kesehatan, peningkatan ketrampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu, revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan, dan penyediaan RS Kapal di wilayah kepulauan• Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan, dengan <i>output</i>: akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, dan pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah• Penguatan tata kelola dan kepesertaan JKN, dengan <i>output</i>: koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, pemberian bantuan iuran PBI JKN, dan pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan Bukan Pekerja (BP) |
| | Provinsi Sulawesi Tengah | <p>Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pengembangan bidang STEAM, penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, serta melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan <i>output</i>: pengembangan SMK menjadi pusat keunggulan, dukungan terhadap SMK dalam mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan, pendampingan peningkatan mutu SMK, dukungan terhadap SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik (<i>Teaching Factory</i>), dukungan terhadap SDM dalam mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri dan program kelas industri, fasilitasi SMK agar <i>Link and Match</i> dengan industri, pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan, <i>Upskilling dan Reskilling</i> berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, dan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang Pendidikan• Peningkatan kontribusi IPTEK dan Inovasi, dengan <i>output</i>: pemanfaatan riset bidang pangan, energi, kelautan, manufaktur, bidang kesehatan, dan lain-lain |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 207 -

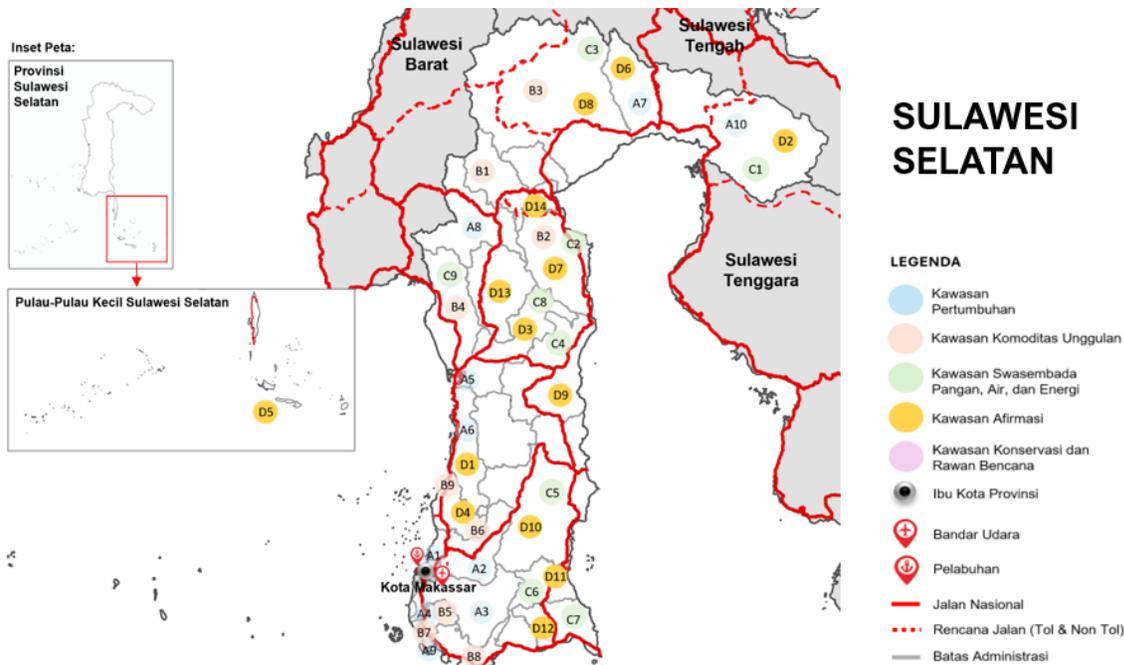
| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|--------------------------|---|---|
| Provinsi Sulawesi Tengah | Pelestarian dan pemajuan ekosistem kebudayaan, melalui: | <ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat, dengan <i>output</i>: pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan• Perlindungan hutan adat dan tanah ulayat, dengan <i>output</i>: penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan bagi satuan pendidikan formal, penyediaan data inventarisasi tanah ulayat, dan pendaftaran tanah ulayat• Penguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

5.3 Provinsi Sulawesi Selatan



A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya

1. Kota Makassar
2. Kabupaten Maros
3. Kabupaten Gowa
4. Kabupaten Takalar
5. Kota Pare-Pare
6. Kabupaten Barru

Kawasan Perkotaan Kecil

7. Kabupaten Luwu Timur
8. Kabupaten Tana Toraja

Kawasan Industri Takalar

9. Kabupaten Takalar

Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako

10. Kabupaten Luwu Timur

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi

1. Kabupaten Toraja Utara
2. Kabupaten Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Pinrang

Kawasan Perikanan Budidaya dan Sentra Rumput Laut

5. Kabupaten Takalar
6. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Kawasan Sentra Garam

7. Kabupaten Takalar
8. Kabupaten Jeneponto
9. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya

1. Kabupaten Luwu Timur
2. Kabupaten Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Wajo
5. Kabupaten Bone
6. Kabupaten Sinjai
7. Kabupaten Bulukumba
8. Kabupaten Sidenreng Rappang
9. Kabupaten Pinrang

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)

1. KPP Agrowisata Gurilla, Kabupaten Barru

Kawasan Transmigrasi (KT)

2. KT Mahalona, Kabupaten Luwu Timur
3. KT Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang

Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan

4. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5. Kabupaten Kepulauan Selayar

Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya

6. Kabupaten Luwu Timur
7. Kabupaten Luwu
8. Kabupaten Luwu Utara
9. Kabupaten Wajo
10. Kabupaten Bone
11. Kabupaten Sinjai
12. Kabupaten Bulukumba
13. Kabupaten Enrekang
14. Kota Palopo



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 209 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 7,2 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 80,1 | 3,2 | 7,30 – 7,89 | 0,371 – 0,376 | 0,53 | 37,00 | 77,60 | 3,80 – 4,10 |
| 2029 | 8,2 <small>(2029)</small> | 117,1 | 3,2 | 3,49 – 4,49 | 0,320 – 0,324 | 0,56 | 52,05 | 78,44 | 3,18 – 3,83 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----------------------------------|--|--|
| A1 A2 A3 A4 A5 A6 | <p>Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1: Kota Makassar • A2: Kabupaten Maros • A3: Kabupaten Gowa • A4: Kabupaten Takalar • A5: Kota Pare-Pare • A6: Kabupaten Barru | <p>Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan sekitarnya yang berkelanjutan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar, dengan <i>output</i>: bantuan PSU bidang perumahan, bantuan pembangunan rumah susun, pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, pengembangan SPAM Regional Mamminasata dan Ajatappareng, penataan kawasan strategis dan penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan terpadu di Wilayah Metropolitan Makassar, pemenuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, infrastruktur jaringan transmisi, dan infrastruktur distribusi tenaga listrik, PLTSa Kota Makassar, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan, dengan <i>output</i>: penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, <i>Digital Talent Scholarship</i>, pengembangan UIN Alauddin Makassar, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, Pembangunan Gedung PTK Islam Negeri Melalui SBSN dan PBK Provinsi Sulawesi Selatan, sarana dan prasarana bidang Pendidikan Poltekpar Makassar • Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD, dengan <i>output</i>: penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare (KA Makassar-Pare Pare), Jalan Tol Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar, pembangunan jalan perkotaan, pengembangan angkutan umum massal perkotaan di Kota Makassar, pembangunan terminal penumpang Tipe A Mandai, penanganan kinerja lalu lintas perkotaan (Mamminasata <i>Bypass</i>), kewajiban pembayaran atas ketersediaan layanan (dukungan/pendampingan KPBU), pembangunan jalan perkotaan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan • Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas dan terpadu, serta pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola WM Makassar, dengan <i>output</i>: daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan, daerah yang dikuatkan tata Kelola <i>Smart City</i>-nya • Pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga, khususnya Stadion Sudiang, dengan <i>output</i>: Peningkatan prestasi, sarana, dan prasarana olahraga melalui pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 210 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Kerja sama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antardaerah melalui pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (<i>transboundary management</i>) dan lintas pemerintahan (<i>fragmented government</i>) serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan <i>output</i>: pertemuan teknis di daerah dengan pemangku kepentingan dan kesepakatan pemasaran produk perikanan di dalam negeri, <i>export center</i> Makassar, serta pengawasan, kerja sama, penguatan dan koordinasi kegiatan perdagangan lingkup regional, nasional dan internasional sesuai dengan komoditas unggulan• Peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, dengan <i>output</i>: Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan• Peningkatan cadangan dan produktivitas energi, dengan <i>output</i>: <i>North Hub Development Project Selat Makassar</i>• Penguatan industri transportasi laut, terutama di Kota Makassar, dengan <i>output</i>: pengembangan industri galangan kapal sebagai industri berteknologi tinggi, penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan, dan pengembangan mutu dan daya saing industri perkapalan• Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Kota Makassar, dengan <i>output</i>: sarana pendukung penyelenggara konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, <i>Oceans for Prosperity Project – LAUTRA</i>• Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan <i>output</i>: <i>Metropolitan Statistical Area</i> |
| A7 A8 | Kawasan Perkotaan Kecil • A7: Kabupaten Luwu Timur • A8: Kabupaten Tana Toraja | Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, dengan <i>output</i> : penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu di Kota kecil Kabupaten Tana Toraja (Toraja), penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, bantuan peralatan/sarana, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, Pembangunan SPAM kabupaten/kota, bantuan PSU bidang perumahan, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota, dan pengembangan kawasan permukiman pendukung Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako di Luwu Timur |
| A9 | Kawasan Industri Takalar • A9: Kabupaten Takalar | Pengembangan Kawasan Industri Takalar, melalui : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, dengan <i>output</i>: pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi• Pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/limbah), dengan <i>output</i>: fasilitasi pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri Takalar• Peningkatan investasi kawasan, dengan <i>output</i>: percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi di kawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri• Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan <i>output</i>: pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar• Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM, dengan <i>output</i>: mahasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa dan lulusan program DI Kerja sama Industri – Kota Makassar |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 211 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----------------------|--|--|
| A10 | <p>Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako</p> <ul style="list-style-type: none"> • A10: Kabupaten Luwu Timur | <p>Pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di smelter terintegrasi tambang Sorowako, Luwu Timur, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dengan <i>output</i>: rekomendasi keprospekan sumber daya mineral, kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, dan tingkat implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada subsektor pertambangan mineral, serta hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri • Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen <i>Net Zero Emissions (NZE)</i> nasional, dengan <i>output</i>: penurunan emisi Gas Rumah Kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau, dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi dan kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel • Hilirisasi industri berbasis mineral penting, terutama nikel, dengan <i>output</i>: hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri, industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi termonitor dan terevaluasi, fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi smelter nikel |
| B1 B2 B3 B4 | <p>Kawasan Perkebunan Kopi dan Kakao</p> <ul style="list-style-type: none"> • B1: Kabupaten Toraja Utara • B2: Kabupaten Luwu • B3: Kabupaten Luwu Utara • B4: Kabupaten Pinrang | <p>Pengembangan sentra perkebunan, terutama kopi di Toraja Utara dan kakao di Luwu, Luwu Utara, dan Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, dengan <i>output</i>: kawasan kopi dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional, kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk • Implementasi pertanian rendah karbon, dengan <i>output</i>: desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan <i>output</i>: fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk |
| B5 B6 | <p>Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • B5: Kabupaten Takalar • B6: Kabupaten Pangkajene Kepulauan | <p>Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut Kabupaten Takalar dan Pangkajene Kepulauan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut • Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut, dengan <i>output</i>: peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan, infrastruktur kawasan budi daya rumput laut - '<i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i>' • Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan <i>output</i>: fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas petani, pengembangan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut • Pengembangan input produksi rumput laut • Pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----|--------------------------------------|---|
| B7 | Kawasan Sentra Garam | Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui: |
| B8 | • B7: Kabupaten Takalar | • Pengembangan korporasi petambak garam, dengan <i>output</i> : bantuan sarana pengembangan usaha, korporasi petambak garam, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) |
| B9 | • B8: Kabupaten Jeneponto | • Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan <i>output</i> : korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam, dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri |
| | • B9: Kabupaten Pangkajene Kepulauan | • Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan <i>output</i> : sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi |
| C1 | Kawasan Lumbang | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di |
| C2 | Pangan Teluk Bone dan sekitarnya | Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui: |
| C3 | • C1: Kabupaten Luwu Timur | • Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana, termasuk Pembangunan Bendungan Rongkong, dengan <i>output</i> : pengembangan lahan pertanian produktif, alat dan mesin pertanian, pembangunan DI Gilireng, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Boya, Daerah Irigasi Saddang yang direhabilitasi, pengembangan jaringan irigasi, pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi dan kerja sama di bidang pertanian |
| C4 | • C2: Kabupaten Luwu | • Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan <i>output</i> : bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi |
| C5 | • C3: Kabupaten Luwu Utara | • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i> : rekomendasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian |
| C6 | • C4: Kabupaten Wajo | • Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya, dengan <i>output</i> : produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampel <i>Surveillance</i> Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang |
| C7 | • C5: Kabupaten Bone | • Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, dengan <i>output</i> : pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur |
| C8 | • C6: Kabupaten Sinjai | • Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut, terutama di Kabupaten Luwu, Bone, Wajo, Pinrang dan Luwu Timur |
| C9 | • C7: Kabupaten Bulukumba | • Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan <i>output</i> : diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan |
| | • C8: Kabupaten Sidenreng Rappang | |
| | • C9: Kabupaten Pinrang | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 213 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----------|---|--|
| | | <p>petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i>: pengembangan klaster ikan nila salin dan patin, klaster rumput laut berbasis kawasan, promosi usaha, temu bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan internasional, pelatihan intensif <i>bootcamp</i> dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan |
| D1 | <p>Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)</p> <ul style="list-style-type: none">• D1: KPP Agrowisata Gurilla, Kabupaten Barru | <p>Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Layanan Dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan rincian <i>output</i>: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan rincian <i>output</i>: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, dan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, pendampingan desa, dan pengembangan BUMDesa• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya), dengan <i>output</i>: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di dilayah destinasi II yang dikembangkan, pengembangan dan penguatan tata kelola desa wisata• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa, dengan <i>output</i>: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD• Peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan perdesaan, dengan <i>output</i>: penguatan desa tanggap bencana dan peningkatan resiliensi adat istiadat, serta budaya nilai lokal |
| D2 D3 | <p>Kawasan Transmigrasi (KT)</p> <ul style="list-style-type: none">• D2: KT Mahalona, Kawasan Luwu Timur• D3: KT Pitu Riase, Kawasan Sidenreng Rappang | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kab. Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kab. Sidenreng Rappang, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman• Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: bantuan sarana produksi pertanian• Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi• Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran |
| D4 D5 | <p>Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan</p> <ul style="list-style-type: none">• D4: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | <p>Pemenuhan infrastruktur dan Pelayanan dasar di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan (Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kepulauan Selayar), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan SPAM, sistem pengelolaan air limbah, dan sanitasi, dengan <i>output</i>: pemenuhan akses air minum aman dengan pengembangan spam terintegrasi hulu ke hilir, sistem pengelolaan air limbah domestik |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 214 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D5: Kabupaten Kepulauan Selayar | <p>terpusat skala Kota/Kab dan permukiman, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, dan pemenuhan akses sanitasi aman</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik hingga pedesaan serta penguatan implementasi transisi energi, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, peningkatan penyediaan dan layanan listrik bagi rumah tangga belum berlistrik serta penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal 24 jam/hari, PLTS • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir, dengan <i>output</i>: fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, pemantauan data dan informasi sampah laut, peningkatan pemahaman masyarakat terkait persampahan, pemenuhan dan pembinaan bank sampah, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) • Penguatan konektivitas laut, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, pembangunan kapal patroli, peningkatan fasilitas Pelabuhan Laut Kalatua dan Jinato • Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan <i>output</i>: sarana pendukung penyelenggara konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, <i>Oceans for Prosperity Project - LAUTRA</i> • Penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>: terpenuhinya sarana dan prasarana bidang kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> |
| D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 | <p>Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • D6: Kabupaten Luwu Timur • D7: Kabupaten Luwu • D8: Kabupaten Luwu Utara • D9: Kabupaten Wajo • D10: Kabupaten Bone • D11: Kabupaten Sinjai • D12: Kabupaten Bulukumba • D13: Kabupaten Enrekang • D14: Kota Palopo | <p>Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya , melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dengan <i>output</i>: terpenuhinya akses dan pelayanan terkait energi, air minum, sanitasi, persampahan dan penyediaan perumahan • Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, dengan <i>output</i>: jalan dan jembatan koridor logistik, pembangunan dan peningkatan jalan, <i>replacement</i> fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai, peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia, pengembangan Pelabuhan Sinjai, pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone • Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, dan perluasan pemanfaatan <i>biofuel</i> (terutama di Kabupaten Bone), dengan <i>output</i>: pengembangan bioetanol, PLTMH, PLTS, PLTM, volume <i>biofuel</i> untuk domestik, sertifikasi kompetensi tenaga listrik sektor ketenagalistrikan dan EBTKE |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan bandara terpadu, dengan <i>output</i>: bandar udara bandar udara perairan, angkutan udara perintis penumpang, termasuk di Seko dan Sorowako, serta Tanatoraja • Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan <i>output</i>: layanan angkutan ternak, pembangunan kapal patroli, serta layanan angkutan penyeberangan perintis menuju Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara • Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta Peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan <i>output</i>: pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, Pembangunan dan preservasi jalan nasional di jalan lintas provinsi ruas Koppe-Taccipi-Bts. Kota Watampone dan Ujung Lamuru-Koppe; dan ruas Bts. Kota Jeneponto-Bts. Kota Bantaeng, peningkatan dan preservasi jalan daerah, pembangunan <i>flyover/underpass/terowongan</i>, dan pengembangan terminal Tipe A |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 215 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----|---------------------------|--|
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan Penyaluran Subsidi/ Bantuan Pembiayaan Perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, penyediaan rumah khusus reguler dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/pekerja, fasilitasi subsidi dan bantuan uang muka, pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan• Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, dengan <i>output</i>: bantuan PSU bidang perumahan• Penanganan permukiman kumuh, dengan <i>output</i>: pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh• Pemenuhan kebutuhan air baku, dengan <i>output</i>: pembangunan bendungan multiguna (Bendungan Jenelata), pembangunan embung, pembangunan prasarana air baku• Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi, dengan <i>output</i>: pemenuhan akses air minum aman, pengembangan SPAM terintegrasi (salah satunya optimalisasi SPAM Curio), sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan permukiman, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, pemenuhan sanitasi aman• Penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dengan <i>output</i>: fasilitasi penanganan sampah, pemantauan data dan informasi sampah, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola sampah dan masyarakat, pemenuhan bank sampah, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan pembinaan teknis• Peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga Listrik, jaringan transmisi, gardu induk, rekomendasi kebijakan transisi energi global, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari• Dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru terbarukan, dengan <i>output</i>: pembangunan PLTMH dan PLTS, rekomendasi pengendalian pembangkit, pengendalian Pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk• Pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dengan <i>output</i>: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, pengembangan SDM Digital dan digitalisasi masyarakat |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan <i>output</i>: Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi, Peningkatan RS Tipe D menjadi tipe C di Kab. Toraja Utara, penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 216 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----|---------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan, industri obat, vaksin, dan alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik• Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, dengan <i>output</i>: penugasan khusus, pelatihan dan bantuan pendidikan SDM kesehatan• Peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, dengan <i>output</i>: transformasi digital (TK), implementasi layanan <i>telemedicine</i>, dan lembaga yang menggunakan pendekatan biomedis dan genom kesehatan |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan kematian ibu dan anak melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penuntasan TBC, dengan <i>output</i>: Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, purwarupa alat deteksi penyakit, masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, dan layanan informasi dan edukasi TBC• Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: Koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS dan layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular• Pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria dan layanan informasi dan edukasi malaria• Pengendalian penyakit kusta, dengan <i>output</i>: layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia dan daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah• Pengendalian penyakit rabies, dengan <i>output</i>: kemitraan pencegahan dan pengendalian <i>zoonosis</i>• Penguatan intervensi spesifik <i>stunting</i>, terutama di Jeneponto, Tana Toraja dan Takalar, dengan <i>output</i>: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>buffer stock</i>, tenaga kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, layanan imunisasi pendukung pencapaian <i>stunting</i>, kegiatan surveilans gizi dan KIA, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan <i>stunting</i>• Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan, dengan <i>output</i>: Peningkatan Pelayanan Kespro dan KB, Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja, dan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Lingkungan yang Responsif Gender (<i>stunting</i>/AKI, perubahan iklim, kespro) |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan <i>output</i>: jaringan irigasi yang direhabilitasi/dibangun, Rehabilitasi Daerah Irigasi Kampili Kabupaten Gowa dan Takalar, Rehabilitasi Daerah Irigasi Kelara Karalloe Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, pembangunan bendungan, sertifikat benih padi, alat dan mesin pertanian, lahan pertanian pangan produktif, dan pemanfaatan teknologi• Pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, dengan <i>output</i>: pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta sarana keamanan dan mutu pangan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 217 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----|---------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan <i>output</i>: pangan yang terdistribusi, sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan, Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional, dan rekomendasi kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan• Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan <i>output</i>: alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan; pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>, pengembangan pelabuhan perikanan UPTD provinsi, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengembangan sarana pengolahan• Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan <i>output</i>: Sarana Penyimpanan Produk KP; Sarana distribusi logistik produk KP; Gudang Beku dan Kelengkapannya;• Pengembangan pangan akuatik, dengan <i>output</i>: pengembangan klaster ikan nila salin, patin, dan pengembangan komoditas udang, dan revitalisasi tambak udang• Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan <i>output</i> diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan• Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i> pengembangan klaster ikan nila salin dan patin, klaster rumput laut berbasis kawasan, promosi usaha, temu bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan internasional, pelatihan intensif <i>bootcamp</i> dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan• Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan <i>output</i>: bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi, dengan <i>output</i>: revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang direvitalisasi maupun dibangun• Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan <i>output</i>: SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan dan SMK yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan dan PBK Provinsi Sulawesi Selatan• Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan <i>output</i>: SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, pelatihan pertanian bagi aparaturnya dan non aparaturnya, sertifikasi profesi bidang pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan, inovasi model pembelajaran vokasi |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 218 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----|---------------------------|--|
| | | <p>mengacu pada dunia kerja, pengembangan kurikulum dan metode pelatihan, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi, tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem <i>3 in 1</i> (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi), program kelas industri, fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Pemagangan industri di dalam dan luar negeri, dengan <i>output</i>: peserta yang magang di perusahaan di luar negeri, peserta yang magang di perusahaan dalam negeri, dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bersama industri |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dengan <i>output</i>: koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan <i>data center</i>, penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD, pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dan penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data• Penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan <i>output</i>: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, bantuan logistik korban bencana alam dan korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan• Pelaksanaan bantuan energi dan pangan, dengan <i>output</i>: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Penguatan ekosistem budaya berbasis <i>urban heritage</i>, <i>rural heritage</i>, pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (<i>Geopark Maros Pangkep</i>), dan revitalisasi budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi (Kabupaten Bulukumba), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional, dengan <i>output</i>: pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional (salah satunya Festival <i>Geopark Maros Pangkep</i>) dan peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan• Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan, dengan <i>output</i>: cagar budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan dan desa pemajuan kebudayaan• Peningkatan Tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan <i>output</i>: data dan informasi warisan budaya• Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis <i>urban heritage</i>, dengan <i>output</i>: koleksi, cagar budaya nasional, dan benda budaya yang dikelola, pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan pada kawasan karst, pengembangan budaya bahari dengan pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian risiko bencana di daerah rawan bencana, dengan <i>output</i>: Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pengembangan ruang terbuka hijau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana• Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana, dengan <i>output</i>: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana• Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, dengan <i>output</i>: kawasan konservasi perairan yang operasional, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 219 -

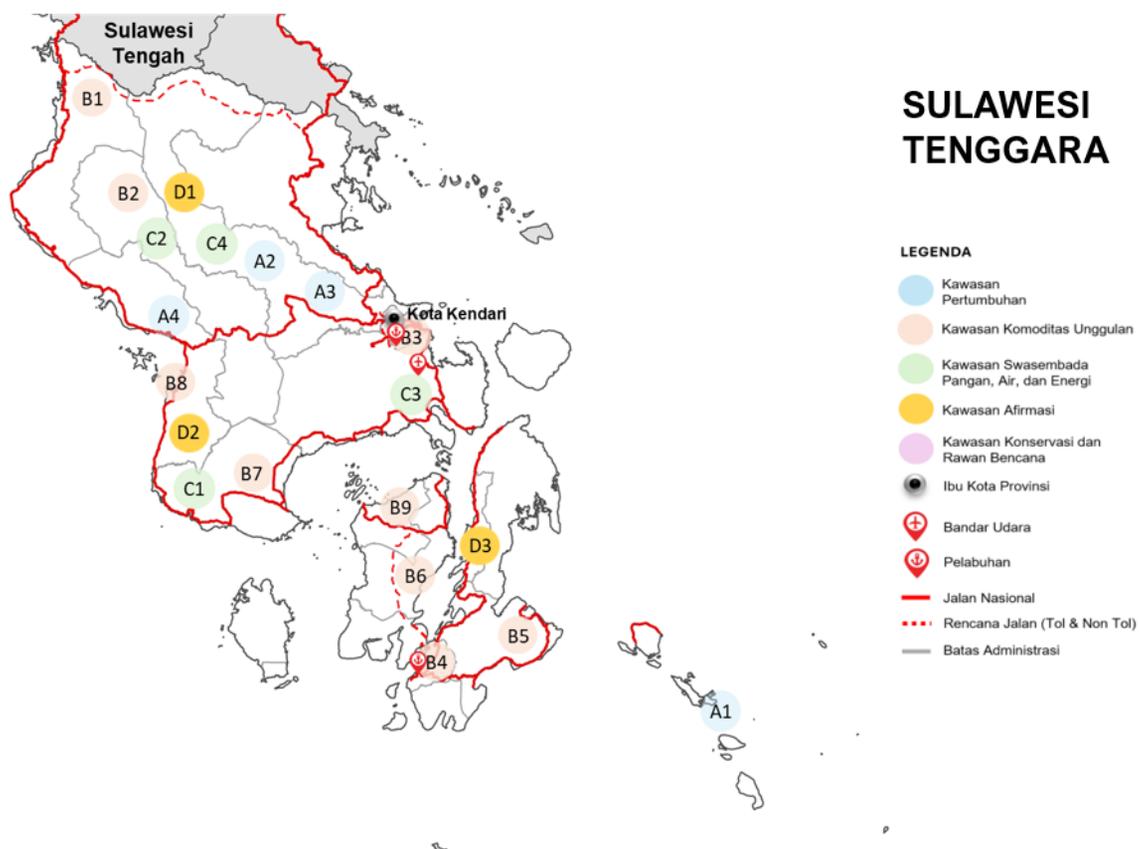
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Intervensi |
|----|---------------------------|---|
| | | <p>pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata</p> <ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi hutan dan lahan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan, dan rehabilitasi Daerah Tampungan Air (DTA) danau secara vegetatif• Pengendalian daya rusak air, dengan <i>output</i>: pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pesisir Pantai• Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan <i>output</i>: Sarana SAR <i>rafting boat</i>, prasarana <i>search and rescue</i> (SAR), pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan industri transportasi laut, dengan <i>output</i>: pengembangan industri galangan kapal sebagai industri berteknologi tinggi, penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan, dan pengembangan mutu dan daya saing industri perkapalan• Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut, dengan <i>output</i>: pengembangan garam industri terintegrasi, penguatan sarana dan prasarana industri garam, dan pengembangan produk olahan laut dan bioprospeksi sumber daya kelautan• Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut untuk peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku dalam rangka pengembangan hilirisasi rumput laut, dengan <i>output</i>: Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i>• Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan <i>output</i>: penguatan rantai pasok industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur pengisian daya, pengembangan ekosistem EV, dan penerapan ekonomi sirkular pada industri baterai• Tata kelola dan pengembangan industri dan ketersediaan bahan baku industri nikel, tembaga, bauksit, dengan <i>output</i>: kebijakan dan inisiatif terkait penguatan industri logam, hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral, peningkatan daya saing dan produktivitas industri, serta pengawasan dan fasilitasi standar produk• Pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya, dengan <i>output</i>: peningkatan kualitas bahan baku, pengembangan teknologi dan pembibitan tanaman unggul, fasilitasi investasi hilirisasi industri, serta penguatan kapasitas petani• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri <i>medium-high technology</i>, dengan <i>output</i>: verifikasi kemampuan industri kosmetik, penguatan rantai pasok sektor kimia, farmasi, dan tekstil, pengembangan bahan baku obat, penyederhanaan perizinan impor, penyempurnaan kebijakan impor untuk mendukung ketersediaan bahan baku, fasilitasi industri <i>mold and dies</i> |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | <p>Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, melalui</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif• Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik• Penguatan ekosistem fesyen dan kriya• Penguatan ekosistem aplikasi dan gim• Penguatan ekosistem kuliner |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

5.4 Provinsi Sulawesi Tenggara



A. Kawasan Pertumbuhan

Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi

1. Kabupaten Wakatobi

Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe

2. Kabupaten Konawe

Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang

3. Kabupaten Konawe
4. Kabupaten Kolaka

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan Kakao

1. Kabupaten Kolaka Utara
2. Kabupaten Kolaka Timur

Kawasan Perikanan Tangkap

3. Kota Kendari
4. Kota Bau-Bau
5. Kabupaten Buton
6. Kabupaten Muna
7. Kabupaten Bombana
8. Kabupaten Kolaka
9. Kabupaten Muna Barat

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara

1. Kabupaten Bombana
2. Kabupaten Kolaka Timur
3. Kabupaten Konawe Selatan
4. Kabupaten Konawe

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Transmigrasi (KT)

1. KT Asinua, Kabupaten Konawe
2. KT Anawua, Kabupaten Kolaka
3. KT Mutiara, Kabupaten Muna



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 221 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 7,9 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 73,1 | 0,9 | 10,04 - 10,54 | 0,365 - 0,371 | 0,53 | 28,93 | 82,39 | 2,54 - 3,04 |
| 2029 | 9,1 <small>(2029)</small> | 106,4 | 0,9 | 6,60 - 7,60 | 0,343 - 0,347 | 0,56 | 55,12 | 83,06 | 2,32 - 2,80 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| A1 | Destinasi Pariwisata Prioritas: <ul style="list-style-type: none"> A1: Kabupaten Wakatobi | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi <i>blue, green, circular economy</i> , melalui: <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Aksesibilitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, dengan <i>output</i>: aksesibilitas pariwisata Pengembangan Atraksi termasuk <i>event</i> berkualitas dan warisan Geologi Wakatobi, dengan <i>output</i>: pendukung <i>event</i> daerah, pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional, provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata, dan jejaring destinasi pariwisata di Sulawesi Tenggara yang dikembangkan Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas Pariwisata Wakatobi, dengan <i>output</i>: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Wakatobi, dengan <i>output</i>: SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja dan masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas SDM Pemasaran Pariwisata Wakatobi, dengan <i>output</i>: publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Wakatobi, dengan <i>output</i>: fasilitasi akses pembiayaan digital, pembiayaan <i>startup</i>, pembiayaan pasar modal, dan pembiayaan pariwisata berkualitas, rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif, advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi, promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif, promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif, transformasi digital industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dan penerapan pariwisata berkelanjutan Keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana Wakatobi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan operasi SAR Kota Kendari |
| A2 | Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe: <ul style="list-style-type: none"> A2: Kabupaten Konawe (Morosi) | Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Konawe, dengan <i>output</i> : penyusunan masterplan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu di kota kecil Kabupaten Konawe, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, bantuan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja serta bantuan pembangunan rumah swadaya, pemugaran permukiman kumuh, penataan kawasan perkotaan dengan fokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau serta pemenuhan layanan dasar air minum, peningkatan kualitas lingkungan melalui pemenuhan layanan persampahan, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 222 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|---|---|
| A3 A4 | Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang Sulawesi Tenggara <ul style="list-style-type: none">A3: Kabupaten KonaweA4: Kabupaten Kolaka | <p>Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar) di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, dengan <i>output</i>: Jalan <i>Shortcut</i> Kawasan Industri Konawe dan Jembatan Tabangele - PebunoohaPengembangan Industri <i>Stainless Steel</i>, dengan <i>output</i>: hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeriPengembangan Industri Nikel Sulfat, dengan <i>output</i>: Industri <i>smelter</i>/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannyaPembangunan Industri <i>Battery Precursor</i> Berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt), dengan <i>output</i>: Industri <i>battery precursor</i> berbasis NMC yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasiPengembangan Industri Katoda Berbasis Nikel, dengan <i>output</i>: industri katoda nikel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasiPengembangan Industri <i>Battery Pack</i> Berbasis NMC, dengan <i>output</i>: industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeriTata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dengan <i>output</i>: rekomendasi keprospekan sumber daya mineralDekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen peta jalan dekarbonisasi industri nikel nasional untuk mewujudkan komitmen <i>Net Zero Emissions</i> (NZE) nasionalHarmonisasi kebijakan industri nikel, dengan <i>output</i>: kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikelPeningkatan penerapan standarisasi di industri nikel, dengan <i>output</i>: standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produkPenyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan <i>output</i>: fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan Industri, pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>, serta asesor lisensi dan asesor kompetensiKetersediaan bahan baku industri logam dasar yang berkualitas dan kompetitif, dengan <i>output</i>: neraca penyediaan dan permintaan besi baja, baja paduan, dan produk turunannya nasionalKepastian pasokan dan harga energi untuk industri logam dasar, dengan <i>output</i>: evaluasi pemanfaatan HGBT di industri logam dasarPeningkatan utilisasi kapasitas terpasang industri besi-baja, dengan <i>output</i>: industri logam dalam negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKNPengembangan Industri <i>Special Steel</i>, dengan <i>output</i>: Industri <i>Special Steel</i> yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasiPenurunan Gas Rumah Kaca (GRK) di Industri Logam Dasar, dengan <i>output</i>: Fasilitasi Investasi untuk Industri Pemotongan <i>Scrap</i> LogamOptimalisasi penerapan standarisasi di Industri Logam Dasar, dengan <i>output</i>: Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri LogamPembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan akses KI KonawePengembangan Kawasan Industri Indonesia Pomalaa <i>Industrial Park</i> dan Kawasan Industri <i>Virtue Dragon Nickel Industry</i>Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|--|--|---|
| B1 B2 | Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara <ul style="list-style-type: none">B1: Kabupaten Kolaka UtaraB2: Kabupaten Kolaka Timur | Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara dengan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah, melalui: <ul style="list-style-type: none">On Farm penguatan produksi komoditas pertanian bahan baku industri prioritas, dengan <i>output</i>: kawasan kakao, area penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunanPembangunan dan pengembangan bandara, dengan <i>output</i>: pembangunan Bandara Kolaka Utara |
| B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 | Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara <ul style="list-style-type: none">B3: Kota KendariB4: Kota Bau BauB5: Kabupaten ButonB6: Kabupaten MunaB7: Kabupaten BombanaB8: Kabupaten KolakaB9: Kabupaten Muna Barat | Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan di Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna Barat, melalui: <ul style="list-style-type: none">Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap, dengan <i>output</i>: alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk Perikanan, dengan <i>output</i>: sarana penyimpanan produk kelautan perikanan; sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan; gudang beku dan kelengkapannyaPeningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, dengan <i>output</i>: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha, wirausaha kelautan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, UMKM kelautan perikanan yang difasilitasi dalam inkubasi bisnis, pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah, eksportir kelautan perikanan baru yang ditumbuhkan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan, lembaga usaha kelautan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahaPeningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, dengan <i>output</i>: pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukurPengembangan kluster ikan nila salin, dengan <i>output</i>: ikan konsumsi air tawar hasil budidaya yang diproduksi, sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat, benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakatRevitalisasi tambak udang, dengan <i>output</i>: kluster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, benih udang yang disalurkan ke masyarakat, irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif, sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat |
| C1 C2 C3 C4 | Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara <ul style="list-style-type: none">C1: Kabupaten BombanaC2: Kabupaten Kolaka TimurC3: Kabupaten Konawe SelatanC4: Kabupaten Konawe | Pengembangan lumbung pangan Sulawesi Tenggara dengan hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan, melalui: <ul style="list-style-type: none">Penerapan teknologi dan penyediaan bahan baku bioindustri agro, dengan <i>output</i>: kawasan kakao, kawasan karet, sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, dan prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunanPenguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i>: perguruan tinggi sarjana terapan pertanian, SMK pertanian, rekomendasi perlindungan LP2B dan alih fungsi lahan pertanian, dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 224 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan pascapanen pangan nabati, dengan <i>output</i>: alat dan mesin pertanian, sarana pengolahan dan pascapanen, dan jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi • Penguatan pangan lokal, dengan <i>output</i>: sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan sarana pascapanen tanaman pangan • Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, dengan <i>output</i>: kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan, fasilitasi dan pembinaan lembaga peternakan, fasilitasi dan pembinaan nilai tambah dan daya saing peternakan, <i>Horticulture Development of Dryland Areas Project, Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment</i> • Pembangunan tampungan air, dengan <i>output</i>: Bendungan Pelosika |
| D1 D2 D3 | Kawasan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> • D1: KT Asinua, Kabupaten Konawe • D2: KT Anawua, Kabupaten Kolaka • D3: KT Mutiara, Kabupaten Muna | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Anawua di Kabupaten Kolaka, dan Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | Pengembangan hilirisasi rumput laut, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan <i>output</i>: rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur kawasan budi daya rumput laut - '<i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i>', dan klaster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat • Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan <i>output</i>: fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (Karagenan (polisakarida), Agar, Kosmetik, <i>Biofuel</i>, dan Bioplastik) dan pengembangan Biostimulan berbasis rumput laut • Peningkatan rantai nilai rumput laut, dengan <i>output</i>: memperkuat koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut dan pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut • Peningkatan kapasitas tenaga kerja di Industri Rumput Laut, dengan <i>output</i>: pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan • Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut, dengan <i>output</i>: insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan dan penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan rantai pasok industri di dalam negeri (termasuk IKM), dengan <i>output</i>: hilirisasi grafit untuk mendukung ekosistem industri <i>Electric Vehicle (EV)</i> Nasional; fasilitasi dan pendampingan teknologi dan <i>skill-set</i> bagi IKM tier 2 dan tier 3 untuk transisi ke teknologi EV |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 225 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|----------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur pengisian daya, dengan <i>output</i>: Insentif untuk investasi SPKLU; Insentif untuk mendorong peningkatan daya listrik rumah tangga.• Pengembangan ekosistem industri EV Industri KBLBB yang terfasilitasi investasi, dengan <i>output</i>: penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi untuk transisi ke arah industri, perjanjian perdagangan untuk kemudahan bahan baku litium, mangan, dan kobalt• Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Baterai, dengan <i>output</i>: fasilitasi investasi untuk industri baterai <i>recycling</i> |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | <p>Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan <i>output</i>: pengembangan fasilitas Pelabuhan Lapuko, pengembangan fasilitas Pelabuhan Sikeli, pengembangan fasilitas Pelabuhan Raha• Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi; pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka; Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau.• Penanganan konektivitas jalan mendukung wilayah tertinggal dan perbatasan, dengan <i>output</i>: Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Provinsi Sulawesi Tenggara• Pembangunan jalan lingkar perkotaan, dengan <i>output</i>: Pembangunan Jalan Perkotaan - Provinsi Sulawesi Tenggara• Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, dengan <i>output</i>: pembangunan sistem angkutan umum massal• Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta Peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan <i>output</i>: peningkatan keselamatan angkutan darat dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, pembangunan jalan dengan ruas BTS. Kab. Kolaka/Kab. Bombana-Boepinang, Wolo-BTS. Kota Kolaka, Boepinang-Bambaea, pembangunan jembatan strategis, peningkatan dan preservasi jalan daerah, terminal barang dan penumpang, Pembangunan terminal barang internasional, pengembangan terminal Tipe A• Pembangunan Sarana Angkutan Penyeberangan, dengan <i>output</i>: pembangunan kapal penyeberangan |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | <p>Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan penyediaan dan layanan listrik, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, rumusan kebijakan pembinaan BLIMN dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik, pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi• Peningkatan konektivitas ketenagalistrikan dan digitalisasi, dengan <i>output</i>: pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga Listrik, jaringan transmisi, gardu induk, rekomendasi kebijakan transisi energi global, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari;• Dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk terbarukan beban dasar dan variabel, dengan <i>output</i>: pembangunan PLTMH dan PLTS, rekomendasi pengendalian pembangkit, pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk;• Penguatan infrastruktur telekomunikasi, dengan <i>output</i>: OM Palapa Ring, kerja sama badan usaha, dibangunnya 4G oleh operator, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 226 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|----------------------------|---|
| | | <p>percepatan teknologi dan pos digital, pembangunan transmisi, regulasi dan dukungan infrastruktur digital</p> <ul style="list-style-type: none">• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan <i>output</i>: penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas, OM pusat monitoring telekomunikasi, pos dan penyiaran, layanan publik bidang telekomunikasi, kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat• Perluasan layanan penyiaran digital• Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | <p>Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir berbasis ekonomi sirkular, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM Kabupaten/Kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM kabupaten/kota, pembinaan teknis bidang air minum, dan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum• Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM, daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah• Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan, dan berketahanan iklim masyarakat, dengan <i>output</i>: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota• Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif, dengan <i>output</i>: rehabilitasi daerah irigasi multikomoditas• Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular, dengan <i>output</i>: persiapan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 (<i>E-Waste</i>), pemanfaatan teknologi <i>recycling</i> plastik daur ulang, fasilitas pengelolaan sampah spesifik• Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan <i>output</i>: pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang terbangun, jumlah fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R oleh pemerintah pusat yang terbangun, sistem pengelolaan persampahan skala regional, sistem pengelolaan persampahan skala kota, sistem pengelolaan persampahan skala kawasan |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | <p>Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit menular lainnya, Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, NSPK pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN• Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>: pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 227 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|----------------------------|--|
| | | <p>penguatan pelayanan KIA, pemenuhan SPA dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produksi SDM kesehatan, dengan <i>output</i>: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan PPDS, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspecialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspecialis dengan wajib penempatan• Penguatan intervensi spesifik dan sensitif <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>Buffer Stock</i>, tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, dan layanan imunisasi pendukung pencapaian <i>stunting</i>• Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), dengan <i>output</i>: alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, obat dan perbekalan program pengendalian, serta data dan informasi malaria; bahan dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, pelayanan pengobatan, paket penyediaan alat dan reagen, serta obat dan perbekalan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS; tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian, layanan <i>skrining mobile</i> dan fasyankes, layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC; alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik <i>Multi Drug Therapy</i> (MDT), pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pasca pengobatan |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | <p>Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi dan penyaluran subsidi/ bantuan pembiayaan perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah khusus reguler dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/pekerja, fasilitasi subsidi dan bantuan uang muka, pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan• Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, dengan <i>output</i>: Bantuan PSU Bidang Perumahan• Penanganan permukiman kumuh, dengan <i>output</i>: pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | <p>Penguatan pendidikan, pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi, dengan <i>output</i>: sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi dan prasarana perguruan tinggi yang dibangun, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah• Pemagangan industri di dalam dan luar negeri, dengan <i>output</i>: peserta yang magang di perusahaan di luar negeri, peserta yang magang di perusahaan dalam negeri, dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bersama industri• Pelatihan vokasi di sektor strategis yang didukung penjaminan mutu pendidikan, dengan <i>output</i>: pelatihan vokasi bidang pertanian dan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 228 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|----------------------------|---|
| | | <p>perikanan, pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, pelatihan peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi industri <i>upskilling dan reskilling</i>, PBK Provinsi Sulawesi Tenggara, penjaminan mutu satuan pendidikan, dokumen <i>tracer study</i>, rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, dan standar pelatihan berbasis kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none">• Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan <i>output</i>: SMK mengembangkan pusat keunggulan, mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan, mendapatkan pendampingan peningkatan mutu, dan mengembangkan pengajaran berbasis pabrik, SDM mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, program kelas industri, dan fasilitasi pendampingan <i>link and match</i> SMK dengan industri• Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan <i>output</i>: pelatihan kurikulum DUDI untuk guru kejuruan, <i>upskilling dan reskilling</i> pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja, prasarana dan sarana pendukung pembelajaran, dan siswa SMK yang tersertifikasi• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang Pendidikan |
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | <p>Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan <i>output</i>: bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula tematik, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan• Penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan revitalisasi dana sosial keagamaan, dengan <i>output</i>: keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, warga masyarakat rawan bencana sosial yang mendapat bantuan, dan lembaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf yang dibina dan diperkuat literasi program pengentasan kemiskinan• Pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dengan <i>output</i>: koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan <i>data center</i>; penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD, pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT), dan penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data;• Penguatan JKN dan perlindungan sosial adaptif, dengan <i>output</i>: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, dan korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan.• Pelaksanaan bantuan energi dan pangan, dengan <i>output</i>: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan,• Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara inklusif dengan <i>output</i> Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Fasilitasi Dialog Regulasi Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pelaku Hubungan Industrial, Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan• Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain dengan <i>output</i> Layanan atas Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Hak Anak, Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Perumahan, Penyandang Disabilitas yang |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 229 -

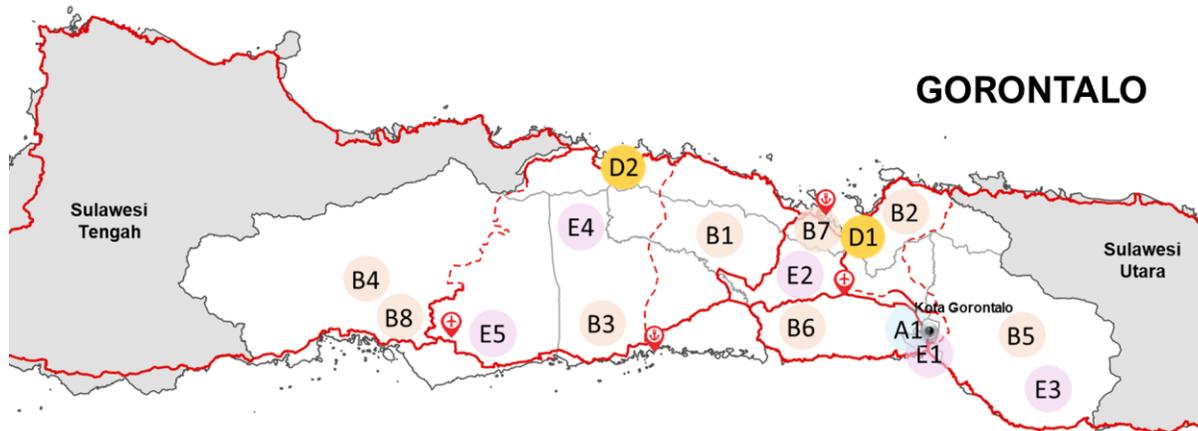
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|----------------------------|---|
| | Provinsi Sulawesi Tenggara | <p data-bbox="646 675 1404 725">mendapatkan Bantuan Permakanan dan Anak YAPI yang mendapatkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial</p> <p data-bbox="602 743 1052 776">Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui:</p> <ul data-bbox="602 783 1404 1065" style="list-style-type: none"><li data-bbox="602 783 1404 859">• Peningkatan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dengan <i>output</i>: Rekomendasi kebijakan PDRD, daerah dengan proporsi PDRD terhadap PAD meningkat, dan basis data potensi PDRD<li data-bbox="602 866 1404 977">• Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non utang yang inovatif, dengan <i>output</i>: penatausahaan BMD secara wajar, proporsi kontribusi BUMD yang meningkat, dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)<li data-bbox="602 985 1404 1065">• Pengembangan instrumen pembiayaan utang daerah, dengan <i>output</i>: daerah yang difasilitasi dalam menerbitkan obligasi/sukuk daerah dan memanfaatkan pinjaman daerah |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 230 -

5.5 Provinsi Gorontalo



A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo
1. Kota Gorontalo

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Kabupaten Gorontalo
2. Kabupaten Gorontalo Utara
3. Kabupaten Boalemo
4. Kabupaten Pohuwato
5. Kabupaten Bone Bolango

Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa

6. Kabupaten Gorontalo
7. Kabupaten Gorontalo Utara

Kawasan Sentra Garam

8. Kabupaten Pohuwato

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

D. Kawasan Afirmasi

Kecamatan Perbatasan Prioritas

1. Kabupaten Gorontalo Utara

Kawasan Transmigrasi (KT)

2. KT Sumulata, Kabupaten Gorontalo Utara

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo, dsk

1. Kota Gorontalo
2. Kabupaten Gorontalo
3. Kabupaten Bone Bolango
4. Kabupaten Boalemo
5. Kabupaten Pohuwato



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 231 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Gorontalo

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 5,8 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 47,6 | 0,2 | 14,21 – 14,50 | 0,394 – 0,400 | 0,50 | 59,98 | 81,48 | 2,87 – 3,08 |
| 2029 | 6,7 <small>(2029)</small> | 65,2 | 0,2 | 9,50 – 10,50 | 0,384 – 0,393 | 0,54 | 81,44 | 82,15 | 2,00 – 2,74 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------|---|--|
| A1 | Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo <ul style="list-style-type: none"> A1: Kota Gorontalo | <p>Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Gorontalo, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo, dengan <i>output</i>: penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu, bantuan PSU perumahan, bantuan pembangunan rumah swadaya, pembangunan rumah susun hunian untuk ASN/TNI/POLRI, MBR dan pekerja, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan, pemugaran, dan pemukiman kembali permukiman kumuh, pengembangan sanitasi, pembangunan dan peningkatan SPAM, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota dan permukiman, sistem pengelolaan persampahan skala kota, penguatan instrumen peringatan dini bencana, preservasi jalan akses simpul transportasi Jalan Kota Gorontalo - Limboto - Isimu, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, penyediaan ruang terbuka hijau, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan Penanganan Banjir Kota Gorontalo |
| B1 B2 B3 B4 B5 | Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> B1: Kabupaten Gorontalo B2: Kabupaten Gorontalo Utara B3: Kabupaten Boalemo B4: Kabupaten Pohuwato B5: Kabupaten Bone Bolango | <p>Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pangan nabati dan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah, dengan <i>output</i>: area penyaluran benih jagung dan padi, sertifikat benih jagung dan padi, kawasan padi, kawasan aneka cabai, serta alat dan mesin pertanian Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan <i>output</i>: penuntasan pembangunan Bendungan Bulango Ulu, pembangunan jaringan irigasi, dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman-Tabulo, Isimu-Paguyaman, dan Taludaa-Pelabuhan Gorontalo, pembangunan jalan koridor logistik, pembangunan jalan akses simpul transportasi, serta pendampingan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait Pelabuhan Anggrek Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat perdesaan, pendidikan tinggi vokasi pertanian, pendidikan menengah vokasi pertanian, rumah pengolah pupuk organik, dan pengembangan lahan pertanian produktif |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 232 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------|--|---|
| B6 B7 | Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa <ul style="list-style-type: none">B6: Kabupaten GorontaloB7: Kabupaten Gorontalo Utara | Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa, melalui: <ul style="list-style-type: none">Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa, dengan <i>output</i>: kawasan kelapa, sarana dan prasarana pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan, dan produksi benih tanaman perkebunanPeningkatan daya saing produk kelapa yang disertai peningkatan industri pengolahan kelapa, dengan <i>output</i>: pengembangan industri pengolahan kelapa produk hilir, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, neraca komoditas kelapa, pengembangan industri pengolahan kelapa, pendampingan pembiayaan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi |
| B8 | Kawasan Sentra Garam <ul style="list-style-type: none">B8: Kabupaten Pohuwato | Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui: <ul style="list-style-type: none">Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan <i>output</i>: korporasi petambak garam yang dikembangkan, verifikasi penyaluran distribusi garam industri ke industri, pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetikPenguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan <i>output</i>: sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi |
| D1 | Kecamatan Perbatasan Prioritas <ul style="list-style-type: none">D1: Kec. Gentuma Raya, Kec. Tomilito, Kec. Ponele Kepulauan, Kec. Anggrek, Kec. Monano, Kec. Sumalata Timur, Kec. Biau, dan Kec. Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara | Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i> : pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan |
| D2 | Kawasan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none">D2: Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, melalui: <ul style="list-style-type: none">Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukimanPengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: bantuan sarana produksi pertanianRedistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasiPenataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran |
| E1 E2 E3 E4 E5 | Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo, dsk <ul style="list-style-type: none">E1: Kota GorontaloE2: Kabupaten GorontaloE3: Kabupaten Bone BolangoE4: Kabupaten BoalemoE5: Kabupaten Pohuwato | Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo dan sekitarnya melalui: <ul style="list-style-type: none">Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, dengan <i>output</i>: kawasan konservasi perairan yang operasional, pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang dikembangkan sarana dan prasarannya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisataPengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem, dengan <i>output</i>: rekomendasi penetapan status <i>Geopark</i> nasional dan pengembangan pola pendanaan pengembangan <i>Geopark</i>Rehabilitasi hutan dan lahan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan, dan rehabilitasi Daerah Tampung Air (DTA) danau secara vegetatif |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 233 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian daya rusak air, dengan <i>output</i>: pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pesisir pantai• Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan <i>output</i>: Sarana <i>search and rescue</i> (SAR) <i>rafting boat</i>, prasarana SAR, pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana |
| | Provinsi Gorontalo | <p>Pengembangan permukiman yang didukung dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, peningkatan kapasitas dan jaringan listrik, serta penguatan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dengan <i>output</i>: pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM Regional, Kabupaten/Kota, dan berbasis masyarakat• Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, dengan <i>output</i>: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi• Peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan <i>output</i>: sistem pengelolaan persampahan skala regional, skala kota, skala kawasan, dan berbasis masyarakat, fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), pemanfaatan teknologi <i>recycling</i> plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah• Penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan <i>output</i>: fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R, pemanfaatan teknologi <i>recycling</i> plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah• Pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan, dengan <i>output</i>: pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) dan pengawasan-evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan listrik• Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan <i>output</i>: Kerja sama Badan Usaha, OM BTS 4G/<i>Lastmile</i>, Fasilitasi penerapan infrastruktur pasif bersama, OM akses internet, OM SATRIA 1. Layanan publik bidang telekomunikasi, Sistem perizinan telekomunikasi (OM), Perangkat pengukuran QoS telekomunikasi dan penyiaran, dan Pusat monitoring telekomunikasi, pos dan penyiaran• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan <i>output</i>: Sosialisasi informasi kebijakan di bidang perdagangan melalui sistem, inisiatif baru bimbingan teknis pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE, dan fasilitasi literasi digital sektor pertanian dan perikanan• Perluasan layanan penyiaran digital, dengan <i>output</i>: pembangunan transmisi dan multipleksing, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas teknik, peralatan teknik produksi dan penyiaran, penyediaan infrastruktur teknologi informatika, <i>multiplatform</i> OTT, manajemen arsip digital, revitalisasi perangkat siaran, dan prasarana <i>digital broadcasting system</i> (DBS dan OM)• Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 234 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--------------------|---|
| | Provinsi Gorontalo | <p>Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan konektivitas jalan, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman-Tabulo, Isimu-Paguyaman, dan Taludaa-Pel. Gorontalo, pembangunan jalan koridor logistik, pembangunan jalan akses simpul transportasi, dan pembangunan <i>Gorontalo Outer Ring Road</i> (GORR) segmen 3• Pembangunan dan pengembangan pelabuhan, dengan <i>output</i>: pendampingan KPBU Pelabuhan Angrek dan Pelabuhan penyeberangan• Penguatan infrastruktur konektivitas udara, dengan <i>output</i>: pengembangan bandar udara |
| | Provinsi Gorontalo | <p>Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak, penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN)• Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan <i>output</i>: pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampunan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu• Penurunan kematian ibu dan anak melalui seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak• Peningkatan produksi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dengan <i>output</i>: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspecialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspecialis dengan wajib penempatan |
| | Provinsi Gorontalo | <p>Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian penyakit Malaria, dengan <i>output</i>: alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, obat dan perbekalan program pengendalian, serta data dan informasi malaria• Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: bahan dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, pelayanan pengobatan, paket penyediaan alat dan reagen, serta obat dan perbekalan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS• Peningkatan upaya pencegahan TBC, dengan <i>output</i>: tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian, layanan <i>skrining mobile</i> dan fasyankes, layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC• Pengendalian penyakit Kusta, dengan <i>output</i>: alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik <i>Multi Drug Therapy</i> (MDT), pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pasca pengobatan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 235 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan intervensi spesifik dan sensitif <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: Ibu Hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>Buffer Stock</i>, Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, dan layanan imunisasi pendukung pencapaian <i>stunting</i> |
| | Provinsi Gorontalo | <p>Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelatihan vokasi di sektor strategis yang didukung penjaminan mutu pendidikan, dengan <i>output</i>: revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan, pelatihan vokasi bidang pertanian dan perikanan, pelatihan vokasi di Provinsi Gorontalo, pelatihan peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>, pelatihan berbasis kompetensi (PBK) Provinsi Gorontalo, penjaminan mutu satuan pendidikan, dokumen <i>tracer study</i>, rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, dan standar pelatihan berbasis kompetensi• Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan <i>output</i>: SMK mengembangkan pusat keunggulan, mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan, mendapatkan pendampingan peningkatan mutu, dan mengembangkan pengajaran berbasis pabrik, SDM mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, program kelas industri, dan fasilitasi pendampingan <i>link and match</i> SMK dengan industri• Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan <i>output</i>: pelatihan kurikulum dunia kerja dunia usaha (DUDI) untuk guru kejuruan, <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja, prasarana dan sarana pendukung pembelajaran, dan siswa SMK yang tersertifikasi |
| | Provinsi Gorontalo | <p>Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan <i>output</i>: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, <i>mustahiq</i> yang diselaraskan datanya, dan aparaturnya yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM)• Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, dan bantuan alat dan mesin pertanian pra panen• Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan <i>output</i>: penerima bantuan iuran PBI JKN, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam |
| | Provinsi Gorontalo | <p>Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas perikanan dan peternakan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sarana penunjang logistik, prasarana perikanan tangkap, dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan <i>output</i>: pelabuhan perikanan yang dikembangkan, sarana penyimpanan, gudang beku, sarana distribusi logistik, alat dan sarana penangkapan ikan, dan kendaraan pemasaran ikan.• Peningkatan daya saing sumber daya manusia penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan <i>output</i>: diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 236 -

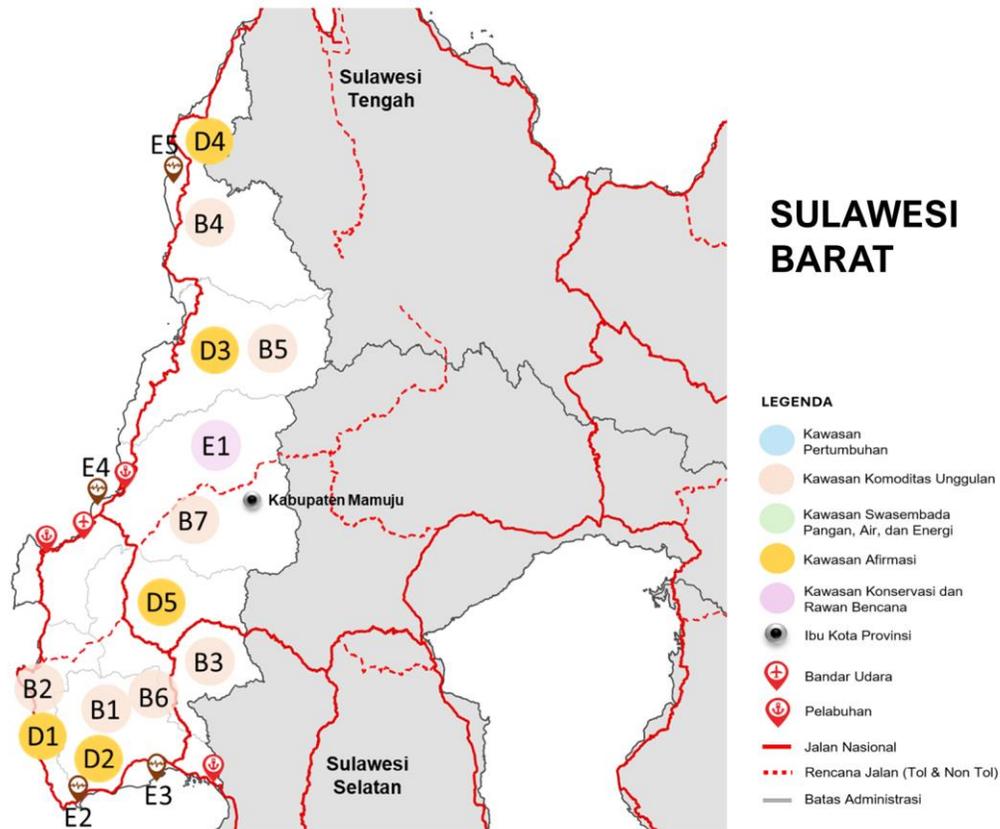
| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|------------------|--|
| | | <p>kesyahbandaran, serta pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i>: promosi usaha, investasi strategis KP termasuk komoditas TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol) terpadu, pelatihan intensif <i>bootcamp</i> dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan.• Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan <i>output</i>: bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

5.6 Provinsi Sulawesi Barat



B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi

1. Kabupaten Polewali Mandar
2. Kabupaten Majene
3. Kabupaten Mamasa
4. Kabupaten Pasangkayu
5. Kabupaten Mamuju Tengah

Kawasan Perikanan Budidaya

6. Kabupaten Polewali Mandar
7. Kabupaten Mamuju

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Transmigrasi (KT)

1. KT Ulumanda, Kabupaten Majene
2. KT Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar
3. KT Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
4. KT Sarudu Baras, Kabupaten Pasangkayu
5. KT Mambi Mahelaan, Kabupaten Mamasa

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi dan Pengembangan Pulau Kecil

1. Kabupaten Mamuju

Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Makassar Strait Sulawesi Barat

2. Kabupaten Majene
3. Kabupaten Polewali Mandar
4. Kabupaten Mamuju
5. Kabupaten Pasangkayu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 238 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 5,5 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 43,8 | 0,3 | 9,00 – 9,73 | 0,345 – 0,349 | 0,51 | 61,65 | 84,82 | 1,41 – 2,00 |
| 2029 | 6,3 <small>(2029)</small> | 58,7 | 0,3 | 4,97 – 5,97 | 0,332 – 0,336 | 0,54 | 76,22 | 85,32 | 1,07 – 1,76 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------|---|--|
| B1 B2 B3 B4 B5 | Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi <ul style="list-style-type: none"> • B1: Kabupaten Polewali Mandar • B2: Kabupaten Majene • B3: Kabupaten Mamasa • B4: Kabupaten Pasangkayu • B5: Kabupaten Mamuju Tengah | <p>Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, serta hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan serta implementasi pertanian berketahanan iklim melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akses pasar dan pembiayaan pengembangan komoditas pertanian dan keturunannya, dengan <i>output</i>: pendampingan dalam sertifikasi produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan • Peningkatan produksi pangan nabati, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan, jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi, optimasi lahan, alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan • Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan <i>output</i>: dukungan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan • Pengembangan kawasan dan benih padi biofortifikasi, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) • Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dengan <i>output</i>: pendampingan lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor dan kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan • Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian muda, dengan <i>output</i>: pembentukan lembaga pendidikan menengah vokasi pertanian, pendidikan tinggi vokasi pertanian diploma tiga (D-III), dan pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan (D-IV) • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i>: penyusunan rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim • Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan |
| B6 B7 | Kawasan Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none"> • B6: Kabupaten Polewali Mandar • B7: Kabupaten Mamuju | <p>Pengembangan komoditas perikanan budidaya, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan <i>output</i>: pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan jumlah kluster kawasan revitalisasi tambak udang, dan jumlah kluster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan • Pengembangan <i>input</i> produksi perikanan budi daya, dengan <i>output</i>: produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 239 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------------------------|---|---|
| | | <p>dan udang ke masyarakat, dan pengujian sampel <i>Surveillance</i> Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan logistik perikanan, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana sistem rantai dingin hasil KP, pembangunan unit pengolahan ikan (UPI), pengembangan sarana distribusi logistik produk KP dan sarana distribusi logistik produk KP. |
| D1 D2 D3 D4 D5 | <p>Kawasan Transmigrasi (KT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: KT Ulumanda, Kabupaten Majene • D2: KT Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar • D3: KT Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah • D4: KT Sarudu Baras, Kabupaten Pasangkayu • D5: KT Mambi Mehalaan, Kabupaten Mamasa | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ulumanda di Kab. Majene, Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu di Kab. Polewali Mandar, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kab. Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kab. Pasangkayu, dan Kawasan Transmigrasi Mambi Mehalaan di Kab. Mamasa, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran |
| E1 | <p>Kawasan Konservasi dan Pengembangan Pulau Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • E1: Kabupaten Mamuju | <p>Pengembangan dan pengelolaan wisata bahari pada kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, dengan <i>output</i>: kawasan konservasi perairan yang operasional, pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata • Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan <i>output</i>: Sarana SAR <i>rafting boat</i>, prasarana <i>search and rescue</i> (SAR), pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil • Pengelola wisata alam dan wisata bahari secara berkelanjutan • Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi sektor pariwisata bahari |
| E2 E3 E4 E5 | <p>Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Makassar Strait Sulawesi Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • E2: Kabupaten Majene • E3: Kabupaten Polewali Mandar • E4: Kabupaten Mamuju • E5: Kabupaten Pasangkayu | <p>Pengelolaan risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi di Makassar Strait, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dengan <i>output</i>: penyusunan Peta kawasan rawan bencana gempa bumi, penyediaan peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan <i>intensitymeter</i> dan <i>accelerograph</i> melalui IDRIP, penyediaan peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui Indonesia <i>Disaster Resillience Initiatives Project</i> (IDRIP), fasilitasi dan pelayanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) wilayah timur • Pendampingan penanganan kedaruratan bencana, dengan <i>output</i>: penerapan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pascabencana, bantuan kepada korban bencana alam berupa bantuan logistik tanggap darurat, dan terselenggaranya operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 240 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan peringatan dini multiancam bencana gempa bumi, dengan <i>output</i>: terpasangnya instrumentasi peringatan dini, persentase kecepatan informasi iklim dan kualitas udara dan terlaksananya pembinaan penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik• Penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami |
| | Provinsi Sulawesi Barat | Peningkatan kualitas ekosistem gambut, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pemulihan lahan gambut, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan gambut di areal penggunaan lainnya, pelaksanaan Program Gambut Lestari, Program Desa Mandiri Peduli Gambut, dan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut• Pengelolaan data dan informasi lahan gambut, dengan <i>output</i>: penyediaan data dan informasi Kesatuan Hidrologis Gambut |
| | Provinsi Sulawesi Barat | Pengembangan hilirisasi rumput laut, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan <i>output</i>: penyusunan rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut - '<i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i>', dan klaster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat• Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan <i>output</i>: fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (Karagenan (polisakarida), Agar, Kosmetik, <i>Biofuel</i>, dan Bioplastik) dan pengembangan Biostimulan berbasis rumput laut• Peningkatan rantai nilai rumput laut, dengan <i>output</i>: penguatan koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut dan pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut• Peningkatan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut, dengan <i>output</i>: pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan• Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut, dengan <i>output</i>: penerapan sistem insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan dan penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut |
| | Provinsi Sulawesi Barat | Pengembangan industri mesin dan perlengkapan, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri alat pertanian, dengan <i>output</i>: pengembangan industri alat mesin pertanian yang terfasilitasi dalam rangka penguatan mekanisasi pertanian nasional• Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi bidang pertanian dan perkebunan, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, purwarupa Budidaya Tanaman yang dihasilkan, purwarupa budidaya ternak yang dihasilkan, purwarupa hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan, terlaksananya uji terap metode pengujian mutu benih, kelompok tani yang mendapatkan diseminasi melalui percontohan teknologi pertanian, kelompok tani yang terfasilitasi program IPDMIP, pembangunan irigasi perpipaan pertanian untuk penambahan areal tanam, pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim untuk penambahan areal tanam• Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan <i>output</i>: pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan kebijakan di bidang perindustrian sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 241 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-------------------------|--|
| | Provinsi Sulawesi Barat | <p>Penguatan layanan transportasi, infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penanganan jalan daerah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan/jembatan daerah dan preservasi jalan/jembatan daerah• Peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan <i>output</i>: pelaksanaan kampanye/sosialisasi/promosi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan pengembangan/pemasangan fasilitas keselamatan jalan dan daerah yang menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan• Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan <i>output</i>: pembangunan/pengembangan pelabuhan simpul utama• Pengembangan bandara dengan <i>output</i>: pengembangan bandara Tampa Padang (Kab. Mamaju) dan Bandara Sumarorong (Kab. Mamasa)• Pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta listrik pedesaan, dengan <i>output</i>: peningkatan pasokan tenaga listrik dan pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T |
| | Provinsi Sulawesi Barat | <p>Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu, serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir berbasis teknologi tepat guna, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, serta penguatan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM Kabupaten/Kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM kabupaten/kota, pembinaan teknis bidang air minum, dan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum, termasuk pada SPAM Regional Polewali Mandar-Majene• Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM, daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah• Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan, dan berketahanan iklim masyarakat, dengan <i>output</i>: pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota• Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif, dengan <i>output</i>: rehabilitasi daerah irigasi multikomoditas• Fasilitasi peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>: pemugaran, peremajaan, serta yang dilakukan pemukiman kembali di permukiman kumuh• Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z• Peningkatan penyediaan dan layanan listrik, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik dan pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi, pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan <i>output</i>: persentase (%) pelaksanaan program direktorat layanan telekomunikasi dan informatika badan usaha dalam rangka pemanfaatan kapasitas palapa ring barat 70 persen, <i>palapa ring</i> tengah |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 242 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-------------------------|--|
| | | <p>45 persen, palapa ring timur 45 persen, dengan <i>service level agreement</i> (SLA) minimal 95 persen dan jumlah lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (<i>base transceiver station/lastmile</i> 4G) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika (kumulatif)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan <i>output</i>: pembinaan pada Fasilitator/<i>Enabler</i> Digital PMSE, pelaksanaan pemantauan/monitoring, bimbingan teknis pada pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE, dan peningkatan literasi masyarakat di bidang digital• Perluasan layanan penyiaran digital, dengan <i>output</i>: pembangunan transmisi, pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru, dan pemantauan terjadinya <i>downtime</i> siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan) |
| | Provinsi Sulawesi Barat | <p>Percepatan pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan, dengan <i>output</i>: penyelarasan data mustahiq dan data kemiskinan regsosek, pembinaan dan penguatan lembaga amal zakat dan nadzir wakaf, lembaga dana amal paramita, lembaga amal kasih Katolik, dan lembaga amal sosial kristiani terkait program pengentasan kemiskinan, pembedayaan rumah tangga miskin melalui kampung ZISWAF• Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan <i>output</i>: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, mustahiq yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM)• Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, dan bantuan alat dan mesin pertanian pra panen• Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan <i>output</i>: pemberian bantuan iuran PBI JKN, pemberian bantuan sosial bersyarat, penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam |
| | Provinsi Sulawesi Barat | <p>Penguatan sistem tata kelola pendidikan vokasi (SMA, SMK dan Politeknik) untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian dan perkebunan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemerintah daerah yang dibina dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan, dengan <i>output</i>: pendampingan peningkatan mutu pada sekolah menengah atas (SMA)• Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan dalam peningkatan kualitas, dengan <i>output</i>: pendampingan program sekolah penggerak• Penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dan pendidik, dengan <i>output</i>: pendampingan dalam rangka menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan di kabupaten/kota• Revitalisasi Sarana Pendidikan (PHTC), dengan <i>output</i>: penyediaan prasarana SMAKN• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan• Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan <i>output</i>: pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan, pengembangan pendidikan produk kreatif dan kewirausahaan di SMK, pendampingan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 243 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-------------------------|--|
| | | <p>peningkatan mutu dan pengajaran berbasis pabrik (<i>Teaching Factory</i>) di SMK</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan <i>output</i>: pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan, pengembangan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, dan pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri• Sertifikasi Kompetensi siswa SMK/MAK, dengan <i>output</i>: penguatan persiapan program magang luar negeri dan fasilitasi sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja |
| | Provinsi Sulawesi Barat | <p>Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas puskesmas dan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan serta pelayanan kesehatan di daerah sulit akses, dengan <i>output</i>: pengukuran dan pelaporan mutu puskesmas, penyediaan sarana, pemenuhan alat kesehatan, peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu, revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan, dan pembinaan RS Kapal di wilayah kepulauan• Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan, dengan <i>output</i>: akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, dan pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah• Penguatan tata kelola dan kepesertaan JKN, dengan <i>output</i>: koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, pemberian bantuan iuran PBI JKN, dan pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)• Penurunan kematian ibu dan anak melalui seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak |
| | Provinsi Sulawesi Barat | <p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan intervensi spesifik <i>stunting</i> dan sensitif <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>Buffer Stock</i>, Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, dan layanan imunisasi pendukung pencapaian <i>stunting</i>.• Peningkatan upaya pencegahan TBC, dengan <i>output</i>: tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian, layanan <i>skrining mobile</i> dan fasyankes, layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC.• Pengendalian penyakit Kusta, dengan <i>output</i>: dukungan penyediaan alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik MDT, pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pasca pengobatan. |

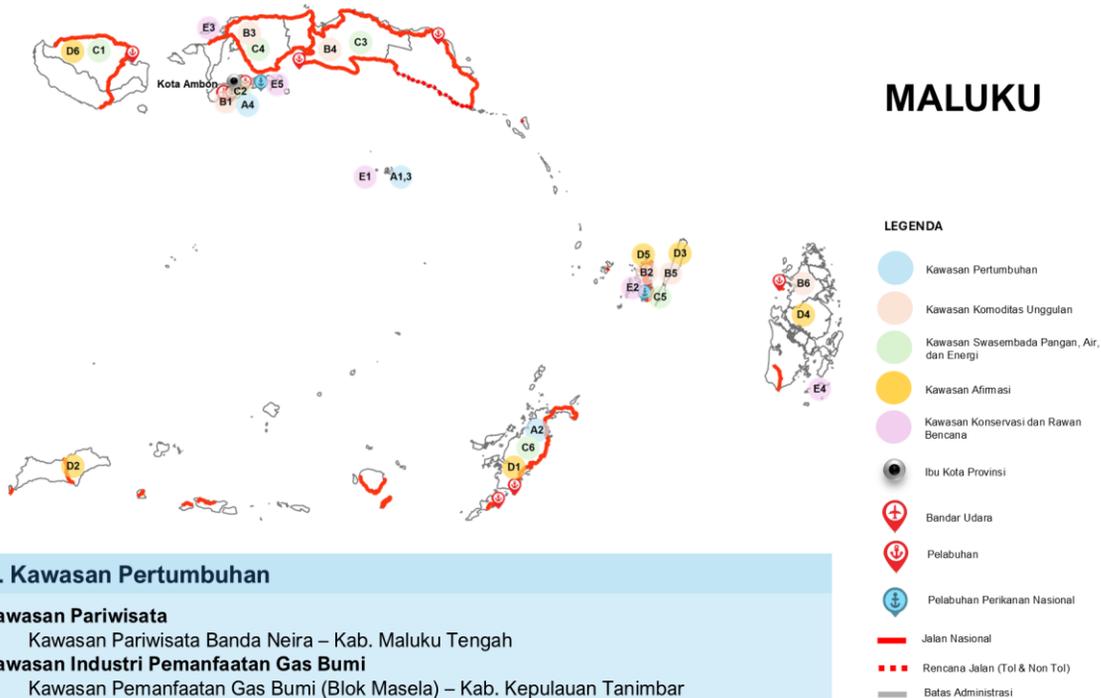


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 244 -

6. Wilayah Maluku

6.1 Provinsi Maluku



A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata

1. Kawasan Pariwisata Banda Neira – Kab. Maluku Tengah

Kawasan Industri Pemanfaatan Gas Bumi

2. Kawasan Pemanfaatan Gas Bumi (Blok Masela) – Kab. Kepulauan Tanimbar

Kawasan Perkotaan

3. Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira – Kab. Maluku Tengah
4. Kawasan Perkotaan Sedang Ambon – Kota Ambon

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster

1. Kota Ambon
2. Kota Tual

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster

3. Kab. Seram Bagian Barat
4. Kab. Maluku Tengah
5. Kab. Maluku Tenggara
6. Kab. Kepulauan Aru

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Buru: potensial pangan, potensial air
2. Kota Ambon: potensial energi
3. Kab. Maluku Tengah: potensial pangan, potensial air
4. Kab. Seram Bagian Barat: potensial energi
5. Kab. Maluku Tenggara: potensial pangan
6. Kab. Kepulauan Tanimbar: potensial air

D. Kawasan Afimasi

Kawasan Perbatasan

PKSN dan Wilayah Pendukung

1. PKSN Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Tanimbar Utara – Kab. Kepulauan Tanimbar
2. PKSN Ilwaki – Kab. Maluku Barat Daya
3. Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat – Kab. Maluku Tenggara
4. Kec. Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir – Kab. Kepulauan Aru
5. Kec. Pulau Dullah Selatan – Kota Tual

Kawasan Perdesaan Prioritas

6. Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi – Kab. Buru

E. Kawasan Konservasi

1. KKN Laut Banda, TWA Gunung Api Banda, KK Perairan di Pulau Ay dan Pulau Rhun – Kab. Maluku Tengah
2. KKD Pulau Kei Kecil – Kab. Maluku Tenggara
3. KK Perairan Buano – Kab. Seram Bagian Barat
4. KK Kepulauan Aru bagian Tenggara – Kab. Kepulauan Aru
5. KK Perairan Kepulauan Lease –
 - Kota Ambon dan
 - Kab. Maluku Tengah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 245 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|--|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 7,3 | 34,8 | 0,3 | 13,01 - 13,51 | 0,282 - 0,287 | 0,49 | 42,88 | 82,43 | 5,55 - 6,03 |
| 2029 <small>(2029)</small> | 8,4 | 50,5 | 0,3 | 8,03 - 9,03 | 0,239 - 0,243 | 0,52 | 100 | 83,10 | 5,07 - 5,57 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| A1 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A1: Kawasan Pariwisata Banda Neira (Kab. Maluku Tengah) | <p>Pengembangan kawasan pariwisata Banda Neira di Kab. Maluku Tengah melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: penanganan jalan daerah, peningkatan fasilitas pelabuhan dan dermaga Peningkatan daya tarik pariwisata alam, sejarah, dan budaya banda, dengan <i>output</i>: pengembangan desa wisata, pengembangan atraksi wisata budaya, penyediaan prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan, dukungan <i>event</i> daerah, pembangunan pusat informasi kepariwisataan, termasuk konten peta wisata (<i>tourism map</i>) yang berkualitas, serta pemanfaatan cagar budaya dan aset sejarah Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: penyediaan akomodasi dan restoran yang berkualitas, kios cinderamata, pengembangan pasar tematik wisata, serta penyediaan layanan kesehatan wisatawan Pengembangan kapasitas SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan <i>output</i>: fasilitasi dan pembinaan masyarakat lokal yang tersertifikasi di bidang pariwisata, penguatan tata kelola desa wisata dan kampung adat Penguatan dan perluasan promosi dan pemasaran, dengan <i>output</i>: promosi terpadu secara nasional dan internasional, serta pembangunan jaringan pengetahuan dan media rekonstruksi diplomasi budaya jalur rempah Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: peningkatan akses pembiayaan, literasi bisnis dan mutu produk IKM/UMKM, pembentukan dan pembinaan BUMDes dan koperasi berbasis pariwisata, perikanan, dan perkebunan |
| A2 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A2: Blok Masela (Kab. Kepulauan Tanimbar) | <p>Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di Kab. Kepulauan Tanimbar (Blok Masela) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan wilayah kerja pengembangan gas bumi dan wilayah keprospekan migas Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan dan pemanfaatan gas bumi, dengan <i>output</i>: pembangunan jaringan gas bumi, sarana prasarana produksi pemanfaatan gas bumi, serta penyiapan pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas Penyiapan kapasitas SDM, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana prasarana dan program studi pendidikan tinggi vokasi berbasis industri migas Penyiapan pembangunan sarana dan prasarana luar kawasan, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM, SPAL, sistem pengelolaan sampah, akses internet, jaringan listrik, serta pembangunan RTH dan ruang terbuka publik |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| A3 | Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none">A3: Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira (Kab. Maluku Tengah) | Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira melalui: <ul style="list-style-type: none">Penataan ruang kota, dengan <i>output</i>: penetapan RDTR dan RTBL, penataan lanskap dan pembangunan fasilitas rekreasi, termasuk diantaranya penyediaan <i>wayfinding</i>, pembangunan <i>promenade</i> sepanjang pantai, pengembangan <i>shared-street</i>, <i>street furniture</i>, dan manajemen lalu lintas di kawasan perkotaanPeningkatan citra kota, dengan <i>output</i>: pemanfaatan cagar budaya (<i>adaptive reuse</i>) sesuai <i>branding</i> kawasan, penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya di dalam dan luar negeriPeningkatan sarana prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: peningkatan SPAM, SPAL, drainase, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, penyediaan akses internet dan listrik berbasis EBT, penataan kawasan, serta peremajaan/pemugaran permukiman kumuh, bantuan pembangunan rumah swadaya, serta penyediaan fasilitas asrama pendidikanPenguatan peran kawasan, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaanPeningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, serta pengembangan bandar udara dan pelabuhanPeningkatan tata kelola pelayanan publik, dengan <i>output</i>: pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang transparan dan akuntabel, serta penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital |
| A4 | Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none">A4: Kawasan Perkotaan Sedang Ambon (Kota Ambon) | Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Ambon melalui: <ul style="list-style-type: none">Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i>: rencana induk (masterplan)Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan <i>output</i>: penguatan <i>branding</i> kawasan dan penguatan promosi daya tarik kotaPeningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan dan peningkatan jalan, transportasi umum massal perkotaan, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadayaPenguatan peran kawasan, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan |
| B1 | Kawasan Komoditas Unggulan: | Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui: |
| B2 | | |
| B3 | (Komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster) | <ul style="list-style-type: none">Penguatan sentra produksi perikanan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan |
| B4 | | |
| B5 | | <ul style="list-style-type: none">Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i>: pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk perikanan, peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan, perluasan ekspor dan promosi produk perikanan, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat |
| B6 | Sentra Industri <ul style="list-style-type: none">B1: Kota AmbonB2: Kota Tual | |
| | Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none">B3: Kab. Maluku TengahB4: Kab. Seram Bagian Barat | <ul style="list-style-type: none">Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan <i>output</i>: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerjaPeningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kampung nelayan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 247 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • B5: Kab. Maluku Tenggara • B6: Kab. Kepulauan Aru | <p>dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital |
| | Provinsi Maluku | <p>Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3T, dengan <i>output</i>: pembangunan Jalan Trans Buru, Seram, Moa, dan Yamdena, penanganan jalan daerah dan jalan 3T di antaranya di Pulau Kei Besar, Kepulauan Aru, serta peningkatan jalan mendukung akses pelabuhan laut (Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Amahai) • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Mahaleta, Pelabuhan Eray, Pelabuhan Marsela, Pelabuhan Namrole, Pelabuhan Banda Eli, dan Pelabuhan Sofyanin, pelayaran kapal Ro-Ro, penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis, serta pengembangan Pelabuhan Ambon sebagai simpul <i>transshipment</i> • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandara Pattimura, Bandara Kufar, Bandara Langgur, dan Bandara Dobo, pengembangan <i>seaplane</i> dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta layanan penyiaran digital |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kota Ambon (perikanan) • Kota Tual (perikanan) • Kab. Maluku Tengah (pariwisata dan ekonomi kreatif) • Kab. Kepulauan Tanimbar (industri migas) | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri. serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja |
| C1 C3 | Kawasan Potensial Swasembada Pangan: | <p>Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi, ubi, dan kedelai) dan pangan akuatik / <i>bluefood</i> berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap, melalui:</p> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|--|--|
| C5 | <ul style="list-style-type: none">C1: Kab. Buru (padi, pangan akuatik)C3: Kab. Maluku Tengah (padi, kedelai, pangan akuatik)C5: Kab. Maluku Tenggara (ubi, rumput laut) <p>Kawasan Rentan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Kepulauan Aru (sagu)Kab. Kepulauan Tanimbar (padi) <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi</p> <p>***) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p> | <ul style="list-style-type: none">Penguatan produksi, dengan <i>output</i>: optimasi kawasan pertanian padi, kedelai, dan ubi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak, revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, serta pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput lautPembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta penyediaan sarana pra, pascapanen, dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengadaan gudang lumbung pangan, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan akuakulturPenguatan kapasitas SDM (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan), dengan <i>output</i>: penguatan dan pelatihan kelompok tani GAP (<i>Good Agriculture Practices</i>), GHP (<i>Good Handling Practices</i>), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanianPenguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal <p>Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan sagu dan padi, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan</p> |
| C2 C4 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none">C2: Kota Ambon*C4: Kab. Seram Bagian Barat* <p>Kawasan Rendah elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Seram Bagian Timur**Kab. Kepulauan Aru** <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>***) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik</p> | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT berbasis biomassa (PLTBio) dan surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu indukPenyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 249 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------------|---|--|
| C1 C3 C6 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none">• C1: Kab. Buru*• C3: Kab. Maluku Tengah*• C6: Kab. Kepulauan Tanimbar* <p>Kawasan Rawan Air:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Maluku Barat Daya** <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air</p> | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan Bendungan Way Apu, Bendungan Way Yori dan Bendungan Tanimbar <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, penyediaan infrastruktur desalinasi air laut di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air</p> |
| D1 D2 D3 D4 D5 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none">• D1: PKSN Saumlaki, serta Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Tanimbar Utara (Kab. Kepulauan Tanimbar)• D2: PKSN Ilwaki (Kab. Maluku Barat Daya) <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none">• D3: Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat (Kab. Maluku Tenggara)• D4: Kec. Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir (Kab. Kepulauan Aru)• D5: Kec. Pulau Dullah Selatan (Kota Tual) | <p>Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki dan Ilwaki, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga• Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sentra perikanan budidaya terutama di PKSN, dengan <i>output</i>: peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Saumlaki dan SKPT Moa) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, pengembangan rumah bibit dan penyaluran bibit rumput laut, peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan, serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Tapa, Eray dan Mahaleta, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis• Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku• Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 250 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| D6 | Kawasan Afiriasi Kawasan Perdesaan Prioritas <ul style="list-style-type: none">D6: Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi (Kab. Buru) | Pengembangan Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi melalui: <ul style="list-style-type: none">Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptifPeningkatan aksesibilitas desa, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desaPeningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desaPeningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan <i>output</i>: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan |
| | Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka: <ul style="list-style-type: none">Kab. Buru SelatanKab. Kepulauan Aru (Daerah Tertinggal)Kab. Maluku Barat Daya (Daerah Tertinggal dan PKSN Ilwaki)Kab. Kepulauan Tanimbar (PKSN Saumlaki) Penguatan sekolah terbuka: <ul style="list-style-type: none">Kab. Maluku TenggaraKota Tual | Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui: <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaranPemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmenPemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian program Indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remajaPeningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMAPenyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauhPeningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraanPeningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digitalPenyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan <i>output</i>: pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual |
| | Provinsi Maluku | Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, diantaranya di Kawasan Banda Neira melalui: <ul style="list-style-type: none">Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 251 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya, fasilitasi peningkatan penulisan sejarah lokal, serta monitoring dan evaluasi pelestarian cagar budaya, aset sejarah dan budaya, penyelenggaraan <i>event</i> diplomasi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan (OPK), dan pelestarian objek diduga cagar budaya (ODCB) dan OPK • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Buru • Kab. Buru Selatan • Kab. Seram Bagian Timur • Kab. Kepulauan Aru (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Maluku Barat Daya (Daerah Tertinggal dan PKSN Ilwaki) • Kab. Kepulauan Tanimbar (Kecamatan Perbatasan Prioritas dan PKSN Saumlaki) • Kota Tual (Kecamatan Perbatasan Prioritas) | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan <i>output</i>: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan |
| | Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota | |
| | <p>Penanganan Penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Maluku Tenggara • Kab. Maluku Tengah • Kab. Kepulauan Aru • Kota Tual | <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, serta peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih serta |
| | <p>Penanganan Penyakit Malaria: 8 kabupaten di Provinsi Maluku</p> | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 252 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| | <p>Penanganan Penyakit ISPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Maluku Tengah • Kab. Maluku Barat Daya • Kota Ambon • Kota Tual <p>Penanganan Penyakit pneumonia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Buru • Kab. Kepulauan Aru • Kab. Seram Bagian Timur • Kab. Maluku Barat Daya <p>Penanganan Penyakit rabies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Kepulauan Tanimbar • Kab. Maluku Tengah • Kab. Seram Bagian Barat • Kab. Maluku Barat Daya • Kota Ambon <p>Penanganan penyakit kusta: Provinsi Maluku</p> | <p>optimalisasi data dan informasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian penyakit pneumonia, dengan <i>output</i>: peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit rabies, dengan <i>output</i>: penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan |
| | Provinsi Maluku | <p>Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB |
| | <ul style="list-style-type: none"> • WPP 714 (perbatasan perairan dengan Timor Leste) • WPP 715 (perbatasan perairan dengan Australia) | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pertahanan keamanan melalui peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama, serta pemberantasan praktik IUU Fishing melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan <i>output</i>: pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 253 -

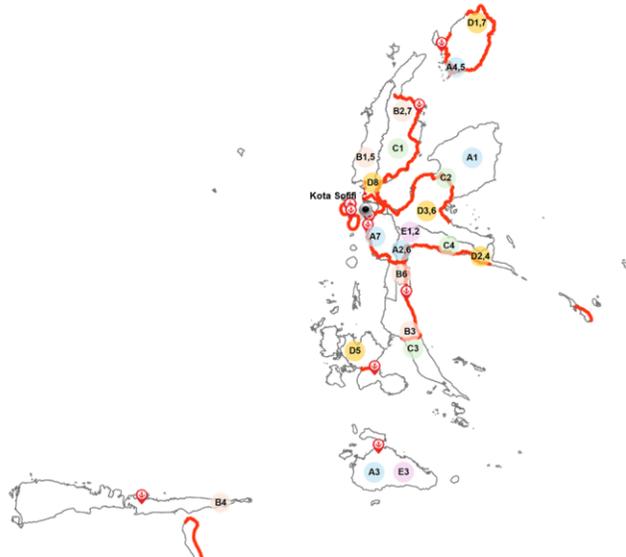
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: operasionalisasi lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI), pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) fishing. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: revitalisasi sarana prasarana serta perawatan armada pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) |
| E1 | Kawasan Konservasi: | Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: |
| E2 | • E1: KKN Laut Banda, | • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21. |
| E3 | • TWA Gunung Api Banda, KK Perairan di Pulau Ay dan Pulau Rhun (Kab. Maluku Tengah) | • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan |
| E4 | • E2: KKD Pulau Kei Kecil (Kab. Maluku Tenggara) | • Pengurangan status keterancam spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i> : inventarisasi keterancam spesies dan konservasi biota yang terancam punah. |
| E5 | • E3: KK Perairan Buano (Kab. Seram Bagian Barat) | • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon |
| | • E4: KK Kepulauan Aru bagian Tenggara (Kab. Kepulauan Aru) | • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) |
| | • E5: KK Perairan Kepulauan Lease (Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah) | • Pengembangan potensi <i>geopark</i> di TWA Gunung Api Banda, dengan <i>output</i> pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata dan fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat |
| | Provinsi Maluku | <p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan <i>nature-based solutions</i>, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 254 -

6.2 Provinsi Maluku Utara



MALUKU UTARA

LEGENDA

-  Kawasan Pertumbuhan
-  Kawasan Komoditas Unggulan
-  Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
-  Kawasan Afirmasi
-  Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
-  Ibu Kota Provinsi
-  Bandar Udara
-  Pelabuhan
-  Jalan Nasional
-  Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
-  Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Industri

1. KI Buli – Kab. Halmahera Timur
2. KI Weda Bay – Kab. Halmahera Tengah
3. KI Pulau Obi – Kab. Halmahera Selatan

Kawasan Pariwisata

4. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Morotai – Kab. Pulau Morotai

Kawasan Perkotaan

5. Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba – Kab. Pulau Morotai
6. Kawasan Perkotaan Weda – Kab. Halmahera Tengah
7. Kota Baru Sofifi – Kota Tidore Kepulauan

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas Kelapa

1. Kab. Halmahera Barat

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kelapa

2. Kab. Halmahera Utara
3. Kab. Halmahera Selatan
4. Kab. Kepulauan Sula

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Pala

5. Kab. Halmahera Barat
6. Kab. Halmahera Tengah
7. Kab. Halmahera Utara

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Halmahera Utara: potensial pangan, potensial energi
2. Kab. Halmahera Timur: potensial pangan
3. Kab. Halmahera Selatan: potensial energi
4. Kab. Halmahera Tengah: potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perbatasan

PKSN dan Wilayah Pendukung

1. PKSN Daruba dan Kec. Morotai Utara – Kab. Pulau Morotai

Kecamatan Perbatasan Prioritas

2. Kec. Patani Utara – Kab. Halmahera Tengah
3. Kec. Maba Utara – Kab. Halmahera Timur

Kawasan Transmigrasi

4. KT Sagea Waleh – Kab. Halmahera Tengah
5. KT Pulau Bacan – Kab. Halmahera Selatan
6. KT Patlean – Kab. Halmahera Timur
7. KT Pulau Morotai – Kab. Pulau Morotai

Kawasan Perdesaan Prioritas

8. Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Halmahera Barat – Kab. Halmahera Barat

E. Kawasan Konservasi

1. TN Aketajawe Lolobata –
 - Kab. Halmahera Tengah,
 - Kab. Halmahera Timur, dan
 - Kab. Tidore Kepulauan
2. SM Goa Bukimoruru – Kab. Halmahera Tengah
3. CA Pulau Obi – Kab. Halmahera Selatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 255 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 11,4 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 77,9 | 0,4 | 4,95 – 5,15 | 0,280 – 0,297 | 0,48 | 86,35 | 80,36 | 3,80 – 4,00 |
| 2029 | 12,7 <small>(2029)</small> | 133,4 | 0,5 | 0,92 – 1,92 | 0,273 – 0,290 | 0,50 | 94,12 | 81,03 | 2,82 – 3,60 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------|---|--|
| A1 A2 A3 | Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> • A1: KI Buli, Kab. Halmahera Timur • A2: KI Weda Bay, Kab. Halmahera Tengah • A3: KI Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan | <p>Optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting dan percepatan hilirisasi industri nikel di KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, perizinan, dan tata ruang KI Pulau Obi, dengan <i>output</i>: percepatan penerapan sistem perizinan terpadu • Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan di sekitar KI Buli dan KI Pulau Obi, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis menuju kawasan industri, peningkatan Jalan Ruas 035 Weda-Sagea, pembangunan alternatif akses jalan Maba-Kawasan Industri, pembangunan Jalan Sofifi-Buli, pembangunan jalan lingkaran Pulau Obi, pengembangan pelabuhan, peningkatan kapasitas air baku, SPAM, air limbah, sistem pengelolaan sampah, akses internet, jaringan listrik tegangan menengah, sarana pemadam kebakaran, pembangunan hunian pekerja, serta pengembangan fasilitas kesehatan primer • Penguatan hilirisasi pertambangan dan turunannya, dengan <i>output</i>: pengembangan smelter pengolahan nikel dan hasil pengolahan sisa industri • Peningkatan investasi dan promosi ekspor, dengan <i>output</i>: fasilitasi investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri • Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan <i>output</i>: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, pengembangan UMKM, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang • Penyediaan SDM berkualitas, dengan <i>output</i>: pendidikan vokasi industri dan pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>, serta fasilitas pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri • Penerapan dekarbonisasi dan ekonomi sirkuler di industri pengolahan nikel dan turunannya, dengan <i>output</i>: percepatan dekarbonisasi dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor industri untuk pemenuhan <i>enhanced</i> NDC dan menuju <i>net zero economy</i>, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung dekarbonisasi industri |
| A4 | Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> • A4: DPP Morotai, Kab. Pulau Morotai (termasuk PKSNDaruba) | <p>Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting di DPP Morotai melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandara Pitu, pengembangan <i>seaplane</i> untuk mendukung pariwisata, penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis, serta pembangunan jembatan untuk mendukung logistik DPP Morotai • Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: penataan kawasan koridor Daname dan Nunuhu, serta pelaksanaan kegiatan (<i>event</i>) festival Pulau Morotai • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: optimalisasi SPAM, TPA Daruba dan Sakita, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 256 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| | | <p>pembangunan TPS-3R, penyediaan kapal angkutan sampah antar pulau, pengelolaan air limbah, serta akses internet</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan <i>output</i>: pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata, serta manajemen kunjungan wisata• Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan <i>output</i>: kerjasama pariwisata dengan negara-negara Pasifik dan Mikronesia, serta promosi investasi dan promosi destinasi terpadu• Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, peningkatan akses pembiayaan modal, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang• Peningkatan pelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa, serta penyediaan jalur evakuasi bencana KTA Moro Point, KTA Rao, KTA Pasifik |
| A5 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none">• A5: Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab. Pulau Morotai) | <p>Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan <i>output</i>: penguatan <i>branding</i> kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota• Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3r, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, PSU bidang perumahan, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya• Penguatan peran kawasan, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan• Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan strategis, pengembangan bandar udara dan pelabuhan |
| A6 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none">• A6: Kawasan Perkotaan Industri Weda (Kab. Halmahera Tengah) | <p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Industri Weda dan penataan kawasan perkotaan di sekitar KI Weda Bay melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan dan penataan infrastruktur perkotaan di sekitar kawasan industri, dengan <i>output</i>: peningkatan sistem pengendalian banjir (<i>urban flood control system</i>), penanganan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pengembangan konsolidasi lahan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembangunan saluran drainase jalan primer dan sekunder, pembangunan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan sampah, pengembangan fasilitas kesehatan primer, serta pembangunan RTH dan ruang terbuka publik• Penguatan peran kawasan, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan• Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan dan penanganan jalan strategis• Pengelolaan masyarakat hukum adat di luar kawasan, dengan <i>output</i>: perlindungan dan penguatan kapasitas masyarakat hukum adat, serta penetapan hutan adat |
| A7 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none">• A7: Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan) | <p>Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan pusat pemerintahan, dengan <i>output</i>: pembangunan bangunan gedung kantor (Polda, Kanwil BPN, BPTD, KOREM TNI-AD, LANAL TNI-AL, Kejaksaan Tinggi, BPKP, PUPR, dan hunian ASN/TNI/Polri) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 257 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan Tajawi-Kobe, peningkatan jalan akses simpul transportasi Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba, pengembangan Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba, serta penataan dan peningkatan Pelabuhan Sofifi • Peningkatan infrastruktur perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM skala kota, SPAL, infrastruktur pengelolaan sampah, pengembangan kawasan perdagangan, serta pembangunan embung Sofifi dan dermaga polisi air |
| B1 B2 B3 B4 | Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kelapa) Sentra Industri <ul style="list-style-type: none"> • B1: Kab. Halmahera Barat Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none"> • B2: Kab. Halmahera Utara • B3: Kab. Halmahera Selatan • B4: Kab. Kepulauan Sula | Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas kelapa melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sentra produksi perkebunan, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, peningkatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kawasan kelapa, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, serta perluasan kebun sumber benih • Pengembangan agroindustri, tata niaga/pemasaran, dan promosi produk, dengan <i>output</i>: pengembangan industri produk turunan kelapa, penguatan inkubator bisnis, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, peningkatan kerja sama perdagangan internasional, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan <i>output</i>: penguatan pendidikan vokasi pertanian dan industri, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja perkebunan • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, peningkatan gudang SRG dengan <i>Warehouse Management System</i> (WMS), penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan ekspor dan investasi dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengelolaan pemanfaatan ruang, dengan <i>output</i>: peningkatan akses reforma agraria terkait kepemilikan dan budidaya lahan perkebunan dalam kawasan hutan • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perkebunan, pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i> |
| B5 B6 B7 | Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas pala) Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none"> • B5: Kab. Halmahera Barat • B6: Kab. Halmahera Tengah • B7: Kab. Halmahera Utara | Penguatan sentra produksi berbasis komoditas pala, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi perkebunan, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, peningkatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kawasan pala, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan, serta perluasan kebun sumber benih • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, peningkatan gudang SRG dengan <i>Warehouse Management System</i> (WMS), penyediaan sarana pascapanen dan sarana pengolahan hasil tanaman perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen • Peningkatan kualitas SDM, dengan <i>output</i>: penguatan pendidikan vokasi pertanian dan industri, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja perkebunan • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk dengan <i>output</i>: pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 258 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|---|--|
| | | <p>pengembangan UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i>, serta pengembangan inovasi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan berbasis rempah |
| | Provinsi Maluku Utara | <p>Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3T, dengan <i>output</i>: pembangunan Jalan Trans Halmahera, penanganan jalan daerah dan jalan 3TP di antaranya di Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Pulau Mangoli, dan Pulau Sulawesi • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: peningkatan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Gita, dan Pelabuhan Daruba, pelayaran kapal Ro-Ro, serta penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan <i>seaplane</i> dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta layanan penyiaran digital |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Halmahera Barat (perkebunan) • Kab. Halmahera Tengah (industri dan pertambangan) • Kab. Halmahera Selatan (pariwisata dan ekonomi kreatif serta (industri dan pertambangan) • Kab. Halmahera Timur (industri dan pertambangan) • Kab. Pulau Morotai (pariwisata dan ekonomi kreatif) | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja |
| C1 C2 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Halmahera Utara* (padi) • C2: Kab. Halmahera Timur* (padi, kedelai, dan pangan akuatik) | <p>Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi dan kedelai) dan pangan akuatik/<i>bluefood</i> berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan produksi pangan, dengan <i>output</i>: optimasi kawasan pertanian padi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 259 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------|---|---|
| | <p>Kawasan Rentan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Kepulauan Sula** (ubi) • Kab. Pulau Taliabu** (ubi dan jagung) <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta penyediaan sarana pra, pasca panen, dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, serta pengadaan gudang lumbung pangan • Penguatan kapasitas SDM (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan), dengan <i>output</i>: penguatan dan pelatihan kelompok tani gap (<i>good agriculture practices</i>), GHP (<i>good handling practices</i>), dan PHT (pengendalian hama terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal <p>Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan ubi dan jagung, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan jalan usaha tani, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan</p> |
| C1 C3 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Halmahera Utara* • C3: Kab. Halmahera Selatan* <p>Kawasan Rendah elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pulau Taliabu** <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT berbasis tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 260 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------|---|---|
| C4 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C4: Kab. Halmahera Tengah* <p>Kawasan Rawan Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Kepulauan Sula** • Kab. Pulau Taliabu** <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan Bendungan Wairoro <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, penyediaan infrastruktur desalinasi air laut di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air</p> |
| D1 D2 D3 | <p>Kawasan Afirmasi</p> <p>Kawasan Perbatasan</p> <p>PKSN dan Wilayah Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: PKSN Daruba, serta Kec. Morotai Utara (Kab. Pulau Morotai) <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • D2: Kec. Patani Utara (Kab. Halmahera Tengah) • D3: Kec. Maba Utara (Kab. Halmahera Timur) | <p>Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sentra perkebunan terintegrasi terutama di PKSN, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, peningkatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kawasan kelapa, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, layanan validasi dan verifikasi pupuk, perluasan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku • Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan <i>platform</i> digital manajemen ASN |
| D4 D5 D6 D7 | <p>Kawasan Afirmasi - Kawasan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D4: KT Sagea Waleh (Kab. Halmahera Tengah) • D5: KT Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan) • D6: KT Patlean (Kab. Halmahera Timur) • D7: KT Pulau Morotai (Kab. Pulau Morotai) | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sagea Waleh, Pulau Bacan, Patlean, dan Pulau Morotai melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian padi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 261 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigrasi |
| D8 | Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> • D8: Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Halmahera Barat | Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Halmahera Barat melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Peningkatan aksesibilitas desa, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa • Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa dan pala, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa • Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan <i>output</i>: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan dan pelaksanaan bantuan sosial adaptif |
| | Penguatan sekolah berpola asrama: <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pulau Taliabu • Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) | Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama dan sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian program Indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan <i>output</i>: pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual |
| | Penguatan sekolah terbuka: <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas) | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 262 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| | Provinsi Maluku Utara | <p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Kepulauan Sula • Kab. Pulau Taliabu • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Layanan Unggulan RS: seluruh kab/kota | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan <i>output</i>: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, serta peningkatan infrastruktur tik untuk mendukung <i>telemedicine</i> • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan |
| | <p>Penanganan Penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Halmahera Utara • Kab. Halmahera Timur | <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 263 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| | Penanganan Penyakit Malaria: | malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, serta peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL |
| | <ul style="list-style-type: none">• Kab. Halmahera Selatan• Kab. Halmahera Utara• Kab. Halmahera Timur• Kab. Pulau Taliabu | <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih serta optimalisasi data dan informasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak• Pencegahan dan pengendalian penyakit pneumonia, dengan <i>output</i>: peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia |
| | Penanganan Penyakit ISPA: | <ul style="list-style-type: none">• Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Eliminasi penyakit rabies, dengan <i>output</i>: penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan |
| | <ul style="list-style-type: none">• Kab. Halmahera Barat• Kab. Halmahera Tengah• Kab. Halmahera Utara | |
| | Penanganan Penyakit pneumonia: | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Kab. Halmahera Barat• Kab. Halmahera Utara• Kota Ternate• Kota Tidore Kepulauan | |
| | Penanganan Penyakit Rabies: | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Kab. Halmahera Barat• Kab. Halmahera Tengah• Kab. Halmahera Selatan• Kab. Halmahera Utara• Kab. Halmahera Timur• Kab. Pulau Morotai• Kota Ternate | |
| | Penanganan Penyakit Kusta: Provinsi Maluku Utara | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">Kab. Halmahera TengahKab. Halmahera TimurKab. Kepulauan SulaKab. Pulau Taliabu | <p>Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALPeningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi, kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makanPeningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB |
| | <ul style="list-style-type: none">WPP 716 (perbatasan perairan dengan Filipina)WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) | <p>Penguatan pertahanan keamanan melalui peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama serta pemberantasan praktik IUU <i>Fishing</i> melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan <i>output</i>: pengawasan sumber daya kelautan dan perikananPenyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan palauPenguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: operasionalisasi lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI), pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) <i>fishing</i>.Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: revitalisasi sarana prasarana serta perawatan armada pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) |
| E1 | Kawasan Konservasi: | Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: |
| E2 | <ul style="list-style-type: none">E1: Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur, dan Kab. Tidore Kepulauan) | <ul style="list-style-type: none">Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganannya usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21. |
| E3 | <ul style="list-style-type: none">E2: Suaka Margasatwa Goa Bukimoruru (Kab. Halmahera Tengah)E3: Cagar Alam Pulau Obi (Kab. Halmahera Selatan) | <ul style="list-style-type: none">Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasanPengurangan status keterancam spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancam spesies dan konservasi biota yang terancam punah.Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbonPeningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 265 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-----------------------|--|
| | Provinsi Maluku Utara | <p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim• Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan <i>nature-based solutions</i>, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove• Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan jalur jelajah satwa• Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang |

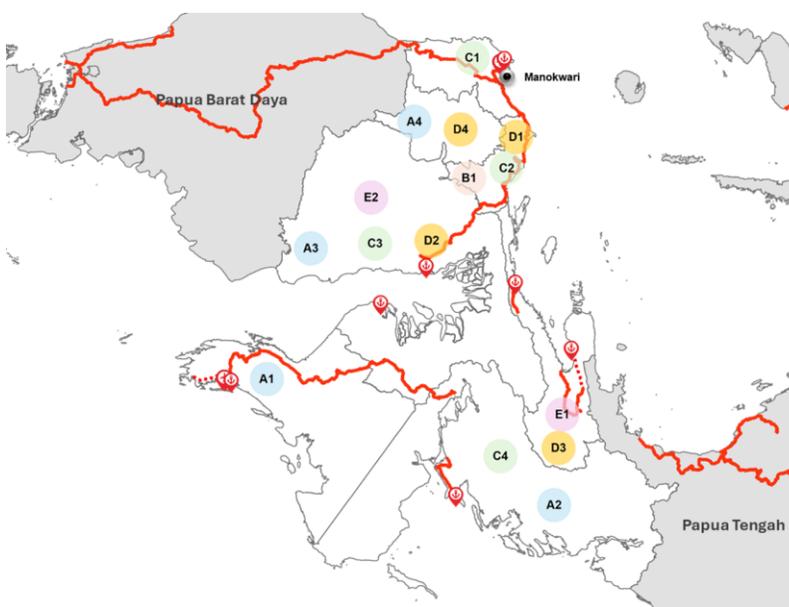


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

7. Wilayah Papua

7.1 Provinsi Papua Barat



PAPUA BARAT

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Industri

1. KI Fakfak – Kab. Fakfak

Kawasan Pariwisata

2. Kawasan Pariwisata Teluk Triton – Kab. Kaimana

Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3. Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Migas – Kab. Teluk Bintuni

Kawasan Perkotaan

4. Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi – Kab. Pegunungan Arfak

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kakao

1. Kab. Manokwari Selatan

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*

1. Kab. Manokwari Selatan
2. Kab. Teluk Bintuni
3. Kab. Teluk Wondama
4. Kab. Pegunungan Arfak

*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Manokwari: potensial pangan, potensial energi
2. Kab. Manokwari Selatan: potensial pangan
3. Kab. Teluk Bintuni: potensial air, potensial energi
4. Kab. Kaimana: potensial air

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

1. TN Teluk Cenderawasih – Kab. Teluk Wondama
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni – Kab. Teluk Bintuni, Kab. Fakfak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 267 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|---|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 5,7 | 120,6 | 0,3 | 19,62 – 20,12 | 0,370 – 0,380 | 0,47 | 1,08 | 82,89 | 3,75 – 4,06 |
| 2029 <small>(2029)</small> | 6,6 | 164,0 | 0,3 | 13,76 – 14,76 | 0,331 – 0,335 | 0,49 | 23,09 | 83,53 | 3,68 – 4,00 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| A1 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A1: KI Fakfak (Kab. Fakfak) | <p>Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di KI Fakfak dan percepatan hilirisasi industri petrokimia dalam memperkuat industri pupuk dalam negeri, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, perizinan, dan tata ruang kawasan industri, dengan <i>output</i>: penyusunan masterplan dan studi kelayakan, serta percepatan penerapan sistem perizinan terpadu Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di sekitar kawasan industri, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis, pembangunan spam, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik, bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja, pengembangan fasilitas kesehatan primer, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta perluasan layanan penyiaran digital Peningkatan investasi dan promosi ekspor, dengan <i>output</i>: fasilitasi investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri petrokimia, serta operasionalisasi dan peningkatan investasi kawasan industri di luar Jawa Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan <i>output</i>: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka Penyediaan SDM berkualitas mendukung kawasan industri, dengan <i>output</i>: fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat |
| A2 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A2: Kawasan Pariwisata Teluk Triton (Kab. Kaimana) | <p>Penyiapan kawasan pariwisata Teluk Triton di Kab. Kaimana, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendukung <i>event</i> daerah serta pengembangan desa wisata Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 268 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| A3 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none">A3: Kawasan pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kab. Teluk Bintuni) | <p>Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui hilirisasi industri berbasis SDA (minyak dan gas bumi) berorientasi ekspor di Kab. Teluk Bintuni, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (<i>Carbon Capture, Utilization, and Storage</i>), dan <i>Compression</i> (UCC Project), serta pengembangan lapangan gas Asap, Kido, dan Merah (AKM)Peningkatan investasi dan eksporFasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan <i>output</i>: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan anekaPeningkatan SDM berkualitas, dengan <i>output</i> fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, serta pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>Penguatan implementasi penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan migas |
| A4 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none">A4: Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab. Pegunungan Arfak) | <p>Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara AnggiPeningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, pembangunan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadayaPenataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan <i>output</i>: penataan kawasan, penguatan <i>branding</i> kawasan, dan penguatan promosi daya tarik kota |
| B1 | <p>Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas kakao)</p> <p>Sentra Produksi</p> <ul style="list-style-type: none">B1: Kab. Manokwari Selatan | <p>Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kakao, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan produksi perkebunan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan kakao, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunanPengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan <i>output</i>: pendampingan/penerapan sertifikasi/pengembangan produk, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyatPeningkatan kualitas SDM, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petaniPembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepatPeningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modalPengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 269 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------|---|---|
| | Provinsi Papua Barat | <p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis dan jalan trans, dengan <i>output</i>: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas Jalan Windesi-Ambuni dan ruas Jalan Mamah-Windesi (Werabur), pembangunan jalan akses Bandar Udara Rendani, penanganan jalan daerah, dan peningkatan layanan angkutan jalan perintis • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas Pelabuhan Manokwari di Kab. Manokwari, pengembangan fasilitas Pelabuhan Teluk Patipi dan Pelabuhan Fakfak di Kab. Fakfak, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Bintuni dan Pelabuhan Babo di Kab. Teluk Bintuni, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Oransbari di Kab. Manokwari Selatan, lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kab. Kaimana, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyeberangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Rendani di Kab. Manokwari, Bandar Udara Anggi di Kab. Pegunungan Arfak, Bandar Udara Wasior Baru-Teluk Wondama, Bandar Udara Abresso-Manokwari Selatan, Bandar Udara Babo di Kab. Teluk Bintuni, dan Bandar Udara Siboru di Kab. Fakfak, serta pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, terutama pada titik layanan publik, dengan <i>output</i>: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Manokwari Selatan (perkebunan) • Kab. Kaimana (pariwisata) • Kab. Pegunungan Arfak (pariwisata) • Kab. Fakfak (industri pengolahan) • Kab. Teluk Bintuni (industri pengolahan) | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata, serta industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai pelatihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja |
| C1 C2 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Manokwari* (padi dan pangan akuatik) | <p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik / <i>bluefood</i> berbasis perikanan tangkap melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan produksi, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan padi,, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 270 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • C2: Kab. Manokwari Selatan* (padi) <p style="margin-left: 20px;">Kawasan Rentan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pegunungan Arfak** (ubi dan hortikultura) • Kab. Teluk Wondama** (sagu dan pangan akuatik) <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p> | <p>pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, pemberian pupuk bersubsidi, serta penyaluran benih ikan air laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan) yang terlatih GAP (<i>Good Agriculture Practices</i>), GHP (<i>Good Handling Practices</i>), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (<i>good agriculture practices</i>), GHP (<i>good handling practices</i>), dan PHT (pengendalian hama terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik <p>Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan ubi, hortikultura, sagu, dan pangan akuatik, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan</p> |
| C1 C3 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Manokwari* • C3: Kab. Teluk Bintuni* <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pegunungan Arfak** • Kab. Teluk Wondama** <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi</p> | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, serta pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|--|---|--|
| C3 C4 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air</p> <ul style="list-style-type: none">C3: Kab. Teluk Bintuni*C4: Kab. Kaimana* <p>Kawasan Rawan Air</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Manokwari**Kab. Manokwari Selatan** | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan embung dan tampungan air lainnya <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air</p> |
| <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air</p> | | |
| D1 D2 D3 D4 | <p>Kawasan Afiriasi Daerah Tertinggal*:</p> <ul style="list-style-type: none">D1: Kab. Manokwari Selatan (kakao)D2: Kab. Teluk Bintuni (udang dan kepiting)D3: Kab. Teluk Wondama (perikanan dan rumput laut)D4: Kab. Pegunungan Arfak (hortikultura dan pariwisata Danau Anggi Giji dan Anggi Gida) | <p>Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptifPenguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta penataan pariwisata rintisan, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan sarana budi daya perikanan yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha, peningkatan akses pembiayaan modal, pendukung <i>event</i> daerah serta pengembangan desa wisata, serta pengembangan UMKM lokal, serta peningkatan daya saing masyarakatPemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan akses simpul ekonomi; serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udaraPengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana |
| <p>Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal</p> | | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 272 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | <p>Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah sepanjang hari:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal) | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran |
| | <p>Pengembangan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Teluk Wondama (Daerah Tertinggal)Kab. Manokwari | <ul style="list-style-type: none">Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmenpemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) |
| | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none">Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat | <ul style="list-style-type: none">Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMAPenyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengahPeningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraanPeningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digitalPenyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual |
| | <p>Provinsi Papua Barat</p> | <p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaanPelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budayaPengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokalPelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah |
| | <p>Pelayanan kesehatan bergerak:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Teluk Bintuni (Daerah Tertinggal)Kab. KaimanaKab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal) | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah PapuaPenguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 273 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| | <p>Percepatan operasionalisasi RSUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal) <p>Peningkatan RS dari tipe D menjadi Tipe C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal) • Kab. Kaimana <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat | <p>kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Pegunungan Arfak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Penurunan kematian ibu dan anak melalui peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas layanan |
| | <p>Pengendalian penyakit malaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Manokwari • Kab. Manokwari Selatan • Kab. Teluk Bintuni • Kab. Teluk Wondama • Kab. Fakfak • Kab. Kaimana <p>Pengendalian penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Teluk Bintuni • Kab. Manokwari Selatan • Kab. Pegunungan Arfak <p>Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Barat</p> | <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS |
| | <p>Provinsi Papua Barat</p> | <p>Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan• Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB• Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi |
| | <p>Pemberantasan IUU Fishing:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) <p>Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provinsi Papua Barat | <p>Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU Fishing pada WPP 717, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan laut, dengan <i>output</i>: peningkatan operasi kapal dan <i>speedboat</i> pengawas, serta patroli mandiri• Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) fishing.• Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)• Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan <i>output</i>: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua• Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut |
| | <p>Provinsi Papua Barat</p> | <p>Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah ulayat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat• Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil• Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat |
| E1 | <p>Kawasan Konservasi:</p> | <p>Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui:</p> |
| E2 | <ul style="list-style-type: none">• E1: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Teluk Wondama)• E2: Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Fakfak) | <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21.• Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 275 -

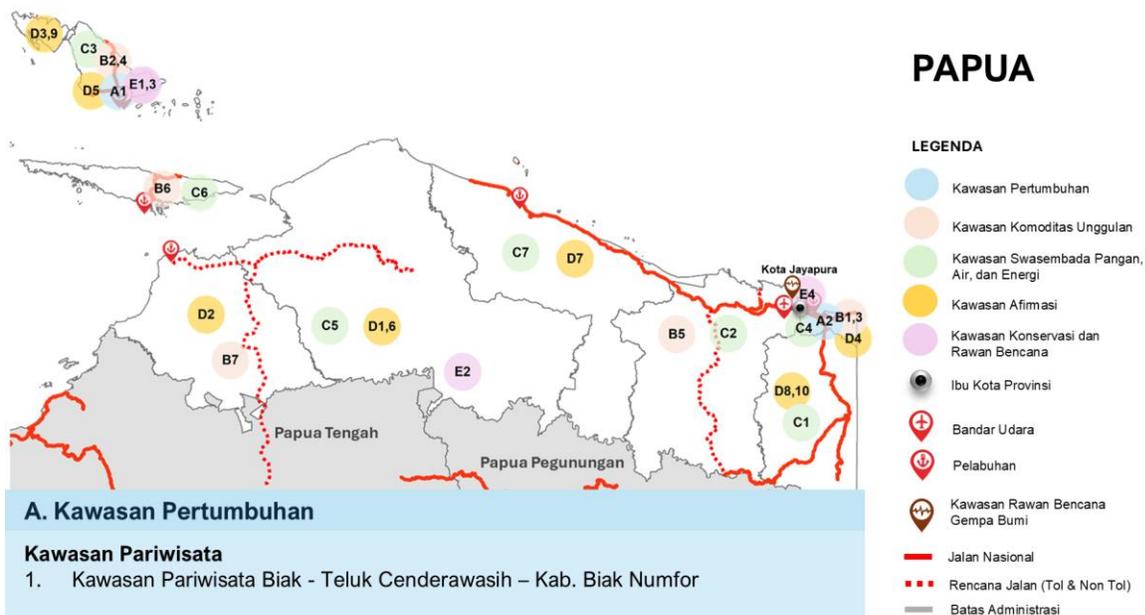
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|----------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah.• Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)• Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem |
| | Provinsi Papua Barat | <p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim• Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta penerapan <i>nature-based solutions</i>, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove• Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa• Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang |
| | Provinsi Papua Barat | <p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah• Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah• Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: peningkatan portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS• Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

7.2 Provinsi Papua



A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata

1. Kawasan Pariwisata Biak - Teluk Cenderawasih – Kab. Biak Numfor

Kawasan Perkotaan

2. Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura – Kota Jayapura

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT

1. Kota Jayapura
2. Kab. Biak Numfor

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT

3. Kota Jayapura
4. Kab. Biak Numfor
5. Kab. Jayapura
6. Kab. Kepulauan Yapen
7. Kab. Waropen

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Keerom: KSPP
2. Kab. Jayapura: potensial pangan, potensial air
3. Kab. Biak Numfor: potensial pangan
4. Kota Jayapura: potensial pangan, potensial energi
5. Kab. Mamberamo Raya: potensial energi, potensial air
6. Kab. Kepulauan Yapen: potensial pangan
7. Kab. Sarmi: potensial pangan

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*

1. Kab. Mamberamo Raya
2. Kab. Waropen
3. Kab. Supiori

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan

PKSN dan Wilayah Pendukung

4. PKSN Jayapura – Kota Jayapura
5. PKSN Biak – Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, dan Kec. Bondifuar – Kab. Biak Numfor

Kecamatan Perbatasan Prioritas

6. Kec. Sawai – Kab. Mamberamo Raya
7. Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat – Kab. Sarmi
8. Kec. Towe, Kec. Waris – Kab. Keerom
9. Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri – Kab. Supiori

Kawasan Transmigrasi

10. KT Senggi – Kab. Keerom

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi

1. TN Teluk Cenderawasih – Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen
2. TN Mamberamo Foja – Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi
3. KKN Padaido – Kab. Biak Numfor

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

4. Kota Jayapura



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 277 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 6,4 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 88,0 | 0,4 | 16,00 – 16,50 | 0,380 – 0,383 | 0,44 | 59,28 | 82,19 | 6,00 – 6,40 |
| 2029 | 7,3 <small>(2029)</small> | 126,9 | 0,4 | 12,65 – 13,65 | 0,355 – 0,359 | 0,47 | 78,99 | 82,83 | 5,48 – 6,00 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| A1 | Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> A1: Kawasan Pariwisata Biak-Teluk Cenderawasih (Kab. Biak Numfor) | <p>Penyiapan kawasan pariwisata Biak-Teluk Cenderawasih di Kab. Biak Numfor, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendukung <i>event</i> daerah dan pengembangan desa wisata Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM dan sistem pengelolaan air limbah domestik Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan bumkam |
| A2 | Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> A2: Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura (Kota Jayapura) | <p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i>: rencana induk (masterplan) Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan <i>output</i>: penguatan <i>branding</i> kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya |
| B1 | Kawasan Komoditas Unggulan: | <p>Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan sentra produksi perikanan, dengan <i>output</i>: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi logistik produk, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, penumbuhan eksportir, industrialisasi koperasi melalui rantai pasok produksi, pembentukan dan penguatan |
| B2 | (Komoditas tuna-cakalang-tongkol) | |
| B3 | | |
| B4 | | |
| B5 | Sentra Industri | |
| B6 | <ul style="list-style-type: none"> B1: Kota Jayapura | |
| B7 | <ul style="list-style-type: none"> B2: Kab. Biak Numfor | |
| | Sentra Produksi | |
| | <ul style="list-style-type: none"> B3: Kota Jayapura | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 278 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • B4: Kab. Biak Numfor • B5: Kab. Jayapura • B6: Kab. Kepulauan Yapen • B7: Kab. Waropen | <ul style="list-style-type: none"> koperasi, pelaku usaha, UMKM dalam rantai pasok, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan <i>output</i>: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan <i>output</i>: hilirisasi produk akuakultur dan produk hilirisasi pangan hasil laut, pemberian bantuan pendanaan <i>matching fund</i> (BOPTN Penelitian) terkait produk hilirisasi kelautan perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital |
| | Provinsi Papua | <p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan <i>output</i>: pembangunan jembatan strategis, penanganan jalan daerah, serta pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong ruas jalan Jayapura–Sarmi • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: <i>replacement</i> fasilitas Pelabuhan Sarmi di Kab. Sarmi, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Padaido dan Pelabuhan Pulau Owi di Kab. Biak Numfor, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Serui di Kab. Kepulauan Yapen, pembangunan fasilitas Pelabuhan Marsram di Kab. Supiori, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyebrangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Numfor di Kab. Biak Numfor dan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan <i>output</i>: pembangunan BTS 4G/<i>Lastmile</i> dan peningkatan akses internet, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Jayapura (perikanan) • Kab. Biak Numfor (perikanan, dan pariwisata) • Kota Jayapura (perikanan) • Kab. Kepulauan Yapen (perikanan) • Kab. Waropen (perikanan) | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan dan pariwisata) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 279 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja |
| C1 | Kawasan Potensial Swasembada Pangan: <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Keerom | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kab. Keerom yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan pengembangan kawasan, dengan <i>output</i>: optimasi lahan menjadi produktif, pembangunan embung pertanian dan non pertanian, penyiapan jaringan drainase dan irigasi, konektivitas transportasi desa, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP • Peningkatan produksi, dengan <i>output</i>: penyaluran benih jagung berkualitas, areal pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan, dan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, serta alat dan mesin pertanian • Penguatan pascapanen dan tata kelola, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i> • Pencetakan sawah • Pembangunan Bandara Senggi (Kab. Keerom) dalam rangka mendukung KSPP Keerom |
| C2 | Kawasan Potensial Swasembada Pangan: | Penguatan kawasan swasembada pangan padi dan pangan akuatik/ <i>bluefood</i> berbasis perikanan tangkap, melalui: |
| C3 | | |
| C4 | <ul style="list-style-type: none"> • C2: Kab. Jayapura* (padi dan pangan akuatik) | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan produksi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian pra panen, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan |
| C6 | | |
| C7 | <ul style="list-style-type: none"> • C3: Kab. Biak Numfor* (pangan akuatik) • C4: Kota Jayapura* (padi dan pangan akuatik) • C6: Kab. Kepulauan Yapen* (pangan akuatik) • C7: Kab. Sarmi* (pangan akuatik) | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (<i>Good Agriculture Practices</i>), GHP (<i>Good Handling Practices</i>), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pelatihan kelompok tani, penyediaan inkubator usaha koperasi, pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik |
| | Kawasan Rentan Pangan: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Mamberamo Raya** (padi) • Kab. Supiori** (padi) | |
| | Keterangan: | Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i> : pengembangan kawasan padi, |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|--|--|
| | <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p> | <p>pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan</p> |
| C2 C5 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none">C2: Kota Jayapura*C5: Kab. Mamberamo Raya* <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Supiori**Kab. Kepulauan Yapen** <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik</p> | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), penyiapan pembangunan pabrik <i>ethanol</i> dalam rangka industrialisasi energi, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu indukPenyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p> |
| C5 C2 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none">C2: Kab. Jayapura*C5: Kab. Mamberamo Raya* <p>Kawasan Rawan Air:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Keerom**Kab. Biak Numfor** <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super</p> | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya, dengan <i>output</i>: pembangunan embung dan tampungan air lainnya <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, penyediaan infrastruktur desalinasi di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air</p> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 281 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| | prioritas ketahanan iklim bidang air | |
| D1 | Kawasan Afirmasi | <p>Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian terintegrasi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pengembangan UMKM lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, serta penyediaan dan pengawasan infrastruktur sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana |
| D2 | Daerah Tertinggal*: | |
| D3 | <ul style="list-style-type: none"> • D1: Kab. Mamberamo Raya (sagu dan kakao) • D2: Kab. Waropen (kakao dan kelapa) • D3: Kab. Supiori (kelapa) | |
| | Keterangan: | |
| | *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal | |
| D4 | Kawasan Afirmasi | <p>Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Biak, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan <i>output</i>: peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Jayapura dan SKPT Biak) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua • Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara |
| D5 | Kawasan Perbatasan: | |
| D6 | PKSN dan Wilayah | |
| D7 | Pendukung | |
| D8 | <ul style="list-style-type: none"> • D4: PKSN Jayapura (Kota Jayapura) | |
| D9 | <ul style="list-style-type: none"> • D5: PKSN Biak, Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, Kec. Bondifuar (Kab. Biak Numfor) | |
| | Kecamatan Perbatasan Prioritas | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • D6: Kec. Sawai (Kab. Mamberamo Raya) • D7: Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat (Kab. Sarmi) | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 282 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|-----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">D8: Kec. Towe, Kec. Waris (Kab. Keerom)D9: Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri (Kab. Supiori) | |
| D10 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none">D10: KT Senggi (Kab. Keerom) | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, sarana permukiman di kawasan transmigrasi, serta perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digitalPengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian padi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman panganRedistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasiPenataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigranPenyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan <i>output</i>: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di kawasan transmigrasi |
| | <p>Pengembangan sekolah terbuka:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) <p>Pengembangan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)Kab. Waropen (Daerah Tertinggal)Kab. JayapuraKota Jayapura (PKSN Jayapura) <p>Pengembangan sekolah sepanjang hari:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)Kota Jayapura (PKSN Jayapura) | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaranPemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmenPemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMAPenyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengahPeningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraanPeningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digitalPenyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 283 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none">Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua | |
| | <p>Provinsi Papua</p> | <p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaanPelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budayaPengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokalPelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah |
| | <p>Pelayanan kesehatan bergerak:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) <p>Pembangunan RSUD kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) <p>Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Keerom (Kecamatan Perbatasan Prioritas)Kab. Waropen (Daerah Tertinggal)Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayahPendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah PapuaPemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatanPeningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. SupioriPengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatanPenurunan kematian ibu dan anak melalui peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas layanan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 284 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Sarmi (Kecamatan Perbatasan Prioritas) <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua | |
| | <p>Pengendalian penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Jayapura• Kab. Kepulauan Yapen• Kab. Biak Numfor• Kab. Sarmi• Kab. Waropen• Kab. Supiori <p>Pengendalian penyakit malaria:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Keerom• Kab. Jayapura• Kab. Sarmi• Kab. Mamberamo Raya• Kab. Waropen• Kab. Kepulauan Yapen• Kab. Biak Numfor• Kab. Supiori• Kota Jayapura <p>Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provinsi Papua | <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak• Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data |
| | <p>Provinsi Papua</p> | <p>Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua• Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 285 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi |
| | Pemberantasan IUU <i>Fishing</i> : <ul style="list-style-type: none"> • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Papua | Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU <i>Fishing</i> pada WPP 717, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan <i>output</i>: peningkatan operasi kapal dan <i>speedboat</i> pengawas, serta patroli mandiri • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) <i>fishing</i>. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) • Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan <i>output</i>: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua • Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut |
| | Provinsi Papua | Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT) • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat, dengan <i>output</i>: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat |
| E1 E2 E3 | Kawasan Konservasi: <ul style="list-style-type: none"> • E1: TN Teluk Cendrawasih (Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen) | Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21. |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 286 -

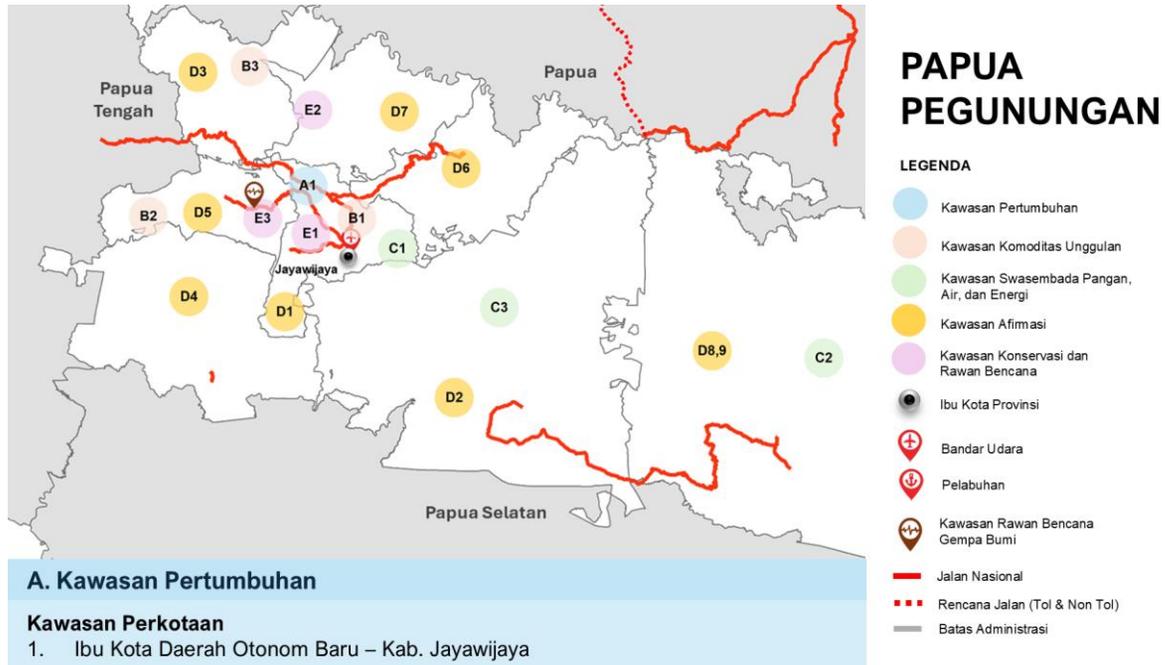
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, dan Kab. Keerom) • E3: KKN Padaido (Kab. Biak Numfor) | <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem |
| E4 | <p>Lingkungan Hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Papua <p>Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E4: Kota Jayapura | <p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pemberian fasilitasi dan pembinaan dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan |
| | Provinsi Papua | <p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPP sebagai <i>platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 287 -

7.3 Provinsi Papua Pegunungan



B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kopi

- Kab. Jayawijaya
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Tolikara

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

- Kab. Jayawijaya: potensial pangan dan potensial energi
- Kab. Pegunungan Bintang: potensial air
- Kab. Yahukimo: potensial air

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi

- TN Lorentz –Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, dan Kab. Lanny Jaya
- TN Mamberamo Foja – Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang, dan Kab. Tolikara

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

- Kab. Lanny Jaya

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*

- Kab. Jayawijaya
- Kab. Yahukimo
- Kab. Tolikara
- Kab. Nduga
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Yalimo
- Kab. Mamberamo Tengah
- Kab. Pegunungan Bintang

*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal

Kawasan Perbatasan

Kecamatan Perbatasan Prioritas

- Kec. Iwur, Kec. Tarup, Kec. Oksibil, Kec. Oksamol, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Batom, Kec. Mofinop, dan Kec. Murkim – Kab. Pegunungan Bintang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 288 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 7,0 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 19,1 | 0,1 | 30,00 – 31,00 | 0,377 – 0,383 | 0,43 | 59,28 | 83,53 | 1,75 – 2,10 |
| 2029 | 8,0 <small>(2029)</small> | 28,6 | 0,1 | 17,50 – 18,50 | 0,339 – 0,343 | 0,45 | 78,99 | 84,15 | 1,68 – 2,00 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------|--|---|
| A1 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A1: Ibu Kota Daerah Otonom Baru (Kab. Jayawijaya) | <p>Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan, serta pembebasan lahan Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i>: rencana induk (masterplan) Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Wamena Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya Penataan kawasan |
| B1 B2 B3 | <p>Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kopi)</p> <p>Sentra Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> B1: Kab. Jayawijaya B2: Kab. Lanny Jaya B3: Kab. Tolikara | <p>Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kopi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi perkebunan, dengan <i>output</i>: percepatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan lahan, pemberian bibit unggul tanaman, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan <i>output</i>: pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, informasi pasar, promosi dan pemasaran, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat Peningkatan kualitas SDM, dengan <i>output</i>: pengembangan studi vokasi yang menerapkan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja, pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>, serta fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pedesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 289 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan dengan <i>output</i>: penjaminan HAKI, kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual serta peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i> serta peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) |
| | Provinsi Papua Pegunungan | <p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan <i>output</i>: penanganan jalan daerah dan pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (Towe Hitam–Oksibil, Jayapura–Wamena, dan Karubaga–Ilu–Mulia) • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai dan Bandar Udara Sobaham di Kab. Yahukimo, Bandar Udara Wamena di Kab. Jayawijaya, Bandar Udara Elelim di Kab. Yalimo, Bandar Udara Oksibil, Bandar Udara Batom, Bandar Udara Kiworok di Kab. Pegunungan Bintang, pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo, serta pengembangan angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan <i>output</i>: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Jayawijaya (perkebunan) • Kab. Lanny Jaya (perkebunan) • Kab. Tolikara (perkebunan) | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah perkebunan sesuai kebutuhan DUDI, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, dan revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja |
| C1 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Jayawijaya* (padi, ubi, | <p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi dan ubi), hortikultura, dan peternakan (babi) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan produksi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pemberian pupuk bersubsidi dan bibit |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 290 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | <p>hortikultura, dan babi)</p> <p>Kawasan Rentan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Mamberamo Tengah** (padi) • Kab. Nduga** (padi) <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi</p> <p>** Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p> | <p>unggul tanaman, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura, serta bantuan ternak babi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi. • Penguatan kapasitas SDM (petani dan peternak), dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk <i>GAP (Good Agriculture Practices)</i>, <i>GHP (Good Handling Practices)</i>, dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan peternak yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i> pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis dan penguatan usaha koperasi melalui inkubator, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik <p>Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan sagu dan padi, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan</p> |
| C1 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Jayawijaya* <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pegunungan Bintang** • Kab. Yalimo** <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>** Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik</p> | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial energi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 291 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|--|---|---|
| C2 C3 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C2: Kab. Pegunungan Bintang* • C3: Kab. Yahukimo* <p>Kawasan Rawan Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Tolikara** • Kab. Lanny Jaya** <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air</p> | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan tampungan air <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air</p> |
| D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 | <p>Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: Kab. Jayawijaya* (kopi dan pariwisata budaya Lembah Baliem) • D2: Kab. Yahukimo* (Kopi) • D3: Kab. Tolikara* (Kopi) • D4: Kab. Nduga* (Kopi) • D5: Kab. Lanny Jaya* (Kopi) • D6: Kab. Yalimo* (Kopi) • D7: Kab. Mamberamo Tengah* (Kopi) • D8: Kab. Pegunungan Bintang* (Kopi) <p>Keterangan:</p> <p>*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal</p> | <p>Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan penataan pariwisata rintisan, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pendukung <i>event</i> daerah serta pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan akses simpul ekonomi; serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana |
| D9 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan</p> | <p>Pengembangan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, melalui:</p> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 292 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none">D9: Kec. Iwur, Kec. Tarup, Kec. Oksibil, Kec. Oksamol, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Batom, Kec. Mofinop, dan Kec. Murkim (Kab. Pegunungan Bintang) | <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrikPenataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan negara di Provinsi Papua PegununganPenguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: <i>Piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara |
| | <p>Pengembangan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal)Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaranPemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmenPemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) |
| | <p>Pengembangan sekolah terbuka:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Tolikara (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Mamberamo Tengah (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Yalimo (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Nduga (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal) | <ul style="list-style-type: none">Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMAPenyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengahPeningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraanPeningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digitalPenyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual |
| | <p>Pengembangan sekolah sepanjang hari:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal) | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 293 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: <ul style="list-style-type: none">Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan | |
| | Provinsi Papua Pegunungan <ul style="list-style-type: none">Kab. Jayawijaya (Tradisi dan Budaya Lembah Baliem) | Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Lembah Baliem, melalui: <ul style="list-style-type: none">Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaanPelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budayaPengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokalPelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah |
| | Pelayanan kesehatan bergerak: <ul style="list-style-type: none">Kab. Yalimo (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Nduga (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: <ul style="list-style-type: none">Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah PapuaPeningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua PegununganPemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatanPenyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayahPengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan |
| | Pembangunan RSUD provinsi <ul style="list-style-type: none">Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal) | |
| | Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: <ul style="list-style-type: none">Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal)Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal) | |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 294 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Mamberamo Tengah (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan | |
| | <p>Pengendalian penyakit malaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Jayawijaya • Kab. Pegunungan Bintang • Kab. Tolikara • Kab. Nduga • Kab. Lanny Jaya • Kab. Mamberamo Tengah • Kab. Yalimo • Kab. Yahukimo <p>Pengendalian penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Pegunungan Bintang • Kab. Yalimo <p>Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Papua Pegunungan | <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data |
| | <p>Provinsi Papua Pegunungan</p> | <p>Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 295 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | | <p>gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB• Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi |
| | Provinsi Papua Pegunungan | <p>Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan pertahanan keamanan Papua dengan <i>output</i> operasi intelijen kontra separatisme• Pembentukan keamanan berbasis komunitas, dengan <i>output</i>: penguatan Sistem Keamanan Lokal (Poskamling) dan peningkatan kerja sama TNI dan Polri dengan masyarakat lokal• Pemberdayaan pemuda terutama OAP untuk meningkatkan pertahanan keamanan distrik, dengan <i>output</i>: pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan serta pelatihan bela negara• Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan <i>output</i>: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua |
| | Provinsi Papua Pegunungan | <p>Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah/ulayat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat• Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT)• Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat, dengan <i>output</i>: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat |
| E1 | Kawasan Konservasi: | Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: |
| E2 | <ul style="list-style-type: none">• E1: TN Lorentz (Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, dan Kab. Lanny Jaya)• E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yalimo, dan Kab. Tolikara) | <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganannya usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21• Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi• Pengurangan status keterancamannya spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancamannya spesies dan konservasi biota yang terancam punah• Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 296 -

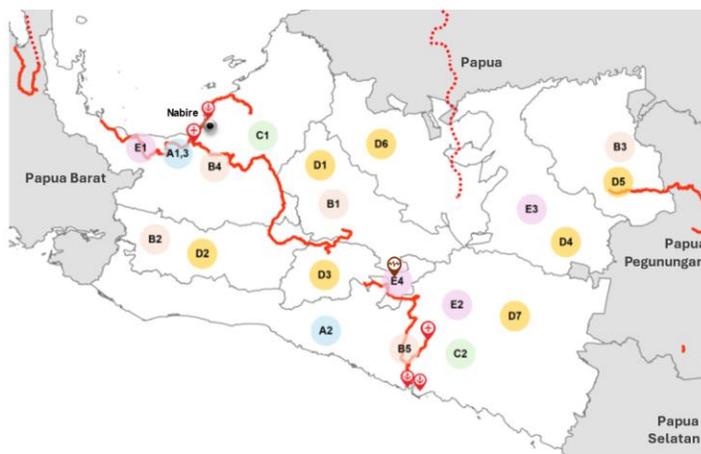
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | | masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem |
| E3 | Lingkungan Hidup: <ul style="list-style-type: none">• Provinsi Papua Pegunungan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: <ul style="list-style-type: none">• E3: Lanny Jaya | Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim• Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan <i>nature-based solutions</i>, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik• Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa• Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan |
| | Provinsi Papua Pegunungan | Peningkatan <i>smart government</i> , penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah• Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru• Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah• Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: peningkatan portal pelayanan publik dan penerapan PTSP berbasis OSS di daerah• Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 297 -

7.4 Provinsi Papua Tengah



PAPUA TENGAH

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata

1. Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih – Kab. Nabire

Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak

2. Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak - Kab. Mimika

Kawasan Perkotaan

3. Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Nabire

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kopi

1. Kab. Paniai
2. Kab. Dogiyai
3. Kab. Puncak Jaya

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT

4. Kab. Nabire
5. Kab. Mimika

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Nabire: potensial pangan, potensial energi, potensial air
2. Kab. Mimika: potensial pangan, potensial energi, potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*

1. Kab. Paniai
2. Kab. Dogiyai
3. Kab. Deiyai
4. Kab. Puncak
5. Kab. Puncak Jaya
6. Kab. Intan Jaya

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan

Kecamatan Perbatasan Prioritas

7. Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita – Kab. Mimika

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi

1. TN Teluk Cenderawasih – Kab. Nabire
2. TN Lorentz – Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya
3. TN Mamberamo Foja – Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

4. Kab. Deiyai



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 298 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 7,7 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 119,5 | 0,7 | 26,50 – 27,00 | 0,380 – 0,383 | 0,42 | 59,28 | 82,56 | 2,65 – 3,12 |
| 2029 | 8,6 <small>(2029)</small> | 179,4 | 0,8 | 15,50 – 16,50 | 0,374 – 0,380 | 0,45 | 78,99 | 83,20 | 2,00 – 2,40 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| A3 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A3: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire) | <p>Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i>: rencana induk (masterplan) Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Douw Aturure Nabire Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya Penataan kawasan |
| A1 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A1: Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire) | <p>Penyiapan kawasan pariwisata TN Teluk Cenderawasih di Kab. Nabire, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendukung <i>event</i> daerah dan pengembangan desa wisata Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam |
| A2 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A2: Kawasan pertambangan emas-tembaga-perak (Kab. Mimika) | <p>Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui hilirisasi industri berbasis SDA (emas, tembaga, dan perak) berorientasi ekspor di Kab. Mimika, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan investasi dan ekspor Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan <i>output</i>: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka Peningkatan SDM berkualitas, dengan <i>output</i>: fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, serta pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 299 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan implementasi penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan, melalui: reklamasi pascatambang |
| B1 B2 B3 | Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kopi) | Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kopi, melalui: |
| | Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none">• B1: Kab. Paniai• B2: Kab. Dogiyai• B3: Kab. Puncak Jaya | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produksi perkebunan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan kopi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan• Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan <i>output</i>: pendampingan/penerapan sertifikasi/pengembangan produk, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat• Peningkatan kualitas SDM, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani• Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat• Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modal• Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i> |
| B4 B5 | Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna cakalang-tongkol) | Penguatan sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: |
| | Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none">• B4: Kab. Nabire• B5: Kab. Mimika | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan sentra produksi, dengan <i>output</i>: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat• Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pembangunan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penguatan sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan, analisa dan informasi pasar ekspor, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat• Peningkatan kualitas SDM, dengan <i>output</i>: percontohan penyuluhan/penerapan model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat kelautan dan perikanan, serta pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha• Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan di lokasi SKPT sesuai standar, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat• Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas kelembagaan pada kelompok usaha bersama, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha pada UMKM kelautan dan perikanan, fasilitasi pengembangan BUMDesa, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 300 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan <i>output</i>: hilirisasi produk akuakultur, produk hilirisasi pangan hasil laut, serta penerapan teknologi ekonomi digital |
| | Provinsi Papua Tengah | <p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis dan jalan trans, dengan <i>output</i>: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas Jalan Wagate-Timika, Mulia-Sinak, Ilu-Mulia-Enarotali, Karubaga-Ilu-Mulia, serta penanganan jalan daerah • Pengembangan pelabuhan dan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: peningkatan layanan angkutan penyebrangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Ilaga, Agandugume, dan Sinak di Kab. Puncak, Bandar Udara Mozes Kilangin di Kab. Mimika, dan Bandar Udara Douw Aturure di Kab. Nabire, standardisasi <i>airstrip</i> di Papua Tengah, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang, serta angkutan udara perintis kargo • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan <i>output</i>: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Mimika (perikanan dan pertambangan) • Kab. Paniai (perkebunan) • Kab. Dogiyai (perkebunan) • Kab. Puncak Jaya (perkebunan) • Kab. Nabire (perikanan dan pariwisata) | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja |
| C1 C2 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Nabire* (padi dan pangan akuatik) • C2: Kab. Mimika* (padi, sagu, dan pangan akuatik) | <p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan (padi dan sagu) serta pangan akuatik/<i>bluefood</i> berbasis perikanan tangkap, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan padi dan sagu, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pemberian pupuk bersubsidi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 301 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|--|---|
| | <p>Kawasan Rentan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Puncak Jaya** (ubi dan babi) • Kab. Intan Jaya** (ubi) • Kab. Dogiyai** (ubi dan hortikultura) <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p> | <p>peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (<i>Good Agriculture Practices</i>), GHP (<i>Good Handling Practices</i>), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik <p>Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan ubi dan hortikultura, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, bantuan ternak babi, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan</p> |
| C1 C2 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Nabire* • C2: Kab. Mimika* <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Puncak Jaya** • Kab. Intan Jaya** <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi</p> | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p> |
| C1 C2 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Nabire* • C2: Kab. Mimika* <p>Kawasan Rawan Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Puncak** • Kab. Puncak Jaya** | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan embung dan tampungan air lainnya <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terencil rawan air</p> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|--|---|--|
| Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air | | |
| D1 D2 D3 D4 D5 D6 | Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Paniai (kopi) • D2: Kab. Dogiyai (kopi) • D3: Kab. Deiyai (kopi) • D4: Kab. Puncak (kopi) • D5: Kab. Puncak Jaya (kopi) • D6: Kab. Intan Jaya (kopi) | Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif• Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, peningkatan sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan UMKM lokal, peningkatan kemandirian masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis• Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antardiswilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan akses simpul ekonomi; serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara• Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana |
| D7 | Kawasan Afirmasi Kawasan perbatasan Kecamatan perbatasan prioritas: • D7: Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita (Kab. Mimika) | Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, penyediaan sarana pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik• Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: fasilitasi kampung siaga bencana terhadap warga masyarakat di lokasi rawan bencana, serta fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan.• Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 303 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | <p>Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) <p>Pengembangan sekolah terbuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) • Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) <p>Pengembangan sekolah sepanjang hari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Paniai (Daerah Sangat Tertinggal) <p>Pengembangan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Nabire • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) <p>Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual |
| | Provinsi Papua Tengah | <p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 304 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah |
| | <p>Pelayanan kesehatan bergerak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal)• Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal)• Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal)• Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) <p>Pembangunan RSUD provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Nabire (Daerah Tertinggal) <p>Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal)• Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal)• Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal)• Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal)• Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>• Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua tengah• Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan• Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah• Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan |
| | <p>Pengendalian penyakit malaria:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Paniai• Kab. Dogiyai• Kab. Intan Jaya• Kab. Deiyai• Kab. Puncak• Kab. Puncak Jaya• Kab. Nabire• Kab. Mimika | <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak• Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | Pengendalian penyakit TBC: <ul style="list-style-type: none">Kab. PaniaiKab. Nabire Pengendalian filariasis kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Tengah | tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL <ul style="list-style-type: none">Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALPencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALPencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS |
| | Provinsi Papua Tengah | Penguatan percepatan pencegahan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui: <ul style="list-style-type: none">Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah PapuaPeningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin)Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALPeningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebaran informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makanPeningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KBPenguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi |
| | Pemberantasan IUU Fishing: <ul style="list-style-type: none">WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)WPP 718 (perbatasan perairan dengan Australia) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: <ul style="list-style-type: none">Provinsi Papua Tengah | Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU Fishing pada WPP 717 dan 718, melalui: <ul style="list-style-type: none">Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan laut, dengan <i>output</i>: peningkatan operasi kapal dan <i>speedboat</i> pengawas, serta patroli mandiriPenguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) fishing.Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan <i>output</i>: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di PapuaPemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 306 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| | Provinsi Papua Tengah | <p>Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah ulayat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat• Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil• Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat |
| E1 | Kawasan Konservasi: | Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: |
| E2 | • E1: TN Teluk | • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 |
| E3 | • E2: TN Lorentz (Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Paniai) | • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi |
| | • E3: TN Mamberamo Foja (Kab. Puncak Jaya dan Kab. Puncak Jaya) | • Pengurangan status keterancam spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i> : inventarisasi keterancam spesies dan konservasi biota yang terancam punah. |
| | | • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon |
| | | • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) |
| | | • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem |
| E4 | Lingkungan Hidup: <ul style="list-style-type: none">• Provinsi Papua Tengah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: <ul style="list-style-type: none">• E4: Kab. Deiyai | <p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim• Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan <i>nature-based solutions</i>, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik• Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa• Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 307 -

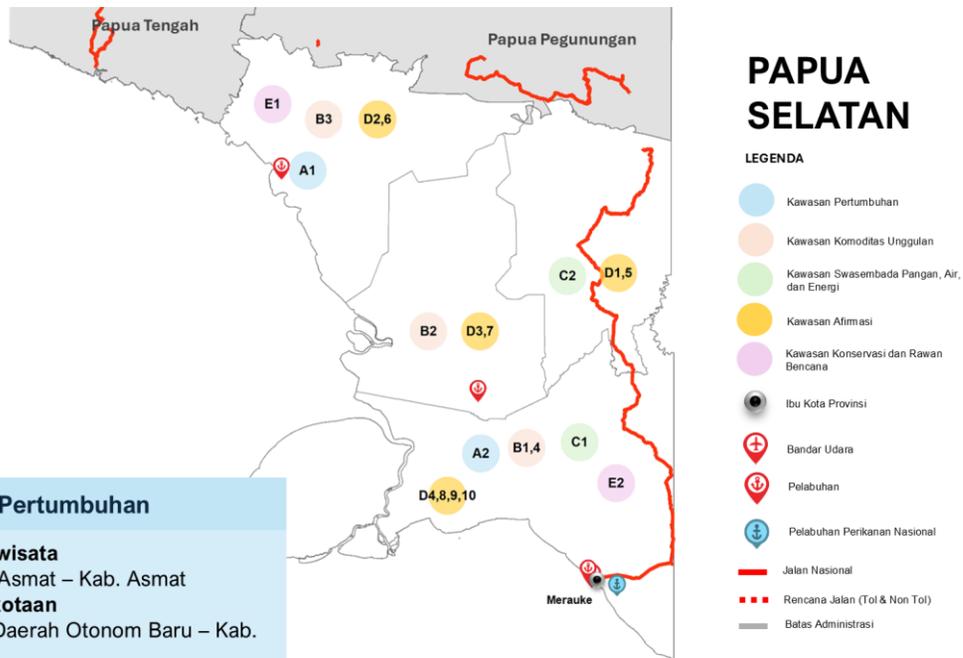
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|-----------------------|---|
| | Provinsi Papua Tengah | <p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah• Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru• Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah• Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: peningkatan portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS• Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 308 -

7.5 Provinsi Papua Selatan



A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata
1. Kawasan Asmat – Kab. Asmat

Kawasan Perkotaan
2. Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Merauke

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Sagu
1. Kab. Merauke
2. Kab. Mappi
3. Kab. Asmat

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT
4. Kab. Merauke

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Merauke: KSPP, potensial pangan, potensial energi
2. Kab. Boven Digoel: potensial air

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

1. TN Lorentz – Kab. Asmat
2. TN Wasur – Kab. Merauke

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Boven Digoel
2. Kab. Asmat
3. Kab. Mappi

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan
PKSN dan Wilayah Pendukung
4. PKSN Merauke, Kec. Ilwayab, Kec. Tabonji, Kec. Waan, Kec. Tubang, Kec. Okaba, Kec. Malind, dan Kec. Naukenjerai – Kab. Merauke
5. PKSN Tanah Merah, Kec. Kombat, Kec. Waropko, dan Kec. Ambatkwi – Kab. Boven Digoel

Kecamatan Perbatasan Prioritas
6. Kec. Agats dan Kec. Fayit – Kab. Asmat
7. Kec. Minyamur – Kab. Mappi

Kawasan Transmigrasi
8. KT Salor – Kab. Merauke
9. KT Muting – Kab. Merauke

Kawasan Perdesaan Prioritas
10. Kawasan Perdesaan Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind – Kab. Merauke



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 309 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Selatan

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|---|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 5,8 | 65,5 | 0,2 | 16,50 – 17,00 | 0,372 | 0,44 | 59,00 | 80,63 | 0,84 – 1,00 |
| 2029 <small>(2029)</small> | 6,7 | 91,9 | 0,1 | 12,50 – 13,50 | 0,367 – 0,372 | 0,47 | 78,99 | 81,30 | 0,69 – 0,84 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| A2 | Kawasan Pertumbuhan: • A2: Kab. Merauke | <p>Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i>: rencana induk (masterplan) • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Ewer • Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, peningkatan akses internet tetap pitalebar untuk UMKM dan fasilitas umum, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penataan kawasan |
| A1 | Kawasan Pertumbuhan: • A1: Kawasan Asmat (Kab. Asmat) | <p>Penyiapan kawasan Asmat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah dan pengembangan bandara Ewer (Kab. Asmat) • Pengembangan produk kepariwisataan, dengan <i>output</i>: pendukungan <i>event</i> daerah, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual pada produk ekonomi lokal, dan pengembangan produk ekonomi lokal • Pengembangan sentra pariwisata, dengan <i>output</i>: pengembangan desa wisata • Peningkatan kapasitas SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan <i>output</i>: pelatihan dan pembekalan sdm pariwisata serta sertifikasi sdm bidang pariwisata • Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan <i>output</i>: promosi terpadu secara nasional dan internasional • Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 310 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------|---|--|
| B4 | <p>Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-cakalang-tongkol)</p> <p>Sentra Produksi</p> <ul style="list-style-type: none">B4: Kab. Merauke | <p>Penyiapan pengembangan sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Penguatan sentra produksi perikanan, dengan <i>output</i>: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat, serta pengembangan kampung nelayanPengembangan tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengembangan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi logistik produk, penumbuhan eksportir, industrialisasi koperasi melalui rantai pasok produksi, pembentukan dan penguatan koperasi, pelaku usaha, UMKM dalam rantai pasok, pembentukan/pengembangan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyatPeningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan <i>output</i>: siswa SMK yang tersertifikasi kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, sertifikasi awak kapal, dan pemberian akreditasi kepada lembaga pendidikan kelautan perikananPeningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayanPeningkatan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, pengembangan kampung nelayan, dan perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepatPengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: hilirisasi produk akuakultur dan produk hilirisasi pangan hasil laut, pemberian bantuan pendanaan <i>matching fund</i> (BOPTN Penelitian) terkait produk hilirisasi kelautan perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital |
| B1 B2 B3 | <p>Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas sagu)</p> <p>Sentra Produksi</p> <ul style="list-style-type: none">B1: Kab. Merauke (sagu)B2: Kab. Mappi (sagu)B3: Kab. Asmat (sagu) | <p>Penguatan sentra produksi berbasis komoditas sagu, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan produksi perkebunan, dengan <i>output</i>: pemberian bibit unggul tanaman, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunanPengembangan tata niaga/pemasaran, dan promosi produk, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, BUMDesa, dan koperasi, serta revitalisasi pasar rakyatPeningkatan kualitas SDM, dengan <i>output</i>: pengembangan sekolah vokasi, serta Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI)Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepatPeningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modalPengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i> serta peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 311 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | Provinsi Papua Selatan | <p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan <i>output</i>: penanganan jalan daerah dan pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (Iwur–Waropko, Merauke–Mappi)• Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: peningkatan pelayaran kapal Ro-Ro, penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Agats di Kab. Asmat, pengembangan fasilitas Pelabuhan Moor di Kab. Mappi, pembangunan fasilitas Pelabuhan Wowi di Kab. Asmat, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade di Kab. Mappi, layanan angkutan laut perintis, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan penyeberangan perintis• Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat, Bandar Udara Tanah Merah di Kab. Boven Digoel, Bandar Udara Mopah di Kab. Merauke, dan Bandar Udara Kepi di Kab. Mappi, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, pengembangan angkutan udara perintis kargo, pengembangan angkutan BBM pesawat udara• Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan• Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi• Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan <i>output</i>: pembangunan BTS 4G/<i>Lastmile</i>, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan digital |
| | <ul style="list-style-type: none">• Kab. Merauke (perikanan dan perkebunan)• Kab. Mappi (perkebunan)• Kab. Asmat (perkebunan dan ekonomi kreatif) | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, perkebunan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK)• Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri• Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri• Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja |
| C1 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• C1: Kab. Merauke | <p>Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Merauke yang didukung dengan kawasan transmigrasi Salor, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pencetakan sawah• Peningkatan produksi, dengan <i>output</i>: penyaluran benih padi, areal pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) pangan, dan unit pengolah pupuk organik (UPPO)• Penyiapan pengembangan kawasan, dengan <i>output</i>: optimasi lahan menjadi produktif, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, konektivitas transportasi desa, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 312 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian pra panen, sistem drainase yang dibangun di kawasan transmigrasi, area penyaluran benih padi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP • Penguatan sarana pascapanen dan tata kelola, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i> |
| C1 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Merauke* (padi dan pangan akuatik) <p>Kawasan Rentan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Boven Digoel** (padi) • Kab. Mappi** (sagu) <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p> | <p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/<i>bluefood</i> berbasis perikanan tangkap, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan produksi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian prapanen, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut dan tawar • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan dan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan bandara) sebagai akses menuju sentra pangan lokal, pembangunan fasilitas logistik (gudang penyimpanan pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan) yang terlatih GAP, GHP, dan PHT, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (<i>Good Agriculture Practices</i>), GHP (<i>Good Handling Practices</i>), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, mendorong <i>ownership</i> petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas <p>Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan padi dan sagu, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan</p> |
| C1 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1: Kab. Merauke* <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Mappi** • Kab. Asmat** | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan pada kawasan potensial energi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), energi berbasis bahan baku nabati (<i>bioenergy</i>) termasuk ethanol, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------------|---|--|
| | <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik | <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p> |
| C2 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C2: Kab. Boven Digoel* <p>Kawasan Rawan Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Merauke** • Kab Asmat** <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan embung dan tampungan air lainnya <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air</p> |
| D1 D2 D3 | <p>Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: Kab. Boven Digoel (karet) • D2: Kab. Asmat (sagu dan ekonomi kreatif) • D3: Kab. Mappi* (sagu) <p>Keterangan:</p> <p>*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal</p> | <p>Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi berbasis pengembangan sentra perkebunan terintegrasi dan ekonomi kreatif, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pendukung <i>event</i> daerah, pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM lokal, peningkatan kemandirian masyarakat, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 314 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------------------|---|---|
| | | <p>cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis darat dan udara, serta pengembangan Bandara Mindiptanah dan Lapter Bomakia (Kab. Boven Digoel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana |
| D4 D5 D6 D7 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> • D4: PKSN Merauke, serta Kec. Ilwayab, Tabonji, Waan, Tubang, Okaba, Malind, Naukenjerai (Kab. Merauke) • D5: PKSN Tanah Merah, serta Kec. Kombut, Waropko, Ambatkiwi (Kab. Boven Digoel) <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • D6: Kec. Agats dan Kec. Fayit (Kab. Asmat) • D7: Kec. Minyamur (Kab. Mappi) | <p>Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah dan Merauke, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, penyediaan bibit unggul, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengolahan pasca panen komoditas, masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, peningkatan akses pembiayaan modal, serta pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua Selatan • Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN |
| D8 D9 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D8: KT. Salor (Kab. Merauke) • D9: KT. Muting (Kab. Merauke) | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salor dan Muting, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, sarana permukiman di kawasan transmigrasi, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian sagu, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, dan penyediaan bibit unggul pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran • Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan <i>output</i>: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di Kawasan Transmigrasi |
| D10 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D10: Kawasan Perdesaan Prioritas Semangga, Tanah | <p>Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 315 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|---|--|
| | Miring, Kurik, dan Malind (Kab. Merauke) | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas desa, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa • Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes • Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan <i>output</i>: fasilitasi penguatan tata kelola desa |
| | <p>Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) <p>Pengembangan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Merauke (PKSN Merauke) <p>Pengembangan sekolah sepanjang hari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah) <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual |
| | Provinsi Papua Selatan | <p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Kab. Asmat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah |
| | <p>Pelayanan kesehatan bergerak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 316 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | Kecamatan Perbatasan Prioritas | tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua |
| | <ul style="list-style-type: none">Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) | <ul style="list-style-type: none">Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> |
| | Pembangunan RSUD provinsi: | |
| | <ul style="list-style-type: none">Kab. Merauke | <ul style="list-style-type: none">Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua Selatan |
| | Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: | |
| | <ul style="list-style-type: none">Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah)Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) | <ul style="list-style-type: none">Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatanPenyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayahPengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan |
| | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: | |
| | <ul style="list-style-type: none">Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan | |
| | Pengendalian penyakit malaria: | Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: |
| | <ul style="list-style-type: none">Kab. MeraukeKab. AsmatKab. Boven DigoelKab. Mappi | <ul style="list-style-type: none">Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layakEliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL |
| | Pengendalian penyakit TBC: | |
| | <ul style="list-style-type: none">Kab. MappiKab. Boven Digoel | <ul style="list-style-type: none">Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL |
| | Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: | |
| | <ul style="list-style-type: none">Provinsi Papua Selatan | <ul style="list-style-type: none">Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALPencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 317 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data |
| | Provinsi Papua Selatan | <p>Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua• Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan• Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB• Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi |
| | <p>Pemberantasan IUU Fishing:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPP 718 (perbatasan dengan Australia) <p>Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provinsi Papua Selatan | <p>Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU Fishing pada WPP 718, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan <i>output</i>: peningkatan operasi kapal dan <i>speedboat</i> pengawas, serta patroli mandiri• Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) fishing.• Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)• Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan <i>output</i>: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua• Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut |
| | Provinsi Papua Selatan | <p>Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat• Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil• Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat, dengan <i>output</i>: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 318 -

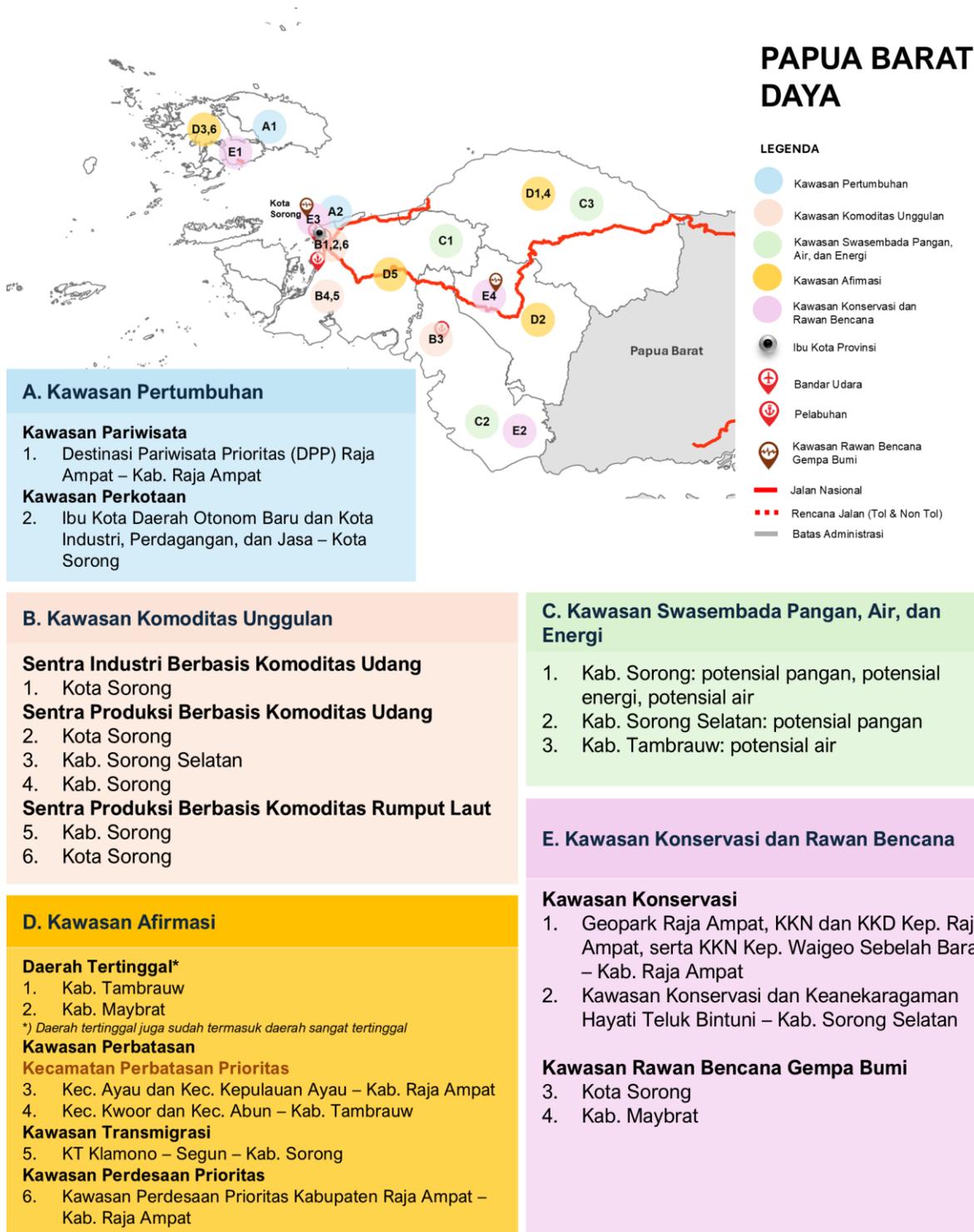
| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|--|
| E1 | Kawasan Konservasi: | Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: |
| E2 | <ul style="list-style-type: none"> • E1: TN Lorentz (Kab. Asmat) • E2: TN Wasur (Kab. Merauke) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem |
| | Provinsi Papua Selatan | Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta penerapan <i>nature-based solutions</i>, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan |
| | Provinsi Papua Selatan | Peningkatan <i>smart government</i> , penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah • Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: peningkatan portal pelayanan publik dan penerapan PTSP berbasis OSS di daerah • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 319 -

7.6 Provinsi Papua Barat Daya





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 320 -

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya

| | LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) |
|---|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 <small>(Rata-rata 2025-2029)</small> | 5,8 | 64,9 | 0,2 | 17,60 – 18,00 | 0,300 | 0,49 | 1,08 | 82,89 | 6,30 – 6,80 |
| 2029 <small>(2029)</small> | 6,6 | 89,4 | 0,2 | 11,76 – 12,76 | 0,295 – 0,300 | 0,52 | 23,09 | 83,52 | 5,32 – 5,92 |

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| A1 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> A1: DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat) | <p>Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara DEO Sorong dan bandar udara perairan di Misool, Kab. Raja Ampat Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendudukan <i>event</i> daerah, pengembangan desa wisata, pengembangan jejaring di destinasi pariwisata, dan pelaksanaan kegiatan (<i>events</i>) nasional dan internasional Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal, pembangunan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, penataan kawasan destinasi wisata, serta pengembangan amenitas dan aksesibilitas pariwisata Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan <i>output</i>: fasilitasi sertifikasi SDM bidang pariwisata dan penyelenggaraan pelatihan vokasi Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan <i>output</i>: peningkatan publikasi dan promosi terpadu secara nasional dan internasional Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: fasilitasi akses pembiayaan pariwisata berkualitas, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, pengembangan UMKM, serta pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam Peningkatan kelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa, pelaksanaan operasi SAR, serta penyediaan jalur evakuasi bencana KTA Selat Dampier, KTA Misool, dan KTA Wayag |
| A2 | <p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Daerah Otonomi Baru dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong) | <p>Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya serta kota industri, perdagangan, dan jasa, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i>: rencana induk (masterplan) Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara DEO Sorong |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 321 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis, pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan <i>output</i>: penataan kawasan, penguatan <i>branding</i> kawasan, dan penguatan promosi daya tarik kota |
| B1 B2 B3 | Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas udang) Sentra Industri <ul style="list-style-type: none"> • B1: Kota Sorong Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none"> • B1: Kota Sorong • B2: Kab. Sorong Selatan • B3: Kab. Sorong | Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas udang, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sentra produksi, dengan <i>output</i>: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan udang ke masyarakat • Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk udang, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pembangunan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penguatan sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan, analisa dan informasi pasar ekspor, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan <i>output</i>: percontohan penyuluhan/penerapan model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat kelautan dan perikanan, serta pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i> peningkatan kapasitas kelembagaan pada kelompok usaha bersama, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha pada UMKM kelautan dan perikanan, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis dan pengembangan pelabuhan pendukung industri udang, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan <i>output</i>: hilirisasi produk akuakultur, produk hilirisasi pangan hasil laut, serta penerapan teknologi ekonomi digital |
| B5 B6 | Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas rumput laut) Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none"> • B5: Kab. Sorong • B6: Kota Sorong | Penguatan sentra produksi berbasis komoditas rumput laut, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sentra produksi, dengan <i>output</i>: revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, pengendalian hama terpadu, serta peningkatan ketersediaan bibit rumput laut yang unggul • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan <i>output</i>: pembangunan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penguatan sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan, analisa dan informasi pasar ekspor, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM, dengan <i>output</i>: percontohan penyuluhan/penerapan model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat kelautan dan perikanan, serta pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis, pengembangan pelabuhan pendukung produksi rumput laut, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 322 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan kapasitas kelembagaan pada kelompok usaha bersama, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha pada UMKM kelautan dan perikanan, fasilitasi pengembangan BUMDesa, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan• Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan <i>output</i>: hilirisasi produk akuakultur, produk hilirisasi pangan hasil laut, serta penerapan teknologi ekonomi digital |
| | Provinsi Papua Barat Daya | <p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, dan jalan trans, dengan <i>output</i>: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong, pembangunan jalan strategis, penanganan jalan daerah, pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong-Makbon-Mega dan peningkatan layanan angkutan jalan perintis• Pengembangan pelabuhan dan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: pengembangan fasilitas pelabuhan Makbon di Kab. Sorong, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Sausapor di Kab. Tambrauw, pembangunan fasilitas Pelabuhan Pulau Misool di Kab. Raja Ampat, peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyeberangan perintis• Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok di Kab. Sorong, dan pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo• Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan• Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi• Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan <i>output</i>: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat |
| | <ul style="list-style-type: none">• Kab. Sorong (perikanan)• Kab. Sorong Selatan (perikanan)• Kota Sorong (perikanan dan industri)• Kab. Raja Ampat (pariwisata) | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, pariwisata, dan industri) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan dan penyediaan sarana prasarana serta pelatihan pendidikan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK)• Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri• Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri• Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|--|--|
| C1 C2 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none">C1: Kab. Sorong* (padi dan pangan akuatik)C2: Kab. Sorong Selatan* (padi dan sagu) <p>Kawasan Rentan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Tambrauw** (ubi dan pangan akuatik)Kab. Maybrat** (ubi) <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi***) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan | <p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan (padi dan sagu) serta pangan akuatik/ <i>bluefood</i> berbasis perikanan tangkap melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Peningkatan produksi, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan sagu dan padi, pemberian pupuk bersubsidi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut dan tawarPembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistikPenguatan kapasitas sdm (petani dan nelayan), dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (<i>good agriculture practices</i>), GHP (<i>good handling practices</i>), dan PHT (pengendalian hama terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk)Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik <p>Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan ubi dan pangan akuatik, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan</p> |
| C1 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none">C1: Kab. Sorong* <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Sorong Selatan**Kab. Raja Ampat** <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi***) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, serta pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu indukPenyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p> |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 324 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|---|---|
| C1 C3 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none">• C1: Kab. Sorong*• C3: Kab. Tambrauw* <p>Kawasan Rawan Air:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Sorong Selatan**• Kab. Raja Ampat** <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air</p> | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan, terutama di pulau-pulau kecil, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan embung dan tampungan air lainnya <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, penyediaan infrastruktur desalinasi di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air</p> |
| D1 D2 | <p>Kawasan Afirmasi - Daerah Tertinggal*:</p> <ul style="list-style-type: none">• D1: Kab. Tambrauw (ubi dan tuna-cakalang-tongkol)• D2: Kab. Maybrat (ubi) <p>*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal</p> | <p>Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, serta aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif• Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, peningkatan sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan UMKM lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis• Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara• Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 325 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|---|---|
| D3 D4 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan</p> <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none">D3: Kec. Ayau dan Kec. Kepulauan Ayau (Kab. Raja Ampat)D4: Kec. Kwoor dan Kec. Abun (Kab. Tambrau) | <p>Pengembangan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik, pengawasan pelaksanaan BBM 1 hargaPenataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: fasilitasi kampung siaga bencana terhadap warga masyarakat dilokasi rawan bencana, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasanPenguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN |
| D5 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi:</p> <ul style="list-style-type: none">D5: KT Klamono-Segun - (Kab. Sorong) | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Klamono-Segun di Kab. Sorong, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman di kawasan transmigrasi, serta perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digitalPengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan)Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasiPenataan desa dan persebaran penduduk, dengan <i>output</i>: bantuan sarana pengembangan sosial budaya dan mental spiritual di kawasan transmigrasi, perpindahan dan penempatan transmigran serta bantuan catu pangan untuk transmigran.Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan <i>output</i>: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di kawasan transmigrasi |
| D6 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none">D6: Kab. Raja Ampat (Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Raja Ampat) | <p>Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas di Kab. Raja Ampat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3RPeningkatan aksesibilitas desa, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desaPeningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa dan pala, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desaPeningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan <i>output</i>: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan |
| | <p>Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Tambrau (Daerah Sangat Tertinggal) | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 326 -

| No | Lokasi Prioritas | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| | <p>Pengembangan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Raja Ampat*(Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kota Sorong <p>Pengembangan sekolah sepanjang hari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Maybrat (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Sorong Selatan <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya | <p>dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi, serta pendampingan dan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan, serta akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual |
| | <p>Provinsi Papua Barat Daya</p> | <p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan <i>output</i>: prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah |
| | <p>Pelayanan kesehatan bergerak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Raja Ampat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Tambrauw (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Maybrat (Daerah Tertinggal) <p>Pembangunan RSUD provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Sorong <p>Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Raja Ampat | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua Barat Daya • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 327 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Kab. Tambrauw (Daerah Tertinggal)• Kab. Maybrat (Daerah Tertinggal) <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan |
| | <p>Pengendalian penyakit malaria:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Tambrauw• Kab. Sorong• Kab. Raja Ampat• Kota Sorong• Kab. Maybrat <p>Pengendalian penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kab. Sorong Selatan• Kab. Sorong• Kab. Tambrauw• Kab. Maybrat <p>Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provinsi Papua Barat Daya | <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan hunian layak• Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data |
| | <p>Provinsi Papua Barat Daya</p> | <p>Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua• Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin)• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL• Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan• Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 328 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi |
| | PEMBERANTASAN IUU Fishing: <ul style="list-style-type: none"> • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Papua Barat Daya | Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU Fishing pada WPP 717, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan laut, dengan <i>output</i>: peningkatan operasi kapal dan <i>speedboat</i> pengawas, serta patroli mandiri • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: lembaga pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) fishing. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) • Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan <i>output</i>: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua • Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut |
| | Provinsi Papua Barat Daya | Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah ulayat, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat |
| E1 E2 | Kawasan Konservasi: <ul style="list-style-type: none"> • E1: Geopark Raja Ampat, KKN dan KKD Kep. Raja Ampat, serta KKN Kep. Waigeo Sebelah Barat (Kab. Raja Ampat) • E2: Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab. Sorong Selatan) | Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kelembagaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan untuk implementasi nilai ekonomi karbon, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan, optimalisasi pendanaan, serta implementasi rencana induk pengembangan <i>geopark</i> • Pengurangan status keterancam spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancam spesies dan konservasi biota yang terancam punah • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan, optimalisasi pendanaan, serta implementasi rencana induk pengembangan <i>geopark</i> • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 329 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem• Pengembangan potensi <i>geopark</i> Raja Ampat, dengan <i>output</i> pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata dan fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat |
| E3 E4 | Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Barat Daya Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • E3: Kota Sorong • E4: Kab. Maybrat | Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim• Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik untuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik• Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa• Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pasca tambang |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 330 -

| No | Lokasi Prioritas | Highlight Indikasi Intervensi |
|----|---------------------------|--|
| | Provinsi Papua Barat Daya | <p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah• Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru• Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah• Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: peningkatan portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS• Peningkatan dan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP) |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman